

SKRIPSI

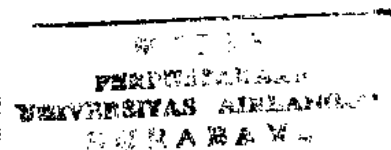
Wacana Politik Di Kalangan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya

7/10/2006
A/1
b)



PETY ANGGRAINI
070116469

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



**Wacana Politik Di Kalangan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera
Kota Surabaya**

SKRIPSI

**Dipresentasikan Untuk Menjalankan Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

PETY ANGGRAINI
070116469

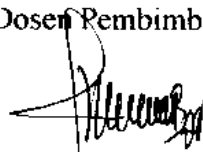
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 23 Desember 2005

Dosen Pembimbing



Dra. Sutinah, MS
NIP : 131 125 985

Skripsi ini telah diujikan di hadapan panitia penguji
pada tanggal, 12 Januari 2006

Panitia Penguji,

Ketua



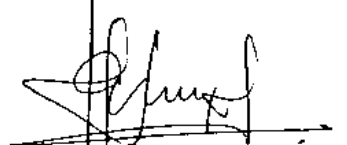
Drs. J. DWI NARWOKO, MA
NIP : 130 355 365

Anggota



Dra. SUTINAH, MS
NIP : 131 125 985

Anggota



Dra. DWI WINDYASTUTI B, MA
NIP : 131 801 643

Kepada
Mujahid Benteng Kebenaran
Sialu Rindu Akan Lahir Kejayaan

Kepada
Pewaris Tahta Nan Gemilang
Menapak Tegak Menyongsong
Masa Depan
(Izzatul Islam)

MOTTO

**“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (Agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu” (QS. Muhammad: 7)**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya pantas diberikan kepada Allah, Robb yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kemudahan kepada penulis. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat studi wacana bagi penulis masih terasa baru dan sangat jarang ditemukan di berbagai referensi yang berada di FISIP.

Lebih jauh skripsi ini mengangkat wacana politik di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya dan partisipasi politik. Sebagai studi tentang perempuan, maka diharapkan akan ditemukan sesuatu yang lain dan menarik karena isu-isu politik yang dipilih oleh penulis semuanya dikaitkan dengan perempuan. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis temuan data dan di bagian kesimpulan diperoleh berbagai macam pemahaman yang berbeda tentang isu-isu politik. Wacana yang diproduksi dari subyek penelitian yang termanifestasikan melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan symbol lainnya menggambarkan beragamnya setting social yang dimiliki oleh subyek penelitian.

Penulis sangat bersyukur karena terselesaikannya skripsi ini adalah merupakan hasil dari kerjasama dan bantuan yang tiada tara oleh banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu dan Bapak yang telah memberikan dan mengorbankan segalanya demi masa depan penulis.

2. Ibu Siti Norma selaku dosen wali penulis.
3. Ibu Sutinah selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Pak Dwi dan Bu Heny yang telah menguji penulis.
5. Pak Novry yang telah memberikan banyak masukan ketika perancangan
6. Teman-teman seangkatan atas segala supportnya dan saudara-saudara seperjuangan yang tak kenal lelah di medan juang.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya smoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat FISIP khususnya warga Sosiologi.

Surabaya, 23 Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teori.....	7
1.4.1 Teknik Dan Konsep Analisis Wacana.....	7
1.4.2 Teori Dan Konsep Ideologi.....	11
1.4.3 Hegemoni.....	14
1.4.4 Partisipasi Politik.....	17
1.4.5 Kosep Kekuasaan.....	23
1.4.6 Ideologi Gender.....	26
1.4.7 Politik Perempuan Islam.....	29
1.5 Metode Dan Prosedur Penelitian.....	33
1.5.1 Paradigma.....	33
1.5.2 Isu-Isu Yang Dikaji.....	36
1.5.2.1 Wacana.....	36
1.5.2.2 Politik.....	37
1.5.2.3 Kuota Perempuan.....	38
1.5.2.4 Pilkada.....	39
1.5.2.5 Partisipasi Politik.....	39
1.5.3 Subyek Penelitian.....	40
1.5.4 Strategi Pengumpulan Data.....	41
1.5.5 Analisis Data.....	41

BAB II SETTING LOKASI DAN GAMBARAN UMUM PENELITIAN

II.1 Surabaya Kota Pekerja.....	43
II.2 Perkembangan Struktur Kota.....	44
II.3 Membangun Kota Industri.....	49
II.4 Siklus Hidup Kota.....	51
II.5 Kehidupan Politik.....	52
II.6 Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya.....	55

II.6.1	Profil Bidang Kewanitaan DPD Partai Keadilan Sejahtera	
Surabaya	55
II.6.1.1	Visi.....	55
II.6.1.2	Misi.....	57
II.6.1.3	Struktur Bidang Kewanitaan.....	56
II.6.2	Platform Partai Keadilan Sejahtera Untuk Pembangunan	
Wanita	Indonesia Seutuhnya.....	62
II.2.3	Peran Muslimah Mengisi Era Siyasah.....	70
II.2.4	Paradigma Dakwah dan Visi Politik Muslimah Di Partai	
Keadilan Sejahtera	74
II.2.4.1	Paradigma Partai.....	75
II.2.4.2	Paradigma Gerakan.....	79
II.2.5	Kualifikasi Aktivistis Muslimah.....	81
II.2.6	Paradigma Peran Politik Muslimah.....	84
BAB III	PROFIL SUBYEK PENELITIAN.....	87
BAB IV	WACANA POLITIK.....	103
IV.1	Politik.....	104
IV.2	Kekuasaan.....	114
IV.3	Negara.....	124
IV.4	Pengambilan Keputusan.....	129
IV.5	Pilkada.....	137
IV.6	Kuota Perempuan.....	142
BAB V	PARTISIPASI POLITIK.....	148
V.1	Perempuan Dan Partisipasi Politik.....	148
V.2	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	159
BAB VI	KESIMPULAN.....	168
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena semakin maraknya keterlibatan perempuan di ranah politik. Padahal, di abad-abad sebelumnya dunia politik menjadi ruang yang gelap, sepi, dan tabu bagi perempuan. Keterlibatan perempuan di sektor politik, baik mereka yang ada di parlemen atau organisasi politik menjadi wacana yang menarik manakala perempuan dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada laki-laki mampu menunjukkan kiprahnya dalam proses politik.

Penelitian ini mengambil judul ‘Wacana Politik Di Kalangan Perempuan Partai Keadilan Surabaya’. Peneliti memfokuskan permasalahan pada wacana aktivis perempuan tentang politik, kekuasaan, negara, kuota perempuan 30%, Pilkada, dan kesesuaian antara wacana yang dianut dengan bentuk partisipasi politik aktivis perempuan partai keadilan sejahtera Surabaya.

Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori analisis wacana dan ideologi, hegemoni, kekuasaan, ideologi gender, dan partisipasi politik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana. Individu yang dijadikan subyek ialah mereka yang akrab dengan dunia politik, dalam hal ini individu yang duduk di lembaga legislatif DPRD kota Surabaya dan mereka yang terlibat di partai, baik di tingkat daerah, cabang, maupun tingkat ranting. Untuk memperoleh informasi yang mendalam data diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*), sumber-sumber data lain misalnya: buku, majalah, koran, internet akan dijadikan data tambahan.

Metode analisis wacana akan digunakan dalam penelitian ini dengan berbagai cara menstrukturkan pengetahuan dan praktis sosial. Data yang telah terkumpul, diolah, diklasifikasikan menurut tema yang relevan dari tema yang umum kemudian diklasifikasikan ke tema yang spesifik. Tahap selanjutnya mengkaitkan data tersebut dengan teori yang relevan.

BAB I

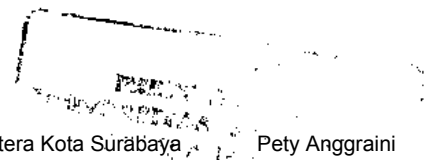
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dunia politik di abad-abad terakhir telah menjadi ruang yang gelap, sepi, dan tabu bagi perempuan. Perempuan mengalami keterasingan yang sangat, dalam dunia politik ini. Akibatnya, di belahan dunia manapun jumlah perempuan yang terjun di dunia politik sangat sedikit, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya sangat tinggi.

Zaman berubah, abad ke-20 datang bercirikan dengan bangkitnya semangat pengkajian terhadap eksistensi perempuan. Gerakan perempuan pada awalnya bertolak pada kesetaraan pendapatan dalam dunia kerja antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, gerakan emansipasi yang mengusung isu gender tidak luput merambah dunia politik. Bahkan, sejak 25 tahun setelah Konferensi Dunia Pertama Perempuan di Meksiko, atau lebih 20 tahun setelah Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Form Discrimination against Women, CEDAW*), atau sekitar 5 tahun setelah Konferensi Dunia ke-4 di Beijing, kesetaraan gender akhirnya menandai politik di banyak negara. Isu partisipasi perempuan dalam kebijakan publik berjalan secara progresif.

Bila menengok sejarah perjuangan bangsa, meskipun tidak banyak jumlahnya selalu ada pejuang-pejuang perempuan hampir di setiap tonggak perjuangan sejarah. Tepatnya sejak lahirnya KNIP (Komite Nasional Indonesia



Pusat), lembaga legislatif I yang merupakan cikal bakal MPR dan DPR sudah terdapat nama-nama perempuan sebagai anggotanya, bahkan termasuk anggota-anggota yang vokal memberi sumbangan pemikiran kepada bangsa dan negara.

Beberapa anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari kaum perempuan adalah Nn. Susilowati, Ny. Mangunsarkoro, Ny. Trimurti, Ny. Prawoto, Ny. Dr. Subandrio, Ny. Umi Suharti Sardjono, Ny. Siti Danila Salim (adik Agus Salim), Ny. Mahmuda Mashud, Ny. Sunarjo Mangunpuspito, Ny. Pudjutomo, Ny. S. Kartowijono, Ny. Suwarsih Djojopuspito, Nn. Zus Ratulangi.

Pada masa DPR-RIS yang dibentuk tanggal 15 Februari 1950 terdapat tiga orang perempuan sebagai anggota. Setelah DPR-RIS bubar, maka dibentuk DPR sementara, pada periode ini terdapat delapan orang anggota perempuan dari sejumlah 236 orang anggota.

Pemilu I pada tanggal 29 September 1955 menghasilkan 275 orang anggota DPR terdapat 16 orang anggota perempuan. Pada tanggal 23 Juli keluar ketetapan presiden No.1 tahun 1959 untuk membentuk DPR baru yang diberi nama DPR dalam rangka UUD 1945. DPR ini berjumlah 262 orang, 15 kursi diisi oleh perempuan. Tanggal 26 Juni 1960, DPR ini dibubarkan kemudian diganti DPR-GR yang dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1966 anggota DPR-GR berjumlah 281 orang. Diantara jumlah tersebut sebanyak 25 kursi diisi oleh perempuan.

Jumlah perempuan yang terjun dalam dunia politik mengalami kenaikan yang cukup tajam, baik yang aktif di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di organisasi politik. Anggota MPR/DPR periode 1987-1992, terdapat 50 orang

perempuan anggota DPR dan 104 orang perempuan anggota MPR. Padahal pada periode sebelumnya jumlah perempuan relatif sedikit.

Dalam bidang pemerintahan jumlah perempuan juga semakin bertambah. Pada tahun 1991 tercatat 927 orang perempuan sebagai kepala desa. Sementara itu pada jajaran lembaga tinggi negara tercatat 12,5% anggota Mahkamah Agung dan 5,1% anggota DPA adalah perempuan¹.

Derap langkah reformasi telah membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Kungkungan politik yang selama ini membelenggu telah lumpuh tak berdaya. Akibatnya, berbagai aspirasi bermunculan untuk menghirup udara segar kebebasan. Partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik bangsa seakan-akan bangkit dari kuburnya dan berupaya memperoleh dukungan legal masyarakat.

Partai Keadilan adalah salah satu partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktifis muslim ditengah iklim demokratis yang peluangnya dibuka oleh reformasi Indonesia.

Aktifis Partai Keadilan __ yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena aturan *Electoral Treshold* __ yang mayoritas perempuan², sejak dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beranggotakan lima perempuan dari 50 jumlah anggota secara keseluruhan, adalah Nursanita Nasution, SE, MS, Dra. Hj. Siti Zainab, Dra.

¹ Potret Politisi Wanita, Surabaya : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1993, Hal 3-5

² Hasil riset UI dan OHIO University menjelaskan bahwa persentase pemilih wanita Partai Keadilan lebih besar wanita. Kaum wanita sebesar 54% (jumlah ini diatas perbandingan pria : wanita di Indonesia yang mana wanita kurang lebih 51%)

Sri Utami, Hj. Yoyoh Yusroh, Dra. Zirlirosa Jamil³. Sementara dewan pendiri Partai Keadilan Sejahtera juga melibatkan kaum perempuan, yaitu enam orang perempuan dari 50 orang pendiri, adalah Dra. Wahidah Situmeang, Dra. Sarah Handayani, Dra. Herawati, Dra. Herlini Amran, MA, Susanti, Dra. Wirianingsih⁴.

Pada Pemilu 5 April 2004 keterwakilan perempuan di tingkat DPR pusat Partai Keadilan Sejahtera sekitar 7,8% atau tiga orang perempuan di DPR pusat, 63 orang perempuan di DPR provinsi dan DPRD kota. Secara data statistik, jumlah keterwakilan perempuan Partai Keadilan Sejahtera jauh dari total jumlah Caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera yaitu 37,4%⁵ (446 nama Caleg perempuan kuota daerah pemilihan 65). Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam nominasi dan penjurangan Caleg perempuan karena dinamika partai yang egaliter memungkinkan dilakukannya seleksi Caleg dengan mekanisme pemilu internal. Hal ini sangat berbeda dibanding PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang mengakui mengalami kesulitan menjaring Caleg perempuan karena kultur dan tradisi sebagai partai berbasis agama sehingga tidak spesifik membahas masalah perempuan⁶.

Hal yang menarik adalah jumlah keterwakilan perempuan Partai Keadilan Sejahtera di parlemen yang masih sedikit dibanding jumlah laki-laki mampu berperan sebagai unsur dalam mewujudkan misi besar PKS, yaitu reformasi

³ Sekilas Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta : DPP PK, 1998, Hal 3-4

⁴ <http://www.rahima.or.id>

⁵ Saksi, No 8 tahun VII, 19 Januari 2005.

⁶ Ketua kelompok kerja pencalonan KPU kota Yogyakarta Nasrullah, didampingi anggota KPU kota Yogyakarta Aan Kurniasih dan Rahmat Muhajir Nugroho mengatakan tiga parpol yang penitih kuota 30% Caleg perempuan adalah PKS, PAN, dan PID. Diantara ketiga parpol itu, PAN dan PKS dinilai sempurna dalam pencalonan, yakni memenuhi kuota perempuan dan memanfaatkan batas maksimal jumlah Caleg sebanyak 120% dari 35 jumlah kursi yang disediakan.

secara menyeluruh dalam kehidupan khususnya bidang politik. Selain itu, aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar parlemen atau berada di struktur partai mampu berperan serta dalam proses politik.

Herbert Mc Closky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana warga Negara mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum⁷. Namun, Huntington dan Nelson dalam bukunya, *No Choice : Political in Developing Countries* mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif⁸.

Sebagai partai yang mendeklarasikan partai kader, Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah sepi dari kiprah perempuan yang ada di dalamnya. Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera termasuk di dalamnya para perempuan beserta anak-anaknya se-Jatim, 17 April 2005 melakukan longmarch⁹ dari Taman Bungkul ke Graha di Surabaya untuk solidaritas Palestina¹⁰, menjadi salah satu

⁷ Herbert McClosky, *Political Participation*, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1981, Hal. 1

⁸ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*, Crambridge, Mass : Harvard University Press, 1997, Hal. 3

⁹ Berbagai demonstrasi Partai Keadilan Sejahtera juga disebutkan dalam draf PKS, yang berisi peran partai dalam mempromosikan peran politik perempuan yaitu pada point F penyertaan kaum perempuan dalam demonstrasi.

¹⁰ Republika, 18 April 2005

bukti partisipasi aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik.

Untuk mewujudkan langkah tersebut, perlu membangun kekuatan pribadi yang menjadi cikal bakal keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan dan kerangka pertumbuhan pribadi. Mengingat pembangunan sebuah negara memerlukan pribadi dan masyarakat yang baik, maka pembangunan pribadi menjadi sesuatu yang niscaya. Sebab, setiap individu bertanggung jawab karena individu adalah alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial dan politik.

Yang menjadi persoalan, bagaimanakah aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera baik yang berada di Parlemen maupun berada di struktur partai memahami apa sesungguhnya politik itu, mengapa perlu mengambil bagian di dalamnya?

Lebih jauh lagi, bagaimanakah aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera memberikan bentuk-bentuk partisipasinya dalam bidang politik yang tentunya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah *syar'at*. Hal ini mengingat Partai Keadilan Sejahtera adalah partai da'wah

I.2 Fokus Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

- I. Bagaimanakah wacana politik, kekuasaan, Negara, pengambilan keputusan, kuota 30% perempuan, dan Pilkada di kalangan aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya?

2. Sejauhmana kesesuaian antara wacana yang dianut dengan bentuk partisipasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya?

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai wacana politik, kekuasaan, Negara, pengambilan keputusan, kuota 30% perempuan, Pilkada di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian antara wacana yang dianut oleh perempuan partai Keadilan Sejahtera Surabaya dengan praktis social yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik

I.3.2 Manfaat

Manfaat dari segi akademik, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teori dan metode penelitian ilmiah tentang fenomena social khususnya wacana politik di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya dan bagaimana kesesuaian antara wacana tersebut dengan praktik social yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik.

I.4 Kerangka Teori

Pada bagian ini, akan mendiskusikan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis fenomena social mengenai wacana politik di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya. Studi ini melandaskan teorinya pada : Analisis Wacana dan Ideologi (Foucault), Hegemoni (Gramsci), Partisipasi Politik (Huntington dan Nelson)

I.4.1 Teknik Dan Konsep Analisis Wacana

Studi ini melandasi kajiannya pada teori analisis wacana yang diuraikan oleh **Michel Foucault**, dengan asumsi, istilah wacana yang diterjemahkan dari kata *discourse*, secara luas digunakan dalam kategori dan analisis sosial untuk merujuk berbagai cara menstrukturkan pengetahuan (*knowledge*) dan praktik sosial (*social practice*) (**Brown dan Yule, 1983; Coulthand, 1997, dalam Sparringa, 2000 :21**).

Foucault tidak hanya memfokuskan pada manusia dan apa yang mereka katakan, lebih jauh ia membahas tentang diskursus secara praktek. Dalam memahami praktek diskursus, Foucault memulai dengan kesatuan-kesatuan yang ada, namun hanya untuk membongkarnya, merekonstruksinya dalam bagian tertentu. Foucault mengingatkan

“Totalitas semua pernyataan-pernyataan efektif apakah yang dibicarakan, yang dituliskan, dalam penyebarannya sebagai peristiwa dan dalam kejadian peristiwa itu pantas baginya... suatu populasi peristiwa di ruang diskursus secara umum. Oleh sebab itu, seseorang dibimbing untuk merencanakan deskripsi murni dari peristiwa diskursif sebagai sesuatu horison untuk menyelidiki kesatuan yang membentuk didalamnya” (**Foucault, 1969, 1971/1976 :27, dalam Ritzer, 2003 : 68**)

Sesungguhnya Foucault menguraikan peristiwa diskursif, akhirnya Foucault menengok pada kesatuan diskursus, namun kesatuan diskursus tidak didefinisikan secara tradisional sebagai satu kesatuan. Foucault memahami kesatuan tersebut dalam populasi peristiwa diskursif, tidak dalam populasi manusia dan apa yang mereka ucapkan. Dengan kata lain, Foucault membebaskan peristiwa diskursif (sebagai objek) dari manusia (subjek) yang terlibat didalamnya. Foucault menggambarkan lima tahap proses untuk menganalisis ranah peristiwa diskursif. (1) Memahami pernyataan menurut kejadian yang khas,

(2) Menentukan kondisi keberadaannya, (3) Menentukan sekurang-kurangnya limitnya, (4) Membuat korelasinya dengan pernyataan yang lain yang mungkin terkait dengannya, (5) Menunjukkan apa bentuk lain pernyataan yang ia keluarkan (Foucault, 1969, 1971/1976: 28, dalam Ritzer, 2003; 68-69).

Seperti yang diungkapkan oleh Fairlough (dalam Sparringa, 2002c: 21), wacana termanifestasikan melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Oleh karena itu, wacana tidak dapat dilihat sebagai sebuah cerminan atau perwakilan dari entitas dan hubungan sosial, melainkan sebagai sebuah konstruksi atau meliputi keduanya. Wacana yang berbeda mengkonstruksikan entitas kunci secara berbeda pula. Bisa dimengerti apabila wacana yang berbeda selalu memposisikan orang dalam cara yang berbeda sebagai subjek sosial.

Menurut Foucault sebagaimana dikemukakan oleh Sparringa (2002c), konsep wacana melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*diskursive field*) yang merupakan kompetisi tentang bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses-proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Dalam pengertian yang demikian ini, wacana merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara atau untuk menulis, untuk menghasilkan makna yang didalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan objek dan efek tertentu. Dengan kata lain, wacana melekatkan apa yang didefinisikan sebagai pengetahuan dan karena itu juga kekuasaan (*power*) (Weedon, 1987: 108, dalam Sparringa, 2002c: 21)

Sebagaimana dijelaskan Sparringa (2002c: 21), bagi Foucault (1979: 27), kekuasaan (*power*) selalu berimplikasi pada pengetahuan. Begitupun sebaliknya, tidak ada pengetahuan yang tidak berkorelasi dengan kekuasaan. Bagi Foucault, *power*, *knowledge* dalam ekspresi yang berbeda, ingin menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan menciptakan objek-objek dari pengetahuan dan sistem informasi. Pada gilirannya, pengetahuan yang dapat dibentuk tanpa sistem komunikasi, akumulasi, dan pengorganisasian catatan yang tidak lain adalah bentuk kekuasaan yang berhubungan dalam keberadaan dan fungsinya dengan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Sebaliknya, tidak ada kekuasaan dapat diwujudkan tanpa ekstraksi, penambahan, distribusi, atau penyimpanan pengetahuan.

Wacana secara umum sangat berhubungan dengan pertanyaan dasar; Bagaimanakah sebuah pertanyaan lebih mengemuka daripada yang lain ? (Foucault, 1972: 27, dalam Sparringa, 2002c: 22). Oleh karena itu, wacana harus dilihat dalam konteks yang didalamnya sedang mengoperasikan prosedur dan peraturan yang khas. Melalui hal itu, wacana selalu menyertakan sebuah paket dengan kondisi-kondisi yang membuat sesuatu menjadi mungkin dan kendala-kendala institusional serta aturan-aturan internal tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikemukakan. Pemahaman tentang ihwal itu sangat penting untuk mengerti bagaimana, apa yang dikemukakan dalam sebuah pernyataan atau teks sesuai dengan seluruh jaringan yang didalamnya memiliki sejarah dan kondisinya sendiri tentang keberadaannya sebuah sejarah yang tentu saja berbeda maknanya dengan yang digunakan para filsuf dan sejarawan (Barret, 1991: 126, dalam

Sparringa, 2002c: 22). Hasilnya, menurut (Flax 1992, dalam Sparringa, 2002c: 220) setiap wacana selalu memuat sesuatu yang memungkinkan (*enabling*) dan membatasi (*limiting*). Dan sebagai sebuah kesatuan, wacana tidak pernah salah atau benar, karena kebenaran yang diproduksi selalu kontekstual dan berantung pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hubungannya, antara Foucault (*discourse*) dan Marxisme (*ideology*), diinterpretasikan karena untuk mengurangi jarak antara keduanya. Mata rantai utama dalam memahami discourse yang bertentangan dengan ideology berhenti sejenak pada '*counterposing*' yang diungkapkan oleh Althusser dan Foucault. Althusser menempatkan ideologi pada problematika dari reproduksi dominasi. Sedangkan Foucault sendiri menegaskan bahwa discourse tidak diciptakan hanya untuk menganalisis fenomena kekuasaan sesuatu.

1.4.2 Teori dan Konsep Ideologi

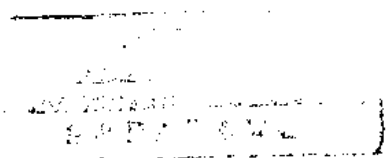
Ideology yang menjadi landasan pada studi ini dimaksudkan sebagai tambahan atau supplements bagi teori wacana (*discourse theory*) ketimbang menjadi penentangannya, yaitu dengan menggunakan analisis ideologis untuk memfokuskan pada efek-efek *diskursive practices*, yang disebut *ideology effects* (Purvis and Huut, 1993: 473).

Menurut Sparringa (2002d: 12), meskipun ada banyak tokoh yang berusaha memberi definisi mengenai ideologi, namun tidak satu penjelasan pun yang mampu memberikan definisi mengenai ideologi. Sebagian besar beralasan bahwa konsep ideologi merupakan konsep yang ambigu dan memiliki banyak

perbedaan dalam penggunaannya serta konsep ini telah mengalami banyak proses pemaknaan atau pergantian sejak satu kali digunakan.

Ideologi adalah satu dari sekian banyak konsep yang paling ekuivokal (meragukan) dan elusif (sukar ditangkap), yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial; tidak hanya karena keragamannya pendekatan teoritis yang menunjuk arti dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi karena ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang beragam (Larrain, 1996: 1).

Pernyataan utama yang diuraikan Larrain (1996: 2) untuk menjelaskan penekanan ideology pada sifat, asal, scope dan hubungan-hubungan konsep ideologi. *Pertama*, pernyataan itu timbul mengenai apakah ideologi memiliki arti negatif atau positif. Disatu pihak, ideologi dapat dimengerti dalam istilah-istilah yang sungguh negatif, sebagai konsep kritis yang berarti bentuk kesadaran palsu atau kebutuhan untuk melakukan penipuan (*desepsi*), maksudnya bagaimana memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial; nilai kognitif dari ide-ide yang dipengaruhi oleh ideologi yang disebut dalam suatu pernyataan. Di pihak lain, konsep ideologi dapat dimengerti sebagai istilah yang positif yakni sebagai ekspresi dari sudut pandang mengenai kelas. Sampai tingkat ini, orang dapat bicara tentang ideologi, yang secara umum adalah beberapa pendapat, teori dan sikap yang dibentuk dalam kelas (golongan) untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingannya. Nilai kognitif dari ide-ide ideologis itu selanjutnya dikesampingkan sebagai suatu persoalan yang berbeda.



Kedua, pernyataan itu dapat diajukan untuk mengetahui apakah ideology mempunyai sifat yang benar-benar subjektif dan benar-benar memiliki watak psikologis, sebaliknya, seluruhnya tergantung pada faktor-faktor objektif. Jika subjektif, ideologi dipahami sebagai bentuk perubahan bentuk kesadaran, yang entah bagaimana tidak dapat mengerti realita seperti adanya. Jika objektif, ideologi muncul sebagai penipuan yang disebabkan oleh realitas itu sendiri, bukan objek itu yang memutarbalikkan realita, akan tetapi realita itu sendiri yang menipu subjek. Selagi pandangan subjektif menekankan peranan individu, golongan, dan partai dalam produksi ideologi, maka pandangan objektif menganggap ideologi sebagai pengisian struktur dasar masyarakat. Althusser (1996: 177) membedakan penekanan dalam karya-karyanya, yaitu menekankan ideologi sebagai tingkat realita sosial yang objektif, bebas dari subjektivitas individu, ideologi memang benar-benar sistem representasi.

Manusia mempraktekkan ideologi tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ideologi adalah ketidaksadaran yang terlalu dan melampaui, dengan cara yang dialami oleh individu-individu tertentu. Sifat ideologi yang esensial hanya dapat dipahami melalui strukturnya. Pameran atau representasi tidak membentuk ideologi, "Sistem cara kombinasi atau disposisi (penyusunan) mereka memberinya arti, struktur menentukan mereka dalam pengertian dan fungsi mereka". Karena ideologi ditentukan oleh strukturnya, maka tidak dapat diubah menjadi cara yang dialami oleh berbagai individu, dan dapat dipelajari sebagai fenomena yang objektif.

Dalam *'Theoretical Practice and Ideological Struggle'* Althusser (1996: 178) nampaknya kembali kepada rumus lama, ketika ia mengatakan bahwa "ideologi adalah representasi dari yang sesungguhnya (*the real*), tetapi satu kesalahan penting terjadi, sejak kepentingan tersebut diorientasikan dan dicondongkan". Namun tidak melihat ketidaksesuaian antara pernyataan ini dengan anggapan ideologi sebagai tingkat masyarakat yang objektif.

Menurutnya orang tidak dapat hidup tanpa representasi tertentu dari dunia mereka dan dari hubungan mereka dengan dunia, tetapi representasi ini diberikan mengenai masing-masing subjek. Manusia memperolehnya setelah dibentuk, seperti halnya hubungan ekonomi dan politik dibentuk sebelum mereka lahir. Ideologi dengan begitu muncul sebagai representasi dunia tertentu, yang menghubungkan manusia dengan kondisi eksistensi mereka dengan yang lain, karena itu fungsi ideologi ialah mendapatkan kohesi diantara sesama manusia dengan tugasnya. Althusser menggambarkan ideologi sebagai *'coment'* yang memasukkan diri kedalam semua bagian dari gedung sosial, membuat penyesuaian dan kohesi manusia dalam peranan mereka. Ideologi tidak hanya memperkenankan manusia melaksanakan tugas-tugas mereka, tetapi juga membantu mereka menahan situasi mereka, entah yang dieksploiter (diperas), atau yang mengeksploiter (memeras). Dengan demikian ideologi adalah elemen esensial dari semua masyarakat karena melindungi pemenuhan tugas-tugas sosial yang esensial.

1.4.3 Hegemoni

Dalam istilahnya yang umum, **Sparringa** (1997) ketika mencoba mensintesis beberapa penafsiran para akademi atas konsep hegemoni yang ditawarkan Gramsci menunjukkan bahwa konseptualisasi hegemoni yang ditawarkan Gramsci relevan dengan Foucault tentang diskursus dan kekuasaan dan pengetahuan. Foucault sependapat dengan Gramsci yang mempunyai perhatian yang cukup tinggi terhadap peranan bahasa sebagai suatu factor pembentuk stuktur politik (**Sparringa**, 1997: 17).

Hegemoni erat kaitannya dengan masalah dominasi, namun dalam melihat hubungan tersebut Gramsci, sebagaimana dikutip Simon, memandang bahwa hegemoni bukanlah dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsesus (**Simon**, 1992: 21)

Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral intelektual :

“Suatu kelompok social biasa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut), kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap ‘memimpin’”.

Mengelola pada pengertian Gramsci, intelektual memainkan suatu bagian penting di dalam proses pembentukan pandangan public. Menurut Sparringa (1997) yang mengacu pada **Billing** (1990) karena keberadaan intelektual organic, kelas dominan biasanya dapat melaksanakan kekuasaan ekonomi tapi juga menyediakan kepemimpinan moral dan intelektual terhadap masyarakat melalui penggalangan aliansi dengan kelas pekerja dan melalui penggunaan keberadaan

negara dan kepemimpinan social dengan otoritas yang *legitimate*. Dalam pengertian ini, secara tidak langsung, kelas-kelas yang berada di bawah suatu aliansi akan menerima ide-ide intelektual tanpa kritik dan menerima pandangan para intelektual itu sebagai sebuah pandangan mereka.

Jadi, dominasi kelas terjadi melalui kepemimpinan intelektual dan moral sama kuatnya dengan factor ekonomi (Gramsci, 1971: 5-14). Bagi Gramsci, sebagaimana dijelaskan Billing (1990) yang diikuti Sparringa (1977), pergerakan revolusioner merupakan hasil akhir dari pendidikan. Setiap hubungan hegemoni memerlukan suatu hubungan pendidikan (1971: 350). Jadi untuk mendapatkan pergerakan revolusioner yang sukses, kelas-kelas yang berada dalam bagian aliansi menggeneralisasikan sehingga sukses di dalam perjuangan yang revolusioner, kelas-kelas yang beraliansi harus membangkitkan kaum intelektual organis yang mampu di dalam perbuatan bentuk-bentuk hegemoni baru dengan mengharuskan klaim universalistic pandangan-pandangan dunia yang lama (Sparringa, 1997: 11)

Gozali, mengutip pendapat Martin, mendefinisikan hegemoni sebagai sebuah cara penaklukan masyarakat secara keseluruhan lewat penanaman norma, nilai, serta budaya secara ideologis oleh kelas penguasa dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaan. Kelas penguasa berusaha tetap mengerahkan pandangan hidup serta kerangka karangan kehidupan kelas yang dikuasainya agar tetap sesuai dengan pandangan serta kerangka kehidupan yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian, kekuasaan dapat dipertahankan bukan semata-mata karena kelas penguasa memiliki kekuatan fisik atau material yang besar,

melainkan karena kemampuannya untuk menghegemoni masyarakat agar tetap mau hidup dalam aturan main kelas penguasa.

Konsep yang dikembangkan **Marx**, hegemoni dicapai melalui diskursus yang sistemik, terarah dan berkelanjutan guna memenangkan penerimaan rakyat akan sebuah ide, gagasan, atau rezim karena mereka menganggap dalam ide tersebut terkandung *common sense* yang didalamnya mengandung kebenaran. Sebuah kebenaran yang mampu menciptakan realitas social.

1.4.4 Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (**Miriam Budiarjo**, 1998: 1-2).

Sejalan dengan pendapat di atas menurut **Ramlan Surbakti**, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan (**Ramlan Surbakti**, 1992: 118).

Samuel P. Huntington dan **Joan Nelson**, memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Huntington dan Nelson, 1994: 6).

Yang dilihat adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekalipun focus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritas untuk masyarakat.

Berdasarkan pengertian partisipasi politik dari Huntington dan Nelson dapat dikatakan :

Pertama, partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan bukan sikap-sikap. Sebagai kontras para sarjana memasukkan definisi partisipasi politik mencakup orientasi-orientasi warga negara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata.

Kedua, partisipasi mencakup kegiatan politik warga negara perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman.

Ketiga, kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Keempat, semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek.

Partisipasi politik kemunculannya menunjukkan wujud dan bentuk yang memiliki spesifikasi yang dapat dibedakan antara kegiatan satu dengan yang lain. Adanya spesifikasi yang membedakan antara kegiatan-kegiatan tersebut, mendorong para ahli untuk mengkategorikan partisipasi politik. Beberapa kategori partisipasi politik tersebut adalah :

Pertama, partisipasi politik mandiri (otonom) dan partisipasi dikerahkan (dimobilisasi). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membedakan partisipasi politik kedalam dua kategori : partisipasi mandiri (otonom) dan partisipasi dikerahkan (dimobilisasi). Partisipasi politik negara berkembang, khususnya di Indonesia, lebih banyak diarahkan pada kegiatan pembangunan. Pembangunan ekonomi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan pembangunan politik sebagai subordinatnya. Tetapi dari kondisi yang demikian itu, bukanlah tidak ada partisipasi politik. Apabila partisipasi yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, maka Huntington dan Nelson menggolongkan partisipasi tersebut kedalam partisipasi mandiri. Sedangkan apabila partisipasi yang dilakukan merupakan hasil manipulasi dan digerakkan oleh pihak lain, maka partisipasi tersebut termasuk dalam golongan partisipasi yang dikerahkan (*mobilized participation*)

Berbeda dengan Huntington dan Nelson, **Myron Weiner** tidak memasukkan partisipasi yang digerakkan atau dikerahkan kedalam pengertian partisipasi politik. Weiner menekankan pada aspek kemandirian partisipasi yang dilakukan masyarakat.

Kedua, partisipasi aktif dan pasif. Pendapat lain tentang penggolongan partisipasi politik diberikan oleh Ramlan Surbakti, yang menggolongkan partisipasi politik kedalam dua kategori, yakni partisipasi politik aktif dan pasif. Partisipasi aktif meliputi kegiatan-kegiatan warga negara mengajukan alternative kebijakan, usul mengenai suatu kebijaksanaan umum, mengajukan alternative kebijaksanaan umum yang berbeda dengan kebijaksanaan pemerintah,

mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan mengenai peraturan atas pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi aktif mencakup masyarakat lingkup yang lebih luas bila dibanding partisipasi pasif. Partisipasi aktif dalam pengertian system politik yang dikemukakan oleh **David Easton** memberikan gambaran beberapa unsure yang terlibat di dalamnya, yakni adanya input (tuntutan dan dukungan) yang memberikan masukan kedalam system politik (proses pembuatan keputusan) yang menghasilkan output berupa keputusan dan atau kebijakan (David Easton). Dalam pengertian partisipasi politik aktif, termasuk kedalam unsure input adalah adanya kegiatan warga negara dalam mengajukan usul mengenai kebijakan umum yang mungkin berbeda dengan pemerintah.

Ketiga, kategori partisipasi yang lain diberikan oleh **Edward N. Muller**, yang mendasarkan pengertian pada jumlah pelakunya. Berdasarkan jumlah pelaku, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi individu dan partisipasi kolektif (Edward N Muller). Partisipasi individu berujud kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk mempengaruhi penguasa, seperti dalam pemilu. Partisipasi kolektif adalah partisipasi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama dalam satu kolektivitas.

Keempat, kategori partisipasi yang berikutnya adalah partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Kegiatan konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.

Pengkategorian oleh **Gabriel A. Almond** ini memasukkan dalam rumpun partisipasi konvensional antara lain; pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Partisipasi non konvensional, meliputi antara lain pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi dan mogok. Sedangkan aktivitas yang disebut partisipasi politik dapat mewujudkan dirinya ke dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda. Para ahli ilmu politik pada umumnya menggolongkan kegiatan tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu apa yang disebut kegiatan dalam kaitannya dengan *electoral activities*, yaitu yang disebut dengan macam kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, dan yang kedua adalah kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu, *non electoral activities*.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menggolongkan partisipasi politik kedalam bentuk kegiatan berikut :

Electoral activities, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih sebuah partai politik, memberikan suara dalam pemilu, mengamati pelaksanaan, pemberian, dan perhitungan suara, serta menilai calon-calon yang diajukan.

Lobbying, tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat atau tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan atau untuk memobilisasi dukungan, ataupun tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.

Organizational activities, segala bentuk kegiatan warga masyarakat kedalam berbagai organisasi social politik. Apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan public. Ada organisasi yang memusatkan perhatian terhadap isu-isu yang sifatnya sangat spesifik, ada organisasi yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah social politik. Menjadi anggota sudah menunjukkan elemen dari partisipasi meskipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung mempengaruhi pemerintah yang mencakup bagian yang berkaitan dengan dukungan terhadap suatu organisasi baik politik maupun non politik, termasuk di dalamnya menjadi anggota organisasi tersebut, dan terlibat dalam aktivitas organisasi untuk mempengaruhi pemerintah.

Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh organisasi dengan secara langsung (mendatangi ketempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual atau dalam kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya dengan bentuk partisipasi seperti akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.

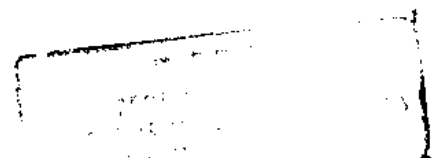
Violence, atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa dapat juga dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, seperti misalnya demonstrasi, bahkan kekerasan politik. Biasanya tindakan seperti ini dijalankan kalau saluran untuk menyampaikan aspirasi politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara yang secara syah dilakukan dan mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

1.4.4 Konsep Kekuasaan

Para filsuf Yunani dan Romawi pada umumnya mengkaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasaan itu dengan Tuhan. Bagi mereka kekuasaan politik hanya sebagai alat mengabdikan tujuan negara yang dianggap agung dan mulia : yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan pada kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, bagi para pemikir religius, kekuasaan itu tidak boleh dipisahkan dari kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan dari Tuhan sendiri. Dan itu berarti kekuasaan tidak boleh terlepas dari etika dan religi.

Dalam ilmu politik, kekuasaan dan gejala-gejala yang berkaitan sangatlah penting, apalagi jika dilihat dalam kerangka suatu masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini mengherankan sebab konsep kekuasaan mempunyai sifat yang sangat mendasar dalam ilmu social dan ilmu politik khususnya. Malahan suatu ketika politik dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Sekalipun



pandangan itu telah ditinggalkan, akan tetapi kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan tetap diperdebatkan.

Menurut Foucault (**Michael, Foucault, 1997**), kekuasaan dan pengetahuan itu secara langsung berhubungan, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa hubungan pengetahuan dan tidak mensyaratkan hubungan kekuasaan pada saat yang sama. Foucault mengembangkan konsep kekuasaan sebagai penolakan terhadap gagasan negara top down yang tradisional dan gagasan bahwa kekuasaan pada umumnya represif. Baginya kekuasaan lebih banyak disebar dan yang fundamental terletak pada pengetahuan. Konsekuensi negara bukanlah tempat kekuasaan yang utama, melainkan tidak lebih dari institusi dan wacana dominan menertibkan, menghukum, dan menggerakkan seseorang. Dengan kata lain, negara bukanlah produk dari kelas dominan.

Sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi ada satu inti yang nampak dari semua perumusan kekuasaan, bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku (baik seseorang, sekelompok orang, atau kolektivitas) untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. (**Laswell dan Kaplan, 1950; Dahl, 1978** dalam **Budiardjo, 1996**)

Esensi dari kekuasaan adalah kemampuan untuk mengadakan sanksi dalam hal satu pihak tidak mengikuti kemauan pihak lain. Akan tetapi, seandainya dalam suatu hubungan pelaku tidak mampu mengadakan sanksi maka hal ini tidak disebut kekuasaan akan tetapi pengaruh. Jadi pengaruh dapat dilihat sebagai

bentuk khusus atau bentuk lunak dari kekuasaan, dalam arti bahwa hasil dari penyelenggaraan pengaruh kurang pasti dibanding dengan hasil dari penyelenggaraan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena pengaruh berusaha mencapai tujuannya dengan jalan meyakinkan (*persuasi*) dan membujuk, atau dengan cara lain seperti misalnya memberikan informasi lengkap atau menyediakan konsultasi dengan tenaga ahli.

Mengapa seseorang mempunyai kekuasaan? Apakah sumber kekuasaan bagi seorang pelaku? Sumber kekuasaan bermacam-macam sifatnya, dapat berupa kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau agama, kekerabatan, kepandaian, dan keterampilan. Upaya penyelenggaraan kekuasaan pun berbeda-beda, baik dengan paksaan melalui kekerasan (*force*) maupun dengan cara lunak dengan persuasi (*persuasion*) yaitu proses meyakinkan.

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu *authority* (wewenang) dan *legitimacy* (keabsahan). **Robert Bierstedt** (1950) dalam karangannya *An Analysis of Social Power* mengatakan bahwa *authority* adalah kekuasaan formal (*formal power*).

Keabsahan atau legitimasi diartikan sebagai keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa harus

dipatuhi. Dalam hubungan ini oleh David Easton bahwa keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar bagi dia untuk menerima dengan baik dan menaati penguasa serta memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Dilihat dari segi pandang penguasa, menurut A.M. Lipse legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu.

Max Weber (1864-1922) membagi authority menjadi tiga macam, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional legal (**Eisenstedt**, 1968). Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kekuasaan yang dilandasi oleh wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasar kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan fisik atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Di sini yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.

Jika dalam system politik consensus mengenai dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh sehingga unsure paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh seorang rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu, suatu system politik akan selalu mencoba untuk membangun dan mempertahankan keabsahannya di kalangan rakyat hal itu merupakan yang paling mantap.

1.4.5 Ideology Gender

Hal yang pertama kali harus dipahami adalah pengertian gender dan seks atau jenis kelamin. Seks ditentukan oleh ciri-ciri biologis sedangkan gender bermuansa psikologis, sosiologis, dan budaya. Seks merupakan kenyataan biologis yang alamiah, sedang gender merupakan perolehan dari proses belajar dan sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. **Maria Mies** mengatakan bahwa seks ataupun seksualitas manusia tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah biologis.

Seks membedakan manusia laki-laki dan perempuan dari aspek biologis, gender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara social mengacu pada unsure emosional, kejiwaan, dan social. **Hilary M. Lips** dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender : an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan konsep gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksukan secara social maupun cultural (**M. Fakih, 1996: 8-10**)

Permasalahan yang muncul, pengertian gender dicampur adukkan dengan pengertian tentang kodrat. Teori nature beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan biologis dan teori nurture beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh proses belajar manusia dari lingkungan. Dari proses belajar manusia itu, muncullah teori gender yang kemudian dijadikan landasan berpikir dan falsafah hidup, sehingga menjadi ideology gender.

Ideology gender merupakan pola berpikir yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kepantasannya, atau dengan kata lain melalui ideology gender manusia menciptakan kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki sesuai yang diperolehnya dari pengalaman. Ideology gender menghasilkan pandangan manusia tentang peran jenis dalam masyarakat. Peran jenis (sex role) adalah satu kelompok perilaku, kesenangan, dan sifat serta sikap yang dimiliki oleh satu jenis tertentu, dan tidak dimiliki oleh jenis yang lainnya.

Dengan adanya peran jenis, maka muncul stereotip jenis. Stereotip jenis adalah pembakuan suatu pandangan terhadap kelompok manusia dengan memberi ciri-ciri tertentu, tanpa memperhatikan variasi perseorangan. Stereotip terhadap jenis, telah membakukan pandangan tentang bagaimana perempuan “seharusnya”, dan bagaimana laki-laki “seharusnya. Pandangan stereotip ini, membuat seorang pribadi laki-laki merasa bersalah, apabila ia melakukan tindakan dan ciri keperempuanan, atau sebaliknya.

Dalam proses kehidupan, ideology gender yang berbasis patriarki menentukan kuasa penentu pada laki-laki. Ideology gender berpengaruh pada pembagian kerja dalam masyarakat, pembagian kekuasaan, hak dan tanggung jawab, hubungan laki-laki dan perempuan. Dikotomi domestic-publik (juga nature dan nurture) yang terbentuk dalam konteks tertentu telah menempatkan perempuan (mewakili sifat nature) pada kiprah-kiprah dalam sector domestic, sementara laki-laki (mewakili sifat nurture) ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sector public. Namun demikian, meskipun sector domestic dipegang oleh perempuan, ideology patriarki berlaku di dalamnya berupa

keberadaan kepemimpinan di sector ini pada tangan laki-laki (karena keterlibatannya pada sector public). Artinya ada realitas yang tak terbantahkan bahwa sector domestic ini tergantung pada sector public.

Dalam perspektif feminis, spesifikasi peran-peran manusia (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat dipandang timpang (tidak egaliter). Artinya konstruksi social selama ini sangat berpihak kepada laki-laki dan pada saat yang sama sangat menyudutkan kaum hawa. Menurut kaum feminis, hegemoni laki-laki atas perempuan ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai social, agama, hukum negara, serta tersosialisasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

I.4.6 Politik Perempuan Islam

Ketika berbicara tentang peran politik perempuan dalam islam berarti berbicara perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum.

Dalam islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki maupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu, yaitu

problem manusia. ‘Secara umum, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Sesungguhnya perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak partisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik dipusat maupun di daerah, juga hak untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis itu” (Amatullah: 34)

Legitimasi syar’i ini berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Qur’an yang mengandung *mission statement* bagi setiap muslim secara umum, dengan beberapa ayat memberi penekanan pada peran serta muslimah.

1. Manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban menaati hukum Allah. Firman Allah, “Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakanNya pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-A’raaf : 54)
2. Positioning manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*. Firman Allah, “Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo’a, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingatinya.” (An-Naml : 62)

Dengan posisi sebagai *khalifatullah fil ardh*, manusia mengemban amanat sebagai agen pembangunan dan pemelihara alam semesta, berdasarkan syariat Allah.

Ketika kaum muslimin (baik laki-laki maupun perempuan) berupaya memfungsikan potensinya untuk mengurus dan menyelesaikan problematika umat, berarti telah melakukan peran politik. Peran politik perempuan yang utama adalah melakukan proses perubahan menuju tegaknya system islam. Adapun cara-caranya sebagai berikut :

1. Aktif dalam dakwah bersama dengan partai politik islam yang berjuang untuk menegakkan system islam.

Partai politik islam adalah partai politik yang berasaskan islam yang pemikiran-pemikiran dan metode yang digunakan bersumber dari akidah islam. Firman Allah, “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran: 104). **Sayyid Quthb** dalam *Fi Zhilalil Qur'an* (2001: 124) menafsirkan ayat diatas, “Maka, manhaj Allah di muka bumi bukan semata-mata nasihat, bimbingan, dan keterangan. Memang ini adalah satu aspek, tetapi ada aspek yang lain lagi. Yaitu, menegakkan kekuasaan untuk memerintah dan melarang; mewujudkan yang makruf dan meniadakan kemungkaran dari kehidupan manusia; dan memelihara kebiasaan jama'ah yang baik...”. Seruan dalam surat Ali Imran ayat 104 berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan.

2. Menasehati dan mengoreksi penguasa.

Seperti juga laki-laki, Allah juga mensyariatkan kepada perempuan untuk memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda, “Agama ini nasihat, “Ditanyakan,” Kepada siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Kepada Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan rakyat jelata.” (HR. Bukhari) (Muslikhati, 2004: 142)

Perempuan dapat memberi nasihat dan mengoreksi penguasa secara langsung maupun melalui partai politik islam dimana dia bergabung di dalamnya.

3. Memilih dan membaiai khalifah.

Kekuasaan untuk memilih khalifah ada di tangan rakyat. Syahnya pengangkatan khalifah adalah dengan adanya baiat. Baiat adalah pernyataan dari kaum muslimin kepada seorang muslim bahwa mereka rela mengangkat dan taat pada orang tersebut untuk memimpin mereka serta memberlakukan hukum Allah pada mereka.

Islam memberi hak dan kewajiban baiat kepada perempuan sebagaimana laki-laki.

4. Memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat

Majelis umat merupakan wadah berkumpulnya wakil-wakil rakyat yang berwenang memberikan pendapat dan nasihat kepada khalifah. Kebolehan perempuan dipilih dan memilih anggota majelis umat didasarkan atas riwayat shahih dari **Ibnu Hisyam** dari **Ka'ab bin Malik** bahwa setelah 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan dari suku Aus dan Khazraj

melakukan baiat Aqabah II, Rasul berkata kepada mereka, “Datangkanlah 12 wakil dari kalian yang ada pada mereka tanggung jawab atas kabilahnya masing-masing...” (Muslikhati, 2004: 145)

Seruan Rasul itu ditujukan untuk laki-laki dan perempuan.

1.5 Metode dan Prosedur Penelitian

1.5.1 Paradigma

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh **Thomas Kuhn** dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Paradigma merupakan terminology kunci dalam model perkembangan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan Kuhn. Inti tesis Kuhn adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif tetapi terjadi secara revolusi. Tetapi Kuhn tidak bisa merumuskan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan paradigma itu. Istilah paradigma dipergunakan oleh Kuhn tak kurang dari 21 cara yang berbeda. **Masterman** mencoba mereduksi ke-21 konsep paradigma Kuhn menjadi tiga tipe (Ritzer, 1992: 5). Masing-masing adalah paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), paradigma sosiologis (*sociological paradigm*), paradigma konstruktif (*construct paradigm*)

Robert Friedrichs adalah orang pertama yang mencoba merumuskan pengertian paradigma ini secara jelas. Paradigma sebagai pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (Ritzer, 1992: 7).

George Ritzer, dengan mensintesis pengertian paradigma yang telah dikemukakan oleh Kuhn, Masterman, dan Friedrichs, mencoba merumuskan

pengertian paradigma, yakni pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh sesuatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*). Dalam satu paradigma tertentu terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu itu serta kesamaan metode serta instrument yang digunakan sebagai peralatan analisa. Paradigma merupakan consensus yang terluas yang terdapat dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang membedakan antara komunitas ilmuwan atau sub-komunitas yang satu dengan yang lainnya.

Masih menurut Ritzer, paradigma menggolong-golongkan, mendefinisikan dan menghubungkan antara exemplar, teori-teori, metode-metode serta instrument-instrumen yang terdapat di dalamnya. Ritzer menyatakan bahwa sosiologi didominasi oleh 3 paradigma. Yaitu paradigma fakta social, definisi social, dan perilaku social. (Ritzer, 1992: 151)

Exemplar paradigma fakta social diambil dari kedua karya **Durkheim**. Durkheim meletakkan landasan paradigma fakta social melalui karyanya *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Fakta social dinyatakannya sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta social. Dalam paradigma fakta social terdapat 4 varian teori, yaitu fungsionalisme structural, konflik, system, sosiologi makro.

Exemplar paradigma definisi social (Ritzer, 1992: 15) adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan social (*social action*). Konsep Weber tentang fakta social berbeda sekali dengan konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur social dengan pranata social. Struktur social dan pranata social keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan social antar hubungan social. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Tindakan social merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Teori yang termasuk dalam paradigma definisi social adalah teori aksi, interaksionalisme simbolik, fenomenologi.

Skinner melihat paradigma fakta social dan paradigma definisi social sebagai perspektif yang bersifat mistik, dalam arti mengandung sesuatu persoalan yang bersifat teka-teki, tidak dapat diterangkan secara rasional. Menurut Kinner (Ritzer, 1992: 82) obyek studi sosiologi yang konkrit-realitis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Pokok persoalan menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan factor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam factor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkahlaku. Teori- teori yang termasuk dalam paradigma perilaku social adalah behavioral sociology, dan teori exchange.

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi social karena sesuai dengan focus permasalahan penelitian yaitu wacana politik di kalangan perempuan. Studi ini memusatkan perhatian pada aksi dan interaksi social yang ditelorkan oleh proses berpikir.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah metode penelitian kualitatif, dimana prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistic (utuh) (Bogdan dan Taylor 1975: 5).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh informasi yang mendalam mengenai wacana politik di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya.

1.5.2 Isu-Isu Yang Dikaji

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang terdapat pada focus permasalahan :

1.5.2.1 Wacana

Istilah wacana menurut Foucoult diterjemahkan dari kata *discourse*. Secara luas digunakan dalam kategori dan analisa social untuk merujuk berbagai cara menstrukturkan pengetahuan (*knowledge*) dan praktik social (*social Practice*). Foucoult tidak hanya memfokuskan pada manusia dan apa yang mereka katakan, lebih jauh Foucoult membahas tentang diskursus secara praktik.

Seperti yang diungkapkan oleh Fairlough wacana termanifestasikan melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan symbol lainnya.

Wacana dalam penelitian ini, merupakan wacana yang diperoleh melalui pengetahuan dan praktik social dari perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya.

1.5.2.2 Politik

Dari berbagai kepustakaan ilmu politik ada 3 cara yang digunakan untuk menjelaskan pengertian politik. *Pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Dalam hal ini, **Paul Conn** menganggap konflik sebagai esensi politik. *Kedua*, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Dalam kaitan ini, **Harold Lasswell** merumuskan politik sebagai “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. *Ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik (**Ramlan Surbakti**, 1992: 1).

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang

diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Konteks penelitian ini merujuk pada wacana politik di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya.

1.5.2.3 Kuota Perempuan

Kuota adalah penetapan sejumlah tertentu atau persentase dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite, atau suatu pemerintah (MB Wijaksana, 2004: 8). Kuota 30% perempuan tercantum dalam pasal 65 undang-undang Pemilu “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Ani Widayanti, 2005 : 175). Ide dasar dari kuota adalah memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik, sekaligus perempuan tidak akan menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi. Pelaksanaan kuota dilakukan melalui cara penetapan dalam konstitusi, peraturan-peraturan dalam undang-undang Pemilu atau partai politik, dan komitmen informal partai politik.

Berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui wacana kuota 30% perempuan di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya.

1.5.2.4 Pilkada

Pilkada adalah salah satu factor yang mampu memajukan daerah dengan mengelola potensi-potensi yang tersedia di daerah, sebab selama ini dengan pengelolaan yang terpusat kurang mampu diberdayakan secara optimal. Konteks penelitian ini berkaitan dengan bagaimana wacana Pilkada di kalangan perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya mengenai Pilkada.

1.5.2.5 Partisipasi Politik

Rambu-rambu untuk memahami partisipasi politik yaitu, *pertama* kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *Kedua*, partisipasi politik diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (*nonviolence*).

Konteks penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktik social perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik.

1.6 Subyek Penelitian

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang diketahui sebelumnya. Dalam pemilihan subyek ini, mengacu pada **Spradley**, sebagaimana **Feisal** (1989) didasarkan atas pertimbangan : *pertama*, mereka menguasai dan memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tapi juga dihayati, *kedua* mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti, *ketiga* mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu memadai untuk dimintai informasi, *keempat* mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi dari kemasannya sendiri.

Individu yang dijadikan subyek penelitian adalah mereka yang akrab dengan dunia politik yang dalam hal ini duduk di lembaga legislative DPRD Kota Surabaya, dan mereka yang terlibat di partai, baik di tingkat daerah, tingkat cabang, maupun tingkat ranting Partai Keadilan Surabaya. Mereka dijadikan subyek penelitian karena sesuai dengan kebutuhan penggalian data.

Untuk memperoleh informasi yang komparatif dan kontrasitif, peneliti menjadikan individu yang tidak berada pada pusat fenomena tetapi tetangga-tetangganya, pada orang-orang yang tidak lagi terlibat secara aktif pada dunia politik. Factor setting social seperti usia, keluarga, ekonomi, pendidikan, juga menjadi dasar pemilihan subyek penelitian.

1.7 Strategi Pengumpulan Data

Menurut **Lofland** (1984: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Data utama diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) terhadap subyek yang telah dipilih.

Selain data utama, peneliti juga mencari sumber-sumber data lain yang akan dijadikan data tambahan. Misalnya : sumber buku, koran, majalah, internet, dan lain-lain

1.8 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana yang merujuk berbagai cara menstrukturkan pengetahuan dan praktis social. Data yang telah terkumpul, diolah dan diklasifikasikan menurut tema yang relevan dari tema yang umum kemudian diklasifikasikan ke tema yang spesifik. Tahap selanjutnya mengaitkan data tersebut dengan teori dan realitas lainnya.

Analisis kualitatif menggunakan kata-kata. Menurut **Miles dan Haberman** (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Atau dengan kata lain reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian

rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini berlangsung terus –menerus selama penelitian berlangsung.

Alur penting yang *kedua* dari kegiatan analisis adalah penyajian data. **Miles** dan **Huberman** (1992:17) memberikan definisi penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kegiatan analisis *ketiga* yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Meminjam istilah **Miles** dan **Huberman** (1992:19) penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Sedangkan verifikasi suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan serta upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB II

SETTING LOKASI DAN GAMBARAN UMUM PENELITIAN

II. 1 Surabaya Kota Pekerja

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua dan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Surabaya merupakan salah satu kota tertua di Indonesia (712 tahun). Julukan yang paling terkenal adalah Kota Pahlawan karena keberanian *arek-arek Surabaya* dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan pada akhir Perang Dunia II. Selain itu, Surabaya adalah kota budaya, pendidikan, pariwisata, maritime, industri dan perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Surabaya memiliki multi-etnis, perguruan-perguruan tinggi terkemuka, obyek-obyek pariwisata yang menarik, pelabuhan laut, pangkalan armada TNI-AL, Akademi Angkatan Laut (AAL), kawasan industri dan pusat-pusat perbelanjaan.

Deskripsi menarik tentang karakter Kota Surabaya ditulis oleh **Macmillan** (1926) dalam sebuah buku direktori perdagangan Asia.

"Batavia adalah kota yang matang dan bermartabat, sedangkan Surabaya adalah kota yang masih muda yang sedang dibangun. Bila Batavia adalah sebuah rumah, Surabaya adalah sebuah pasar dan pabrik. Kidung Surabaya adalah kidung para pekerja. Tak ada lagi tempat yang lebih ramai yang dapat ditemukan di sebelah timur Terusan Suez. Sepanjang hari jalanan penuh sesak, selalu bising, dan malam pun tak pernah sepi..."

Awal abad ke-20 Surabaya memang dikenal sebagai pelabuhan tersibuk dan kota terbesar di seluruh wilayah koloni Hindia Belanda. Surabaya telah

tumbuh menjadi salah satu kota pelabuhan dagang penting di Asia, sejajar dengan Kalkuta, Rangoon, Singapura, Bangkok, Hongkong, dan Shanghai¹¹.

Mengenai sejarah modern Indonesia, terutama di Jawa, menurut Howard W Dick, dalam sebuah buku : *Surabaya, City of Work, A Socioeconomic History* (2003)¹² sebenarnya dapat dibaca lewat kisah dua kota besar Indonesia: Jakarta (Batavia) dan Surabaya. Surabaya sendiri menjadi special karena cerita yang tercatat adalah kisah pergulatan sebuah kota menghadapi dua medan sekaligus : pasar internasional yang sangat dinamis dan gejolak kekuasaan politik nasional.

II.2 Perkembangan struktur kota

Penggunaan lahan (*land use*) pada hakikatnya adalah perwujudan fisik dari perubahan ekonomi dan sosial. Setiap terjadi pertumbuhan dan gejolak ekonomi dan sosial akan terekam dalam perubahan penggunaan lahan kota. Pola perubahan lahan yang terus-menerus pada akhirnya akan mempengaruhi struktur kota secara keseluruhan. Dick membagi sejarah perkembangan struktur kota Surabaya menjadi empat tahapan: tahap *pertama*, kota pra-modern sebelum 1830-an yang masih dikelilingi oleh benteng kota; tahap *kedua* tahun 1830-1942, terbentuknya struktur kota modern dan munculnya fenomena sub urbanisasi; tahap ketiga tahun 1942-1970, ditandai dengan mundurnya pusat kota kolonial dan menyebarnya permukiman kampung; tahap *keempat* mulai 1970-sekarang, ditandai membesarnya ukuran dan skala kota akibat dominasi pembangunan infrastruktur dan permukiman skala besar (kota baru) di pinggir kota.

¹¹ www.kompas.co.id

¹² Dick adalah ahli sejarah ekonomi Asia Tenggara dari The Australian Centre of International Business, University of Melbourne, Australia.

Pembentukan struktur kota modern ditandai dengan keputusan untuk meruntuhkan tembok kota pada tahun 1871 dengan alasan demi kesehatan lingkungan dan kebutuhan ruang kota yang lebih luas sebagai akibat peningkatan pesat aktivitas ekonomi. Ekspansi ruang kota berlangsung ke arah bagian selatan di sepanjang Kalimas, di mana saat itu merupakan jalur transportasi penting yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan di pinggiran kota ke pusat kota. Dibukanya terusan Suez (1875) dan lonjakan industri gula dunia mempercepat pembentukan kota modern. Pada tahun 1890 dibangun 20 kilometer jalur trem uap yang menghubungkan kota lama di utara dengan pemukiman dan kawasan industri baru di selatan. Pada tahun yang sama otomobil masuk ke Surabaya. Memasuki abad ke-20 Surabaya telah berubah drastis menjadi sebuah kota modern yang makmur, dipenuhi perkantoran kelas menengah, hotel-hotel mewah, mobil, pusat perbelanjaan yang *prestisius*, dan dikelilingi oleh perumahan-perumahan mewah dengan konsep kota taman (*garden suburbs*). Bahkan Gubernur Oost Java pada masa itu membanggakan Surabaya sebagai *the most modern city in the Indies*.

Pada sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi menarik banyak pendatang dari desa-desa sekitar Surabaya dan tinggal berjubel di perkampungan. Sayangnya Dick tidak cukup dalam membahas fenomena ini. Sebagai perbandingan, Santoso (1984) pernah menuliskan bahwa akibat pengembangan kota formal tidak menyentuh perkampungan, maka muncullah sebuah dualisme ruang kota yang bersifat sosial-politis antara area yang dihuni orang Eropa (*behouwde kom* di bawah teritori *stadgemeente*) dan perkampungan penduduk asli (*niet-behouwde*

kom sebagai *inlaandse gemeente*). Dualisme ini yang menyebabkan perkampungan selalu menjadi korban dalam kebijakan peremajaan kawasan dan pemekaran kota. Lebih dari itu, dualisme ini menjadi masalah laten dalam pengembangan kota hingga saat ini.

Akan tetapi, kejayaan ekonomi Surabaya tidak cukup lama bersinar. Depresi ekonomi yang melanda dunia tahun 1930-an memberi pengaruh negatif bagi Surabaya, bahkan terberat bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Hindia Belanda. Seluruh sendi kehidupan kota menjadi terpuruk. Kuantitas ekspor gula melalui pelabuhan Surabaya seakan terjun bebas, dari 1,2 juta ton pada tahun 1928-1929 menjadi hanya kurang dari 0,4 juta ton pada tahun 1936. Kondisi ini membawa efek ganda ke sektor perekonomian lain, seperti: penurunan permintaan transportasi dan pergudangan, mengurangi aktivitas industri berat yang sebelumnya memasok kegiatan pabrik-pabrik gula. Muara dari keterpurukan ekonomi adalah kontraksi penghasilan dan konsumsi masyarakat secara menyeluruh, dan angka pengangguran melonjak tajam.

Episode 1930-an telah memberi sebuah pengalaman pertama keterkaitan dan ketergantungan ekonomi lokal dan dunia, jauh sebelum masalah globalisasi ekonomi merebak sekarang ini. Dimulai dengan pengaruh pembukaan terusan Suez yang membuka jalan integrasi ke pasar dunia, depresi ekonomi dunia juga mengakibatkan Surabaya lebih cepat terpuruk dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Tahun 1936, sebagai upaya mengatasi kemunduran ekonomi, pemerintah kolonial Belanda gencar mempromosikan Surabaya sebagai kota industri. Sebuah

pamflet, *Soerabaia and the Oosthoek: There Lies a Future for Your Business*, menawarkan berbagai fasilitas yang ada di Surabaya, seperti pelabuhan dagang yang besar, pasar lokal yang menjanjikan, dan kemudahan penyediaan lahan untuk industri. Beberapa pabrik baru mulai dibangun, seperti lampu neon (*Philips*), minyak goreng dan sabun (*Philippine Manufacturing Corp*), perakitan mobil (*Dodge-NV Velodrome*), dan sandal karet (*Rubberfabriek Waroe*).

Berbeda dengan masa sebelum depresi, pembukaan pabrik-pabrik baru tersebut tidak lagi berorientasi pada kepentingan ekspor, tapi lebih berorientasi pada pasar domestik. Setelah kejayaan industri gula redup, hubungan Surabaya dengan ekonomi dunia mencapai titik terendahnya. Sebagai perbandingan, pada masa yang sama, Jakarta dan Jawa Barat masih bisa bertahan di pasar dunia lewat produksi perkebunan karet dan teh. Tapi selain pergeseran trend ekonomi dunia, ada hal lain yang merisaukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni membanjirnya barang-barang murah produk Jepang di pasar lokal. Pada tahun 1934 tercatat sepertiga dari seluruh barang impor yang masuk ke Hindia Belanda berasal dari Jepang. Untuk bersaing dengan produk Jepang, pemerintah kolonial harus mendorong tumbuhnya industri yang berorientasi kebutuhan domestik. Surabaya kembali dilirik oleh banyak investor karena kesiapan infrastruktur dan institusi ekonomi modern peninggalan masa sebelumnya. Demikian juga posisi Pelabuhan Tanjung Perak yang akan berperan besar dalam faktor distribusi barang, terutama ke wilayah Timur Hindia Belanda.

Pada 3 Februari 1942 bom pertama Jepang menghantam Surabaya. Satu bulan berikutnya, 6 Maret, tentara Jepang mendarat di Wonokromo. Beruntung

tidak banyak kerusakan di sektor industri. Dua minggu setelah menguasai kota, sebagian besar pabrik kembali beroperasi di bawah supervisi militer Jepang. Tapi, jenis produksi lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan perang, seperti industri tekstil, baja, dan galangan kapal. Melihat potensi Surabaya sebagai pusat industri, militer Jepang terdorong menyusun rencana besar untuk membuka perkebunan kapas di bekas lahan-lahan perkebunan gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Belum sempat terlaksana, Jepang harus menyerahkan kembali Surabaya kepada tentara Sekutu pada akhir 1945.

Antara 1945-1949 tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang mencoba kembali berkuasa di Indonesia. Infrastruktur vital yang selama ini menjadi andalan Surabaya sebagai kota industri, seperti pelabuhan dan pembangkit listrik, belum kembali pulih. Sebagian kerusakan akibat pertempuran tahun 1945, tapi sebagian lagi akibat terputusnya hubungan dengan wilayah-wilayah pinggiran kota yang dikuasai oleh pejuang republik. Sebagai gambaran, sebelum perang produksi energi mencapai 14.000 KW, tapi se usai perang produksi menurun drastis hingga sekitar 2.000 KW.

Setelah pengakuan kemerdekaan tahun 1949, pertumbuhan ekonomi Surabaya dipicu kembali dengan pembangunan beberapa pabrik baru di daerah-daerah penyangga (*hinterland*) seputar Surabaya. Di Gresik dibangun pabrik semen, caustic soda, dan karung goni. Bahkan pabrik semen Gresik merupakan proyek investasi terbesar di Indonesia awal pasca kemerdekaan. Proyek ini menyerap 14 juta dollar dari total kredit pinjaman 100 juta dollar yang diterima Bank Ekspor-Impor dari Amerika Serikat. Beberapa investor asing juga mulai

kembali beroperasi. Pemulihan ekonomi kota lagi-lagi terhadang oleh keluarnya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tahun 1960-an.

Di sisi lain, arus migrasi spontan terus berlanjut setelah masa kemerdekaan. Dari sekitar 600.000 jiwa pada 1949, populasi Surabaya diperkirakan berlipat mendekati satu juta jiwa pada 1956. Untuk bertahan hidup mereka menempati lahan-lahan kosong di sekitar infrastruktur publik, seperti bantaran kanal dan rel kereta api. Wajah kota Surabaya kembali menjadi kumuh.

II.3 Membangun kota industri

Peralihan kekuasaan politik ke Orde Baru pada akhir 1960-an membawa angin perubahan. Ada dua hal pokok yang harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya pada awal 1970-an. Pertama adalah mencoba menangani pemekaran kota dan juga mengintegrasikan kawasan-kawasan industri baru, baik yang di dalam kota maupun di wilayah tetangga, seperti Gresik dan Sidoarjo, ke dalam sebuah rencana induk kota (*master plan*). Kedua, untuk menangani perkampungan yang disinyalir masih terdapat sisa pengaruh komunisme, pemerintah kota mengusung dua program yang berlawanan: peremajaan kawasan lewat pengusuran dan perbaikan kampung (KIP).

Awal 1990-an dilakukan revisi master plan untuk mengakomodasi perkembangan kota terakhir. Konsep koridor-koridor pengembangan diperluas dengan konsep jalan lingkar (*ring road*) terkait dengan rencana pembangunan jembatan Surabaya-Madura. Revisi juga untuk mengantisipasi (sekaligus mengendalikan) ledakan proyek-proyek real estate berskala sangat besar (*very large scale projects*) di pinggir kota. Sekitar delapan developer besar dari Jakarta

tercatat menguasai lahan sekitar 6.300 hektar. Berbagai konflik kepentingan mulai muncul, terutama berkaitan dengan keinginan developer mengubah rencana peruntukan lahan pertanian produktif atau area konservasi alam menjadi lahan perumahan.

Pada periode yang sama, terjadi juga perubahan besar di pusat kota. Kawasan Jembatan Merah dan Tunjungan disulap kembali (*redevelopment*) menjadi kawasan pertokoan modern dan mewah. Modus yang digunakan mirip dengan proyek sejenis di Jakarta, mengalihfungsikan lahan-lahan milik pemerintah atau militer yang terletak di lokasi strategis. Atau menggusur kawasan perkampungan yang dianggap ilegal atas nama optimalisasi nilai lahan pusat kota.

Pemusatan kekuasaan politik di Jakarta, di mana seluruh kebijakan investasi asing hanya bisa diputuskan oleh petinggi Jakarta, menyebabkan turunnya daya tarik Surabaya bagi investor asing. Akses ke birokrasi pusat menjadi pertimbangan utama dalam melakukan investasi. Antara 1967-1978 tercatat 43 persen investasi asing nonminyak diserap oleh Jakarta dan Jawa Barat, dan hanya lima persen yang ditanamkan di Jawa Timur.

Hingga 1986 industrialisasi di Surabaya dan sekitarnya lebih banyak dipicu oleh investasi domestik. Peningkatan kapasitas PLTU (Pembangkit Listrik, Tenaga Uap) Tanjung Perak dari 50 MW menjadi 150 MW telah mendongkrak kapasitas produksi Semen Gresik berlipat tiga dan pendirian pabrik Petrokimia. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga banyak tertolong oleh keberhasilan Revolusi Hijau di Jawa Timur pada awal 1970-an, khususnya program intensifikasi tanaman padi. Program ini telah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi pedesaan yang pada akhirnya membuka lebar pasar domestik untuk kalangan produsen barang-barang konsumsi (*consumer goods*).

Seperti mengulang model pertengahan 1930-an, pembangunan Kawasan Industri Rungkut tahun 1975 memosisikan Surabaya kembali sebagai kota industri yang berorientasi pada produk substitusi impor dan pasar domestik. Dalam waktu sepuluh tahun, kawasan industri seluas 245 hektar terisi penuh dan menampung sekitar 26.000 pekerja. Penemuan ladang gas di lepas pantai timur pulau Madura pada pertengahan 1990-an memicu masuknya investor asing ke pengembangan industri berat di Jawa Timur, khususnya industri petrokimia. Pada tahun 1994, untuk pertama kali Jawa Timur menempati peringkat pertama dalam tingkat investasi asing di Indonesia.

Dikaitkan dengan krisis energi belakangan ini, keputusan untuk melayani kepentingan domestik sepertinya menjadi berkah yang tersembunyi (*blessing in disguise*) bagi kota Surabaya. Tentu akan lain ceritanya bila produksi gas Madura pada saat itu diperkirakan cukup untuk kepentingan ekspor.

II.4 Siklus hidup kota

Terhadap pendekatan pembangunan kota pada masa Orde Baru, Dick mencatat terjadinya pengulangan pendekatan pada zaman kolonial Belanda seperti sebuah siklus yang memutar balik. Cara pembebasan lahan saat real estate boom baik pada 1890-an dan 1980-an relatif sama. Lewat koalisi elite antara pejabat publik dan developer, sering kali atas nama kemajuan kota, mereka dapat menguasai dengan murah tanah-tanah milik petani dan penghuni perkampungan. Walau sudah merdeka, dualisme ruang kota produk kolonial (*bebouwde kom* dan

niet bebouwde kom) masih saja terendap di bawah sadar mereka. Demikian juga konsep pembangunan perumahan-perumahan baru, tetap saja dirancang terpisah dari kenyataan sehari-hari. Mereka tetap memandang penghuni kampung sebagai sosok yang asing dan susah diatur. Alih-alih yang diproduksi tetap perumahan terpisah dari lanskap kota yang nyata, yang bakal memicu kesenjangan sosial yang makin tajam.

II.5 Kehidupan Politik

Era reformasi yang terjadi sejak lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 disambut dengan euphoria politik yang gegap gempita dan meluas. Efek yang paling terasa dari euphoria reformasi ini adalah proses pertumbuhan partai politik yang sangat cepat.

Dalam kurun waktu dari sepuluh bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari 1999), jumlah partai politik yang berdiri mencapai 181 buah. Artinya dalam masa itu setiap bulan berdiri sekitar 18 partai baru, atau setiap pekan berdiri 4-5 partai baru¹³. Disamping itu, banyak contoh lain yang menggambarkan bagaimana kehidupan politik itu saat itu dipenuhi dengan euphoria reformasi. Beberapa diantaranya adalah; munculnya aksi-aksi massa yang sangat banyak yang menyuarakan berbagai kepentingan yang selama ini tersumbat, dibebaskannya tahanan-tahanan politik di masa Orde Baru, berkembangnya kebebasan pers yang sangat luar biasa.

Di sisi lain, sosok mahasiswa tampil secara massif sebagai pelopor perlawanan di baris depan. Fenomena ini, terjadi akibat ditertibkannya

¹³ Danamik, Ali, Said. *Fenomena Partai Keadilan*, Jakarta : Teraju, 2002

mahasiswa oleh orde baru sejak 1978. Basis perlawanan digeser dari kampus ke tempat kos, rumah petani, dan kontrakan buruh.

Hangar bingar perpolitikan di era reformasi, juga sangat terasa dan terlihat di Surabaya. Misalnya aksi mahasiswa menuntut turunya Soeharto mulai marak. Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS) yang dilahirkan oleh beberapa aktivis mahasiswa dari berbagai kampus pada tahun 1989 bersamaan dengan menjamurnya gerakan mahasiswa di beberapa kota lainnya, mengadakan aksi besar dengan nama Suara Rakyat Surabaya menduduki Graha. Aksi tersebut mengeluarkan Maklumat Rakyat Surabaya menuntut semua DATI I mengeluarkan maklumat serupa. Pada aksi berikutnya namanya berubah menjadi Sidang Rakyat Surabaya.

Ada hal yang cukup menarik mengenai gerakan mahasiswa di era reformasi. Munculnya sekelompok anak-anak muda yang “unik” penuh semangat dan seolah hidup di dunia yang berbeda sama sekali. Ekspresi yang ditampilkan oleh mereka saat itu pun terasa berbeda. Kaum wanitanya menutup seluruh bagian tubuhnya dan hanya menyisakan sedikit di bagian muka dan telapak tangan. Sementara, kaum laki-lakinya membiarkan jenggotnya tumbuh menjumbai di dagu.

Anak-anak muda ini di kemudian hari mampu mendudukkan wakilnya di DPR RI sebanyak 7 orang, dan partai yang didirikannya yaitu Partai Keadilan (PK) mampu menjadi partai 7 besar partai pemenang pemilu dengan mengumpulkan suara sebanyak 1,36%.

Dalam pemilu tahun 2004, Partai Keadilan juga menjadi salah satu peserta pemilu. Namun Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena aturan ET. Kehadiran partai ini seakan membawa energi baru bagi partai islam formal yang selama ini mengalami kemandekan. Menurut **Dr. Greg Fealy**¹⁴ PKS menawarkan pendekatan baru yang berbeda dalam politik islam yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia.

Pertama, tidak seperti partai-partai islam yang lain, PKS mengambil sumber inspirasi ideology dan organisasi utamanya dari luar dan menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan. *Kedua*, PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. *Ketiga*, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan social yang luas dan efektif. *Keempat*, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan public sebagai program utama politik.

Keberadaan PKS menjadi catatan tersendiri bagi perkembangan politik di Surabaya khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Partai yang saat ini memiliki 31 DPC (Dewan Pimpinan Cabang)¹⁵ ini, memiliki satu bidang yang secara khusus berhubungan dengan perempuan, yakni bidang kewanitaan. Pemberdayaan perempuan, jaringan lembaga perempuan, dan pembinaan keluarga menjadi program unggulan bidang kewanitaan.

Beragamnya partai politik yang tumbuh di kota Surabaya, membuka peluang yang cukup besar bagi orang untuk berpartisipasi politik tak terkecuali

¹⁴ Research Fellow and Lecturer in Indonesian Politics The Australian National University, Canberra

¹⁵ Wawancara dengan Dwi Sulistyorini, Surabaya 24 Oktober 2005

perempuan. Dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 24 partai ikut menjadi peserta Pemilu di kota Surabaya¹⁶.

Dalam pernyataan visi dan misi pemerintahan kota Surabaya¹⁷ saat ini, salah satu misi yang akan diwujudkan adalah mewujudkan tatanan politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, peran serta public, pemberdayaan public dan gender menuju terciptanya rasa aman bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan didukung oleh penegakan hukum.

II.6 Partai Keadilan Sejahtera

Pada bagian ini hanya akan dipaparkan bidang kewanitaan DPD PKS Surabaya. Karena bidang inilah yang langsung berhubungan dengan perempuan.

II.6.1 Profil Bidang Kewanitaan DPD Partai Keadilan Sejahtera Surabaya.

II.6.1.1 Visi

Tampilnya kader wanita Partai Keadilan Sejahtera sebagai pelopor penegakkan system islam dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

II.6.1.2 Misi

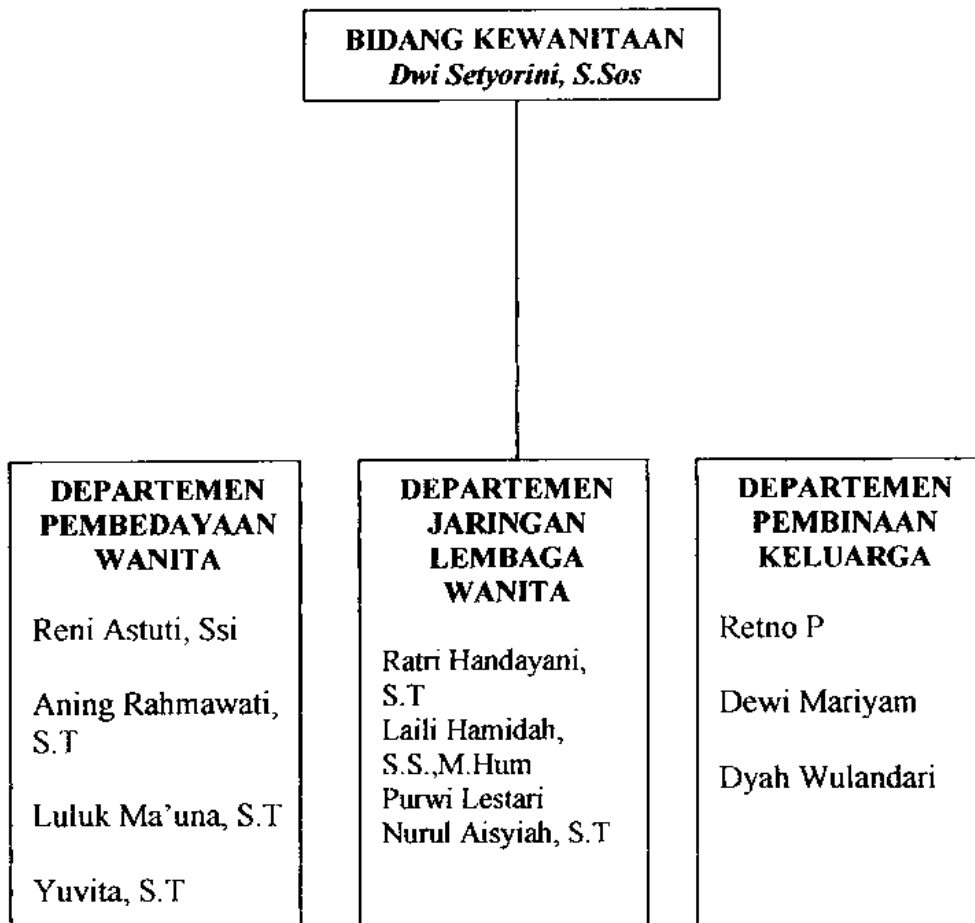
1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabatnya.
2. Membangun system yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

¹⁶ www.tokohindonesia.com

¹⁷ www.surabaya.go.id

3. Meningkatkan kompetensi kader wanita di lembaga-lembaga strategis.
4. Memberikan perhatian dan penyikapan secara proporsional terhadap isu-isu kontemporer wanita dan keluarga.
5. Mengupayakan terbentuknya generasi penerus yang bertaqwa, sehat, cerdas emosi, dan intelektualnya.
6. Mewujudkan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.
7. Mengembangkan lembaga-lembaga wanita sebagai pendukung da'wah.

II.6.1.3 Struktur Bidang Kewanitaan



1. Bagian Pemberdayaan Wanita

Visi

Optimalisasi potensi dan peran wanita dalam membangun masyarakat islami.

Misi

1. Mengoptimalkan potensi wanita dengan tetap memelihara harkat dan martabatnya.
2. Meningkatkan kompetensi wanita di lembaga-lembaga strategis.
3. Memberdayakan peran politik wanita.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Menyusun dan menyelenggarakan paket-paket pelatihan, peningkatan wawasan, ketrampilan, dan kompetensi kader wanita.
2. Mengoptimalkan peran wanita melalui peningkatan kualitas dan pemungisian *kafaah*.
3. Memberikan perhatian dan penyikapan secara proposional terhadap isu-isu kontemporer wanita.
4. Membangun wacana politik islami bagi wanita.
5. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak wanita

Program Kerja

1. Pemberdayaan Wanita Keadilan

Tujuan : membentuk *mubalighoh*

Sasaran : internal kader

Latar belakang : proses transfer nilai tidak bisa menafikan sisi *da'awiyah*, sehingga fenomena kurangnya *mua'jib* atau *balighogh* di tingkat bawah atau masyarakat akan diupayakan oleh PK-Sejahtera.

2. Perawatan Jenazah.

Tujuan : peningkatan kualitas *dinniyah* internal kader

Latar belakang : masih sedikitnya sisi-sisi keilmiah yang bisa dimunculkan oleh perempuan PKS. Sehingga program ini diharapkan akan difasilitasi oleh LSM.

3. Ta'lim Kader

Tujuan : pemberian *tsaqofah* (pengetahuan) politik bagi kader.

Latar belakang : kader perempuan PKS yang tidak hanya sekedar mempunyai bekal *dinniyah*, tetapi lebih pada sisi kewanitaanya. Missal : bidang politik, social.

Sasaran : internal kader.

4. Peduli kesehatan perempuan

Tujuan : memberikan perhatian atau kepedulian perawatan kesehatan kader, termasuk didalamnya pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Sasaran : eksternal.

2. Bagian Pemberdayaan Keluarga

Visi

Mewujudkan keluarga yang kokoh sebagai basis penegakkan nilai-nilai islam di masyarakat.

Misi

1. Menyiapkan kader partai untuk memasuki rumah tangga islami.
2. Membentuk paradigma kader tentang keluarga da'wah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan keluarga dalam kehidupan berbangsa dan berkeluarga.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Menyiapkan kader partai untuk memasuki rumah tangga islami.
2. Membangun paradigma keluarga da'wah di kalangan kader.
3. Meningkatkan peran orang tua dalam menyiapkan generasi pewaris bangsa.
4. Menjadikan anak-anak kader sebagai generasi yang aktif dalam proses perubahan masyarakat yang islami.
5. Membangun komunikasi dan kerjasama suami istri sebagai upaya mengokohkan keharmonisan dan ketahanan keluarga.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program Kerja

1. Kajian pra nikah

Tujuan. Menyiapkan keluarga yang kokoh. Memberikan wacana bagi kader yang masih lajang tentang bagaimana islam memandang *ghorizah* (naluri manusia), proses pernikahan yang islami, teknik menikah (*khitbah*).

Sasaran : internal kader.

2. Dauroh Samaro (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Tujuan : menjaga *hamasah* (semangat) kader.

Sasaran : kader yang sudah berkeluarga.

3. Kajian tarbiyatul aulad

Tujuan : keluarga sebagai sarana pendidikan anak.

3. Bagian Jaringan Lembaga Wanita

Visi

Mengupayakan terwujudnya optimalisasi dan sinergi peran lembaga-lembaga muslimah sebagai perangkat pendukung dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan da'wah partai.

Misi

1. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga-lembaga muslimah sebagai pendukung da'wah
2. Mengupayakan sinergisitas fungsi dan peran lembaga-lembaga muslimah dalam rangka mewujudkan tujuan da'wah.

3. Membangun silaturahmi dan kerjasama yang sehat dan konstruktif dengan berbagai institusi strategis.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Menyelenggarakan paket-paket pelatihan dan pengembangan lembaga wanita.
2. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga wanita (internal) sebagai pendukung da'wah.
3. Membangun komunikasi, silaturahmi dan kerjasama dengan tokoh, lembaga dan elemen-elemen strategis.
4. Memfasilitasi terbentuknya network antar lembaga wanita.

Program Kerja

1. Penataan dan pengembangan lembaga atau network.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lembaga-lembaga yang telah ada, membangun system koordinasi antar lembaga-lembaga internal, membangun network dengan lembaga lain.

Latar belakang : semakin kompleksnya permasalahan di masyarakat sehingga diperlukan adanya kerjasama antar lembaga-lembaga perempuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Pengokohan majelis ta'lim.

Tujuan : mengembangkan fungsi majelis ta'lim yang sudah terbentuk.

Latar belakang : belum berfungsinya majelis ta'lim sebagai tempat pelayanan kebutuhan masyarakat. Misal : fungsi pendidikan, fasilitas kesehatan.

3. Melakukan jejaring eksternal.

Tujuan : silaturahmi ke tokoh, institusi, lembaga perempuan.

II.6.2 Platform Partai Keadilan Sejahtera Untuk Pembangunan

Wanita Indonesia Seutuhnya

"Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencegah dari yang munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rosulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. At Taubah: 71)

Statement Allah SWT dalam surat Taubah 71 diatas merupakan filosofi dasar Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan pemberdayaan wanita (*women empowerment*). Dalam pandangan PK-Sejahtera, kaum wanita memiliki peran dan tanggung jawab yang terbingkai dalam kerangka sebagai berikut :

1. Kaum Wanita merupakan mitra hidup kaum laki-laki yang harus bekerja sama secara harmonis dan saling mengokohkan.
2. Kerjasama yang dimaksud harus ditujukan dalam kerangka menegakkan *ammar ma'ruf nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya.

3. Kerjasama harus berbeda di atas landasan ketaqwaan yang diindikasikan dengan penunaian hak *'ubudiyah* kepada Allah SWT maupun hak muamalah kepada manusia.

Berangkat dari filosofi tersebut, menjadi sebuah konsekwensi logis bagi PK-Sejahtera untuk memperjuangkan agar kaum wanita Indonesia dapat memiliki semua kriteria atau kualifikasi yang dapat mengantarkan pada optimalisasi tanggung jawabnya baik sebagai individu, dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Kualifikasi yang dimaksudkan adalah : bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.

Permasalahan yang menimpa wanita Indonesia saat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari krisis multidimensional yang berakar dari akumulasi krisis moralitas yang menimpa bangsa Indonesia dan mendapatkan momentum dengan meletusnya krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis ini telah memporak-porandakan tatanan kemasyarakatan yang ada dan melahirkan berbagai penyakit sosial yang tidak sederhana mencari jalan keluarnya. Pada saat yang sama krisis tersebut bertemu perhatian dunia terhadap kondisi kaum wanita di negara-negara ke-3. Maka secara serentak mengemuka isu terkait dengan ketidakberdayaan wanita, seperti isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kekerasan terhadap wanita, wanita dan akses ekonomi, wanita dalam pengambilan kebijakan publik, wanita dan konflik bersenjata serta isu-isu kewanitaan yang lain.

Di sektor pendidikan meski tidak tampak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk memperoleh pendidikan dasar, namun angka buta huruf wanita masih lebih banyak daripada pria.

Permasalahan lain yang mendesak untuk dicermati adalah kekerasan terhadap wanita, pelecehan seksual dan perkosaan yang meningkat setiap tahunnya. Tercatat angka perkosaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 1997 299 kasus, tahun 1998 338 kasus, dan tahun 1999 488 kasus. Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengalami peningkatan. Permasalahan serius lainnya adalah terjadinya kekerasan di berbagai wilayah konflik seperti di Aceh, Poso, Maluku, Kalimantan Barat dan lain-lain. Konflik ini menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian yang sebagian besar terdiri dari wanita dan anak-anak.

Mencari solusi bagi permasalahan yang begitu kompleks bukanlah perkara ringan. Menjadi komitmen PK-Sejahtera untuk terlibat secara aktif dalam hal ini mengingat PK-Sejahtera telah dipilih oleh lebih dari 54%¹⁸ konstituen wanita dan menjadi partai yang memiliki kader, simpatisan, maupun pengurus wanita yang cukup signifikan.

PK-Sejahtera akan berupaya untuk mengefektifkan sistem yang ada dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat bekerja lebih baik dalam mewujudkan pemberdayaan wanita. Di samping itu perlu digalang kebersamaan partai politik, organisasi masa dan lembaga

¹⁸ Kiprah Politik Perempuan PK-Sejahtera. Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat PKS. Hal.11

swadaya masyarakat untuk isu yang sama. Di sisi lain, media massa merupakan perangkat yang akan mempercepat sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait, oleh karenanya harus ada jaminan agar berada pada *mainstream* yang sama pula.

Dalam hal ini PK-Sejahtera akan memegang komitmen tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu *core* perjuangan PK-sejahtera bagi wanita Indonesia. Langkah strategis yang akan ditempuh PK-Sejahtera dalam mengentaskan permasalahan wanita Indonesia :

A. Mewujudkan Wanita Indonesia yang Bertaqwa.

Ketaqwaan harus menjadi ruh dalam diri wanita Indonesia karena nilai-nilai ketaqwaan merupakan jaminan bagi kebahagiaan lahir dan batin. Perjalanan bangsa-bangsa di dunia yang mengesampingkan nilai-nilai agama dan moralitas telah memperkuat keyakinan PK-Sejahtera bahwa kemajuan materi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai ketaqwaan akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Oleh karenanya harus ada gerakan bersama untuk menjadikan nilai-nilai ketaqwaan sebagai simbol dan ciri kebanggaan wanita Indonesia, untuk itu PK-Sejahtera akan berupaya untuk :

- a. Memperjuangkan hak wanita Indonesia untuk dapat menjalankan syari'at sesuai dengan agamanya.

- b. Memperjuangkan hak wanita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan beragama.
- c. Dukungan dan alokasi dana kegiatan keagamaan bagi wanita Indonesia.

B. Mewujudkan Kehidupan yang Sejahtera bagi Wanita Indonesia.

PK-sejahtera meyakini bahwa tanpa adanya jaminan kesejahteraan bagi warganya, khususnya kalangan wanita upaya untuk meningkatkan kualitas SDM akan mengalami hambatan yang cukup serius. Kaum wanita yang mendapatkan amanah menunaikan peran kodrati yang menjamin kelangsungan hidup generasi harus mendapat kepastian jaminan kesejahteraan, pendidikan, akses kesehatan, dan keselamatan. Untuk itu PK-Sejahtera akan memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia untuk dapat hidup lebih sejahtera melalui :

- a. Peningkatkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin khususnya bagi keluarga janda.
- b. Pemenuhan gizi wanita hamil atau menyusui melalui tunjangan wanita hamil dan menyusui.
- c. Jaminan social bagi ibu melahirkan mengingat AKI di Indonesia masih relative tinggi di Asia.

- d. Upah yang adil bagi wanita sesuai standart profesionalisme.
- e. Mengupayakan jam kerja yang familiar dan ramah wanita bagi pekerja wanita.
- f. Mengupayakan fasilitas umum yang ramah wanita.
- g. Mengupayakan jaminan hukum yang tegas atas pelanggaran harkat dan martabat wanita.
- h. Jaminan social bagi ibu dan anak korban kekerasan oleh negara.

C. Mewujudkan Wanita Indonesia yang Cerdas.

Dalam pandangan PK-Sejahtera hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi kaum wanita harus dibuka seluas-luasnya. Hal ini mengingat berbagai peran wanita menuntut pengetahuan dan skil yang memadai. Untuk itu PK-Sejahtera akan memperluas akses wanita untuk :

- a. Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan intelektualnya baik formal maupun informal.
- b. Memperoleh bantuan dana pendidikan bagi wanita minimal sampai tingkat sekolah menengah atas dan atau yang sederajat.

- c. Pengembangan kurikulum pendidikan yang ramah wanita.
- d. Perbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan perbaikan kesejahteraan pendidik.
- e. Membangun dan membudayakan jiwa enterpreuner wanita melalui pendidikan dan pelatihan wirausaha yang ramah wanita

D. Mewujudkan Wanita Indonesia yang Berdaya.

Partisipasi konstruktif wanita di wilayah public sangat dinantikan masyarakat. Berbagai lapangan menanti peran wanita untuk membangun Indonesia yang sebagai *baldatun thoyibun wa robbun ghafur*. Untuk itu PK-Sejahtera akan mendorong wanita Indonesia agar :

- a. Mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi melalui gagasan dan karya yang konstruktif bagi kemajuan bangsa.
- b. Mampu bersikap kritis pada kebijakan public yang merugikan dan mengancam kehidupan berbangsa khususnya kalangan wanita.
- c. Meningkatkan peran wanita di lembaga pengambil kebijakan dan memberikan jaminan bagi penyaluran aspirasi atau kepentingan wanita.

- d. Memiliki kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta melakukan pembelaan atas pelanggaran yang ada.
- e. Mampu melakukan penolakan atas upaya-upaya eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- f. Bangga menjalankan profesi sebagai ibu pendidik generasi dan berupaya untuk mendapat pengakuan yang sama dari semua pihak.

E. Mewujudkan Wanita Indonesia yang Berbudaya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tumbuh dengan kultur yang sarat dengan nilai-nilai religi. Wanita Indonesia seharusnya mampu mengembangkan ciri budaya ini dan tidak larut dengan scenario budaya global yang mengkandaskan nilai-nilai keagungan budaya Indonesia. Untuk itu PK-Sejahtera akan mengajak seluruh wanita Indonesia untuk mempertahankan ciri budaya Indonesia melalui :

- a. Meningkatkan kemapuan wanita untuk mengembangkan ciri budaya Indonesia sebagai budaya yang religius.
- b. Mengembangkan atmosfir budaya yang memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat wanita.

- c. Mendorong wanita Indonesia untuk secara aktif menghasilkan karya, kreasi, dan inovasi yang konstruktif.

PK-Sejahtera meyakini bahwa hanya melalui upaya peningkatan kualitas SDM suatu bangsa akan tegak sebagai bangsa yang jaya dan terhormat dan wanita adalah setengah dari sumberdaya tersebut

II.6.3 Peran Muslimah Mengisi Era Siyasah

Peran muslimah mengisi era siyasah¹⁹ diperlukan terutama terkait dengan tantangan yang ada agar dapat merespon dan mengantisipasi perkembangan yang timbul di era baru ini, dimana setiap muslim baik laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran sesuai dengan tugas,

¹⁹ Kata “*siyasah*” berasal dari kata kerja “*sasa*” yang mempunyai dua pola. Yaitu *sasa-yasusu-sausun* dan pola yang kedua adalah *sasa yasusu-siyasatan*. Dalam bahasa Arab akar kata ini bermakna ganda yaitu kerusakan sesuatu dan tabiat atau sifat dasar. Dari makna pertama diperoleh makna leksikal menjadi rusak atau banyak kutu, sedangkan dari makna kedua diperoleh makna memegang kepemimpinan atas masyarakat, menuntun, atau melatih hewan, mengatur atau memelihara urusan. Dalam hadist Rasulullah SAW kata “*siyasah*” dipergunakan setidaknya dua kali. Pertama, ketika Beliau menyebut kepemimpinan atas Banu Israil oleh para nabi. Kedua, ketika Beliau menuntun kudanya dari halaman masjid Nabawi di Madinah.

Pengertian siyasah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain dirumuskan siyasah adalah seni memerintah dan mengelola Negara. Ahli lain menyatakan bahwa siyasah adalah kekuatan (*power*) dan kemampuan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Yang lainnya merumuskan siyasah sebagai seni tawar-menawar (*bargaining*). Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah lebih menekankan arti siyasah dengan upaya perbaikan kehidupan manusia dan penghindaran kerusakan. Selanjutnya dalam Lisan al ‘Arab, kitab kamus bahasa Arab standar, disebutkan kata “*siyasah*” berarti memfungsikan sesuatu kearah yang membuat sesuatu itu baik. Esensi makna ini sejalan dengan apa yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim. Oleh karena makna siyasah berkaitan erat dengan upaya perbaikan dalam kehidupan, maka dalam banyak hal kata siyasah lebih ditekankan kepada pekerjaan para pemimpin yang memang salah satu tugas utamanya melakukan perbaikan dan mengarahkan orang yang dipimpin dan kondisi kehidupannya menjadi baik.

Sedangkan dalam Al Qamus Al Muhith kata “*wasustu al ra’iyata siyasatan*” diartikan sebagai “*saya telah memerintah dan melarangnya*”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) Poerwodarminta kata siyasah atau siyasat diartikan sangat luas, yaitu tindakan kebijaksanaan dan akal untuk mencapai sesuatu maksud.

bidang dan kodratnya masing-masing. Namun hal itu tidaklah cukup, muslimah bahkan harus mampu menciptakan peluang-peluang baru.

Pada era baru ini da'wah islam menuntut para aktivis da'wah khususnya kalangan muslimah untuk memainkan peran sebagai berikut :

1. Peran Fondamentasi (*Daarut ta'sis*)

Di era kebebasan ini siapapun, organisasi apapun, partai apapun memerlukan fondasi, fondamen bagi ideology, keyakinan serta agenda-agenda kerjanya. Perlu adanya fondamen masing-masing pihak : apa yang ditampilkan, diperlihatkan, dan ditawarkan. Fondamen atau landasan ini juga akan sangat menentukan karena akan menjamin kejelasan *al inthilaq wal mauqif*— pangkal bertolak dan bersikap— sehingga memudahkan dalam membangun kerjasama dengan berbagai kalangan. Karena seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an kalimatun *sawaaun bainana wa bainakum*—kalimat yang sama antara kami dan kamu—dimaksudkan bahwa PK-Sejahtera bisa saja mengembangkan kerjasama dengan siapapun. Namun yang harus diingat dalam mengembangkan kerjasama tersebut hendaknya tidak sampai menabrak nilai-nilai dasar tauhid *a'la na'buda ilallah wala nusyriku bihi syai'an wala yattahidza ba'dluna ba'dlon arbaaban min duunillah*—tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan di sisi Allah (QS Ali Imron 64)

2. Peran Edukasi (*Daarut Tarbawi*)

Dalam pergaulan yang terbuka, baik pergaulan politik, ekonomi, social, budaya, muslimah tetap mempunyai peran edukasi (tarbiyah). Tarbiyah yang dimaksud adalah melalui pergaulan, antar aliran politik, ideology, budaya dan dengan semua lapisan masyarakat Indonesia dimana terjadi proses interaktif yang diharapkan dapat terjadi *penyibghohan* (celupan) nilai-nilai islam dengan mitra pergaulan. Dalam pergaulan tersebut, muslimah menularkan nilai-nilai Kitabullah dan Sunnah sehingga terjadi pewarnaan etika pergaulan dengan nilai-nilai islam. Dari cara pergaulan, adab bermuamalah, adab ikhtilaf, etika berkoalisi, apalagi etika syuro yang kesemuanya harus mampu mencerminkan implementasi *kesyumuliyahan* islam. Ada slogan yang mengatakan *Muatsirina laa mutaatsirin*—kita mempengaruhi dan tidak terpengaruhi, jadi harus bergaul bukan menjauhi orang karena takut terpengaruh—

3. Peran Estetika (*Daarut tahsin*)

Penampilan muslimah di masyarakat merupakan cerminan dari wajah, da'wah, dan partai. Kalau muslimah tidak menjaga estetika dan keindahan maka dasanya tidak menampilkan performance terbaik yang dimiliki muslimah. Peran estetika seharusnya menghasilkan refleksi yang mempercantik wajah da'wah, partai serta mempercantik wajah muslimin dan muslimat sekalian yang saat ini seringkali diupayakan berwajah buruk dengan berbagai tuduhan seperti teroris, pengacau keamanan, dan sebagainya. Peran ini refleksinya juga mengarah pada kelembagaan PK-Sejahtera yang berarti muslimah harus berupaya beraktivitas seihisan

mungkin. Performen kelembagaan PK-Sejahtera harus tampil profesional, modern, ihsan. Hal ini karena lahir dari keyakinan bahwa Allah saja telah berbuat ihsan pada kita, maka berihlanlah kita *-Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika ; In ahsantum ahsantumli anfusikum.*

4. Peran Legislasi (*Daarut ta'nis*)

Potensi muslimah kini telah menyebar, baik di lembaga-lembaga yang bersifat departemental artinya bagian structural secara langsung dari partai atau ekstra departemental seperti di yayasan, lembaga, LSM kewanitaan maupun di organisasi profesi. Aktivitas tersebut harus mampu memberikan kontribusi kepada pusat-pusat kekuasaan, melahirkan keputusan-keputusan yang membangun melalui usulan-usulan, tulisan-tulisan dan partisipasi lainnya. Misalnya : dengar pendapat dengan tokoh-tokoh wanita tentang kuota suara untuk wanita. Melalui proses itu muslimah harus mampu mempengaruhi keputusan-keputusan, produk-produk lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Da'wah harus memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap lembaga penyelenggara Negara agar dapat memainkan peran legislasi. LSM, organisasi kewanitaan baik departemental maupun ekstraparlementer harus bisa mengambil andil dalam pengambilan kebijakan umum maupun yang terkait dengan isu kewanitaan.

5. Peran Reposisi

Selama ini islam seringkali mengalami pendiskreditan. Dalam hal berpakaian misalnya kaum muslimat seringkali dituduh macam-macam,

dikatakan misalnya mengganggu pergaulan, mensubordinasikan perempuan, symbol keterbelakangan, dan lain-lain, isu-isu yang sengaja menyudutkan umat islam. Untuk itu memerlukan upaya dan peran reposisi yakni upaya untuk menempatkan posisi islam wal muslimin ke posisi yang diinginkan Allah dan Rosul., yaitu : *Al Islamu ya 'lu walaa ya 'la 'alaihi* – Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya—posisi ini bukanlah refleksi dari kesombongan dan ketakaburan tetapi lebih merupakan refleksi dari ketinggian posisi da'wah dari hamba Allah.

Peran reposisi mengupayakan bagaimana agar umat menempati posisi yang semakin baik, baik posisi secara politik, budaya, ekonomi, social, di bidang syariah, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Melalui peran reposisi akan meningkatkan posisi islam wal muslimin di segala bidang kehidupan sehingga menempati posisi *ya 'lu*.

II.6.4 Paradigma Da'wah Dan Visi Politik Muslimah Di Partai Keadilan Sejahtera

Paradigma da'wah politik Partai Keadilan Sejahtera merupakan sebuah landasan berfikir, bersikap, dan bergerak yang harus diperhatikan oleh setiap jajaran pengurus dan kader partai. Paradigma ini dibangun dari nilai-nilai da'wah yang terkandung dalam sumber nilai islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW.

Paradigma da'wah PK-Sejahtera sebagai partai ditunjukkan oleh karakteristiknya yaitu profesionalisme yang dibangun di atas moralitas yang bersih dan jiwa patriotisme yang tinggi. Selain itu PK-Sejahtera juga

memiliki karakteristik demokratis, reformis, moderat, dan independent. Sedangkan dalam langkah-langkah politiknya PK-Sejahtera memiliki paradigma yang tercermin dalam prinsip dasar gerakan yaitu, (1) keadilan, persamaan dan keseimbangan, (2) kesatuan nasional, (3) kemajuan, (4) khidmatul ummah dan (5) kerjasama internasional.

Visi politik muslimah sebagaimana digariskan Bidang Kewanitaan adalah tampilnya kader politik muslimah PK-Sejahtera yang cerdas, beradab, dan berdaya guna dalam merealisasikan visi pemberdayaan politik muslimah, PK-Sejahtera menjadikan paradigma da'wahnya sebagai ruh yang menjiwai upaya itu.

II.6.4.1 Paradigma Partai

PK-Sejahtera memandang kader-kader muslimah yang profesional pada bidang yang digelutinyalah yang mampu menampilkan sosok muslimah yang visioner. Partai senantiasa mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi muslimah melalui berbagai media pembinaan baik yang diselenggarakan secara mandiri, mengirim kader muslimah ke universitas-universitas sampai menyertakan mereka dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga nasional maupun internasional.

Moralitas yang bersih dalam profesionalisme yang dibangun ditanamkan baik dari sisi pemberian pemahaman akan nilai-nilai keislaman maupun dari sisi pemberlakuan sanksi-sanksi partai bagi mereka yang melanggar ketentuan *syar'iy* (syariat agama) maupun

tanzhimy (organisasi partai). Dalam masalah moralitas ini, PK-Sejahtera tidak menganut paham kebebasan pribadi pada aspek-aspek yang menyangkut tindakan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kewajiban-kewajiban pribadi kepada Allah SWT pun tetap dipantau pelaksanaannya oleh partai untuk memastikan bahwa hubungan dengan Sang Pencipta senantiasa dalam keadaan yang prima.

Patriotisme ditanamkan melalui doktrin bahwa perjuangan melalui partai adalah bagian dari jihad dalam islam karena pada dasarnya partai membawa misi amar ma'ruf nahi munkar. PK-Sejahtera menerapkan paham demokrasi dalam arti syura dan penghargaan terhadap pendapat serta aspirasi anggota dalam konteks ijtihad yang bersifat strategis maupun praktis. Eksistensi muslimah dalam kerangka ini telah berjalan secara internal partai dengan dilibatkannya muslimah dalam pengambilan keputusan pendirian partai pada bulan Juni-Juli 1998. Mereka memberikan pendapat dan suaranya baik melalui *usrah-usrah* maupun kepengurusan *jama'ah da'wah* sebelum berdirinya partai. Bahkan pada Musyawarah Kerja Pimpinan Nasional tahun 1999 di Parung, wacana tentang mengangkat struktur bidang wanita sampai ke tingkat wakil presiden partai pun tetap dibuka dan dibahas.

Secara eksternal kader-kader muslimah PK-Sejahtera menjunjung paradigma partai dengan dukungan penuh terhadap keterlibatan muslimah dalam legislative maupun eksekutif. Misalnya gerakan kuota bagi calon legislative wanita diwujudkan secara demokratis dalam pemilihan umum

internal partai untuk menentukan para calon legislative. Dengan wawasan integralistik da'wah para muslimah diberi kesempatan secara terbuka untuk memilih siapa pun kader partai yang dianggap memiliki kapabilitas.

Paradigma partai yang bersifat reformis tidak saja dikaitkan dengan momentum tumbangnya presiden Suharto pada bulan Mei 1998, tetapi reformasi yang menyeluruh menyangkut pemahaman dan pelaksanaan ajaran islam dari masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Dalam mengatasi dominasi cultural (penjajahan Barat) yang mengungkung kehidupan budaya wanita Indonesia maka muslimah-muslimah PK-Sejahtera telah mengadakan reformasi budaya mulai dari cara berpikir sampai dengan cara berbusana.

Pada awalnya karakteristiknya PK-Sejahtera sebagai partai moderat kurang dapat dikenali karena penampilan mereka yang dianggap "fundamentalis"²⁰ dalam pengertian kebanyakan orang yang keliru.

²⁰ Secara arti islam fundamentalis adalah pemikiran tentang islam yang dalam pemahaman dan praktiknya bertumpu pada hal-hal yang asasi, fundamental, atau pemahaman dasar. Islam fundamentalis memiliki kecenderungan menafsirkan teks-teks agama secara rigid dan literis dengan sifat gerakan yang agresif dan coraknya yang konservatif. M. Yusril Ihsa mengartikan fundamentalisme sebagai reaksi terhadap modernisme, dianggap sebagai aliran yang berpegang teguh pada "fundamen" agama Kristen melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu secara rigid dan literis. Sedangkan Kuntowijoyo, mengatakan bahwa fundamentalisme (islam) adalah gerakan anti industri, suatu hal yang tidak disadari oleh kaum fundamentalisme sendiri. Ciri-ciri dari kaum fundamentalisme, (1) menginginkan kembali pada masa Rosul. Salah satu contohnya adalah penggunaan jubah atau cadar dengan maksud menolak industri fashion, (2) keinginan untuk kembali ke alam, misalkan dengan melakukan penolakan terhadap wewangian yang berbau pabrik dan beralkohol dan menggunakan bahan-bahan alamiah, (3) fundamentalisme memiliki implikasi politik yaitu pelabelan kaum fundamentalisme ini sama dengan terorisme.

Perkembangan selanjutnya seringkali istilah islam fundamentalisme digunakan sebagai maksud untuk menjelaskan fenomena lain. Sehingga memunculkan citra tertentu, misalkan ekstremisme, fanatisme, bahkan terorisme dan sering disebut sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung melakukan tindakan kekerasan. Ciri lain dari islam fundamentalis adalah dari pandangan dan sikap yang radikal, semangat yang berlebihan, ataupun mencapai tujuan dengan memakai kekerasan. Sehingga banyak dari istilah-istilah tersebut yang dipandang kurang menguntungkan bagi umat islam dan terkadang menyesatkan. Menurut Azyumardi Azra akar fundamentalisme islam kontemporer adalah berasal dari gagasan Hasan Al Banna, Sayyid Qutb

Kemoderatan PK-Sejahtera dalam pandangan syari'at dan metode penerapannya dapat dikenali kemudian dengan interaksi yang makin intensif dengan berbagai pihak. Tampilnya kader politik muslimah mencerminkan kesadaran partai bahwa perjuangan da'wah islam tidak dapat hanya melibatkan kaum pria saja. Keterlibatan tersebut juga dilakukan dengan mengindahkan aturan-aturan syari'at baik yang berkenaan dengan dirinya sebagai wanita maupun dalam hubungannya dengan lawan jenisnya. Sifat ini menolak pandangan kelompok bebas yang mengingkari komplementasi pria dan wanita sehingga tujuan kewanitaan senantiasa harus ditafsirkan sebagai rivalitas atas prestasi yang dicapai laki-laki. Sifat keberdayagunaan peran dan partisipasi politik diantara kader-kader muslimah PK-Sejahtera tidak harus menempatkan mereka pada jenis aktivitas da'wah yang sama.

Independensi kepartaian PK-Sejahtera berarti seluruh visi, misi, dan aktivitas partai dibangun dibawah kesadaran akan nilai-nilai kebenaran dan bukan atas tekanan atau paksaan pihak lain. Partai adalah kepanjangan tangan dari perjuangan da'wah islam dan bukan kepentingan organisasi atau partai lain. Visi muslimah PK-Sejahtera adalah visi da'wah islam yang harus diemban oleh aktivis muslimah da'wah, sesungguhnya dimanapun mereka berada.

dan Abu A'la Al Maududi. Factor yang menyebabkan lahirnya kaum fundamentalis (1) factor modernisasi yang dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama, dan pelaksanaannya dalam kehidupan (2) pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dengan sikap dan pandangan politik yang dianut penguasa (3) ketidakpuasan terhadap kondisi social,ekonomi, politik, dan sebagainya yang berlangsung di masyarakat (4) factor sifat dan karakter dari ajaran islam yang dianutnya yang cenderung rigid dan literis.

Dalam kerangka independensi, muslimah PK-Sejahtera senantiasa aktif berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain, dari partai yang berbeda platform atau asasnya atau dengan kelompok-kelompok masyarakat non partai lain dari dalam maupun luar negeri.

II.6.4.2 Paradigma Gerakan

Keadilan, persamaan, dan keseimbangan adalah paradigma yang menjiwai realisasi dari visi muslimah PK-Sejahtera. Muslimah PK-Sejahtera memandang nilai-nilai dasar dalam islam adalah wujud keadilan Illahi yang dicurahkan bagi kehidupan masyarakat manusia, termasuk didalamnya terkait dengan masalah-masalah kewanitaan.

Perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban yang telah digariskan oleh Allah SWT oleh karenanya tidak dipandang sebagai sebuah diskriminasi. Karena perbedaan-perbedaan itu telah terjadi pada makhluk-makhluk Allah yang lain mulai dari binatang sampai dengan bunga-bunga. Dalam kaitan inilah muslimah PK-Sejahtera memandang bahwa peran-peran politik antara laki-laki dan perempuan tidak harus selalu ditafsirkan berdiri sendiri dan bahwa satu pihak tidak memberikan dampak pada pihak lainnya.

Dalam pemilihan umum internal diantara para anggota PK-Sejahtera untuk penentuan calon anggota legislative terdapat ketentuan seseorang tidak boleh mencalonkan dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan seseorang bebas memilih orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan. Seorang anggota legislative PK-Sejahtera bekerja

berdasarkan beban amanah bukan ambisi pribadi apalagi ambisi kelaki-lakiannya maupun keperempuannya. Inilah makna persamaan dan keseimbangan yang dihayati muslimah PK-Sejahtera.

Pandangan bahwa islam itu bersifat kuno dan menjauhkan pengikutnya dari kemajuan telah menyesatkan banyak pihak dalam memahami cita-cita da'wah islam. Tampilnya kader politik muslimah PK-Sejahtera bukanlah untuk mengembalikan kaum ke keterbelakangan. Kecerdasan, keberadaban, dan kebrdayagunaan adalah indicator kemajuan universal yang akan dicapai oleh aktivis muslimah PK-Sejahtera. Sosok muslimah cerdas dicapai melalui motivasi pencapaian pendidikan formal sebaik mungkin dan system pengkaderan yang intensif. Sosok muslimah beradab dicapai melalui pengamalan ajaran islam yang sistematis dalam arti yang seluas-luasnya. Sosok muslimah yang berdayaguna dicapai dengan peningkatan keterampilan spesialis, pemungisian peran yang tepat dan peningkatan kemampuan manajerial.

Kehadiran kader-kader politik muslimah PK-Sejahtera dalam kehidupan social politik Indonesia tidaklah sekedar untuk menampilkan eksistensi mereka, namun ditujukan untuk melayani kepentingan ummat dalam arti yang seluas-luasnya (*khidmatul ummah*). Menjadi ujung tombak bagi operasi-operasi kemanusiaan dalam menaggulangi probema umat seperti bencana alam, konflik-konflik horizontal, kemiskinan maupun kebodohan. Dalam peran mereka sebagai pimpinan lembaga social maupun tenaga-tenaga operasional. Dedikasi muslimah PK-Sejahtera tak

diragukan lagi sebagaimana terjadi pada konflik Ambon-Maluku, Aceh, kebanjiran DKI Jakarta, Jawa Tengah dan lain-lain.

Sebagai sebuah kenyataan social, masalah perempuan adalah masalah internasional, yang harus dihadapi secara internasional pula. Hal ini menyebabkan muslimah PK-Sejahtera tidak menutup kerjasama diantar sesama aktivis muslimah atau perempuan negara-negara lain. Misal pada pertemuan wanita islam Internasional di Jakarta tahun 2003, momentum itu dijadikan muslimah PK-Sejahtera untuk mewujudkan visinya, tampil sebagai kader politik yang cerdas, beradab, dan berdayaguna, dalam level masyarakat yang lebih tinggi lagi.

IL6.5 Kualifikasi Aktivitas Politik Muslimah

Partisipasi kaum wanita dalam dunia politik tidak dapat dikesampingkan sebab wanita merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan pria untuk membangun masyarakat dan bangsa yang sejahtera, lahir, dan batin. Derajat partisipasi kaum wanita dalam dunia politik dapat sangat beragam, bergantung pada tuntutan kontemporer, potensi, dan kompetensi yang dimiliki, daya dukung serta landasan syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan tabiatnya sebagai ranah public karena berkenaan dengan orang banyak, keterlibatan para muslimah di dunia politik memerlukan kualifikasi tersendiri yang sesuai dengan dunia public. Terlebih selama ini dunia politik masih sarat dengan kesan negative yang membuat sebagian besar masyarakat apriori dan mengambil jarak. Di sisi

lain, keterlibatan kaum wanita di sekitar public khususnya politik tidak cukup populer karena dianggap tidak sesuai atau bahkan berseberangan dengan fitrah kewanitaan. Politik masih dikesankan sebagai area yang penuh intrik, manipulatif, tipu daya dan tidak memperhatikan halal haram serta cenderung berorientasi kepentingan kelompok dengan menjadikan rakyat objek permainan.

Keterlibatan muslimah dalam bidang politik memerlukan eperangkat kualifikasi yang memungkinkan muslimah dapat dengan teguh berjalan pada garis yang lurus dan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pencerahan kehidupan politik.

1. Kekuatan Ruhhiyyah.

Kekuatan ruhiyyah ini merupakan cermin dari keimanan yang dalam yang terimplementasi dalam perilaku ubudiyah yang intens kepada Allah. Berkiprah di dunia politik bagi muslimah memerlukan kekuatan ekstra, maka sudah selayaknya muslimah senantiasa menguatkan hubungannya dengan Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuat sehingga mampu mengarungi jagat politik yang memang berat. Kekuatan hubungan dengan Allah harus dibangun melalui pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhoh dan semua aktivitas yang mendekatkan diri pada Allah. Memiliki tingkatan taqarrub ilallah dengan menjaga shalat-shalat wajib, tahajud, rawatib, dan shalat sunah lainnya, dzikrullah melalui tilawah Al-Qur'an, dan dzikir-dzikir ma'tsurat, memelihara shoum sunah disamping yang wajib.

2. Kekuatan Fikriyyah.

Politik adalah seni mengelola umat atau masyarakat dan Negara. Berbagai persoalan umat akan bermuara pada keputusan-keputusan politik yang harus diambil : agama, pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan, seni, budaya, dan lain-lain. Karenanya seorang aktivis politik haruslah orang yang memiliki kemampuan fikriyyah diatas rata-rata, ditandai dengan kecerdasan intelektual, keluasan ilmu dan pengetahuan.

3. Kekuatan Manajerial.

Cerdas dan sholehah saja tidak cukup apabila tidak disertai sikap yang professional dalam menata aneka urusan dan persoalan yang demikian banyak. Menata urusan umat membutuhkan kecerdasan, seni, dan sikap disiplin. Logikanya : bagaimana mungkin seseorang bisa mengelola umat dengan baik, apabila tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Termasuk di dalamnya mengelola keluarga. Seorang aktivis politik harus memahami fiqhu muwazanah dan fiqhu awlawiyat dan mampu menerapkannya pada skala individu dan keluarga. Kemampuan manajerial seorang aktivis muslimah akan tercermin dalma kemampuannya merapikan gagasan-gagasannya dan menuangkannya secara rapih.

4. Kekuatan Khuluqiyah.

Sebagai aktivis public, seorang politisi akan berhubungan dengan banyak orang dan menjadikannya figure-figur yang dikenal

masyarakat. Juga dianggap pemimpin sekaligus wakil masyarakat, sehingga akan mendapat sorotan semua sisi kehidupannya. Karenanya muslimah harus menampilkan keteladanan dalam segala perilakunya. Keteladanan akan muncul apabila yang bersangkutan memiliki akhlaq yang baik yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

II.6.6 Paradigma Peran Politik Muslimah

Pemberdayaan peran politik muslimah dimulai dari paradigma peran politik muslimah, yaitu pemahaman terhadap politik secara utuh. Dalam ajaran islam, politik bukan kehidupan yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Karena politik melahirkan kebijakan-kebijakan, aturan, dan system yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan da'wah, bukan satu-satunya tujuan, bukan pula bagian yang tak berarti.

Dalam menjalankan peran politiknya, muslimah wajib selalu meningkatkan kompetensinya, mendapat daya dukung dari keluarganya, dan dari partai politik, dan senantiasa menghiasinya dengan nilai-nilai islami.

Hal tersebut akan meningkatkan performance muslimah yang memiliki peran penting dalam gerakan da'wah. Dalam partai da'wah hal itu sudah menjadi keharusan. Mesti ada perubahan situasi dan kondisi, namun perlu diingat bahwa partai da'wah berjuang untuk menegakkan nilai-nilai islam. Ajaran islam yang memiliki prinsip universal dan alamiah,

yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan-perubahan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Visi pemberdayaan politik muslimah adalah signifikannya peran politik muslimah dalam membangun masyarakat yang islami. Misalnya adalah terbangunnya identitas perilaku dan budaya politik yang islami dan meningkatnya peran politik muslimah.

Dalam menjalankan aktivitas politiknya, hendaknya muslimah memegang teguh panduan syariat bagi muslimah :

I. Memiliki akhlaq dasar

- Ikhlas

Ikhlas menjadi modal pertama seorang aktivis muslimah dalam menjalankan peran politiknya. Peran politik adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan sebuah partai da'wah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang islami.

- Syuro

Syuro adalah prinsip yang harus dijalankan dalam menjalankan peran politik. Pemikiran lebih dari satu orang lebih baik. Satu orang adalah sebuah prinsip yang senantiasa harus dipgang oleh aktivis politik muslimah

- Tawazun

Pada prinsipnya, menjaga keseimbangan antara semua kebutuhan aspek ruhiyah, fisik, dan akal menjadi penting bagi aktivis politik muslimah. Seimbang dalam menjalankan

perannya sebagai hamba Allah, anak,ibu, istri, aktivis politik, anggota masyarakat,dan lain-lain.

2. Etika interaksi lawan jenis

- Keseriusan acara pertemuan
- Menahan pandangan
- Tidak bersentuhan dan berjabat tangan dengan laki-laki.
- Menghindari tempat yang berdesakan antara laki-laki dan perempuan.
- Menghindari berdua-dua dengan lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*).
- Menjauhi perbuatan dosa.
- Menjaga hati dari bisikan syaitan.

3. Etika penampilan muslimah

- Menutup aurat.
- Serius dalam bicara.
- Tenang dalam bergerak.
- Siap menghadapi kondisi darurat.

4. Etika dasar muamalah

- Jujur
- Amanah : tidak terlihat money politic.

BAB III

PROFIL SUBYEK PENELITIAN

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan umur (bergabung di partai), aktivitas atau pekerjaan subyek, posisi subyek di struktur partai.

1. Erni (24 tahun).

Nama aslinya Erni Pernika, lahir di Lamongan pada tanggal 12 Juli 1981. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang cukup demokratis, membuat Erni dan dua saudara perempuannya bebas memilih sekolah dan aktivitas yang lainnya. Kakaknya lebih aktif ke dunia hiburan (penyiar radio), teater, dan komunikasi. Akan tetapi ketika di kampus, mahasiswi fakultas Hukum'98 ini mulai terlibat dalam kegiatan ekstra kampus, yakni bergabung dengan HMI.

Tiga bersaudara ini memang tidak pernah mempunyai keinginan yang sama ketika masih duduk di bangku SMU. Adiknya lebih tertarik pada dunia pengabdian, seperti PMR. Mungkin ini karena pengaruh dimana adik Erni menimba ilmu. Di sekolahkan di SMP dan SMU yang berbeda dengan dua kakak perempuannya, membuat gadis bungsu ini lebih tertutup dan keinginannya yang sangat besar untuk belajar tentang islam dibanding kedua kakaknya. Maka tak heran, adik Erni inilah yang pertama kali memakai jilbab berkat interaksinya yang cukup intensif dengan teman-temannya di SKI (Sie Kerohanian Islam) SMU.

Sosok Erni bukanlah seorang perempuan yang suka diam, ini terbukti dengan berbagai aktivitasnya di sekolah yang sudah terlihat sejak tingkat SD hingga mahasiswa. Dimulai di bangku TK selama dua tahun, Erni melanjutkan ke

tingkat Sekolah Dasar (6 tahun). Dari sinilah Erni mulai aktif mengikuti lomba gerak jalan, cerdas cermat, lomba melukis tingkat Kabupaten, bahkan pernah menjadi delegasi SD tingkat Kecamatan. Memasuki bangku SMP, Erni berubah orientasinya. Layaknya gadis seusianya, semasa kelas satu hingga dua SMP Erni lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Kebiasaan ini tidak berlangsung lama karena memasuki kelas tiga SMP Erni harus kembali serius belajar, agar cita-citanya menembus SMU favorit tercapai.

Dunia SMU dilalui Erni dengan berbagai aktivitas ekstra kurikuler, mulai dari pencinta alam (PA), teater, sampai menjadi supporter tim sepakbola. Kegiatan berbau keislaman hanya diikuti ketika itu diwajibkan.

Kuliah di fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Antropologi, membuat Erni semakin terlibat di aktivitas yang tidak hanya berhubungan dengan ketrampilan organisatoris tetapi juga bersentuhan dengan nilai-nilai ideologis. Tabiat kampus yang plural, tumbuh sumburnya organisasi dengan beragam ideology menjadikan gadis Antropolgi'00 ini selektif memilih kegiatan ekstra kurikuler. Hingga Erni tertarik dengan KAMMI (Kesatuan Aktivis Mahasiswa Muslim Indonesia), dari sinilah Erni mulai belajar dunia politik.

SKI (Sie Kerohanian Islam) FISIP juga menjadi pilihan Erni untuk semakin menyempurnakan dan memperdalam pemahamannya tentang islam. Maklum sejak masih di Lamongan dunia seperti ini belum pernah ditekuninya dengan sungguh-sungguh. Baginya inilah sebuah tantangan yang harus dicoba. Motivasi ini semakin menguat ketika kakaknya sudah terlebih dahulu bergabung dengan

SKI dan mengalami perubahan baik dari segi pemahaman, berpakaian, bergaul, dan lain-lain.

Lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi perubahan diri Erni. Kondisi awal kuliah yang *ngekost* bagi Erni tidak memberikan dampak positif. Ini sangat berbeda ketika dia mulai hidup di kontrakan bersama aktivis-aktivis organisasi keislaman fakultas lainnya. Dimulai dari hal yang kecil-kecil seperti saling mengingatkan, memberi nasihat, mendengarkan *murotal*, sholat berjama'ah menjadikan Erni semakin eksis di SKI Fisip.

Track recordnya di SKI, diawali dari menjadi staf kaderisasi (2001), sekretaris Bidang Kaderisasi (1,5 tahun), dan terakhir Ketua Keputrian yang menjadi pusat kaderisasi dan pengembangan kader *akhwat*. SKI juga memberikan pembelajaran politik melalui kegiatan seminar.

Eksist di kampus tidak menjadikan Erni meninggalkan kegiatannya di KAMMI. Berawal dari staf kaderisasi hingga menjadi sekretaris Kastrat (Kajian Strategis) di tingkat Komisariat B Unair, menjadikan Erni semakin terlibat di dunia politik. Tak jarang perempuan ini harus turun ke jalan (demonstrasi) bersama teman-teman seperjuangan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Keterlibatannya di panitia seminar-seminar politik, menulis di buletin-buletin KAMMI semakin memperjelas sosok ini tertarik dan mampu terjun di dunia politik.

Tahun 2002 Erni mulai melebarkan perannya, tidak hanya di dunia mahasiswa tetapi ikut bergabung di salah satu partai (Partai Keadilan) tingkat Depera (Dewan Perwakilan Ranting) Airlangga. Erni lebih banyak bersentuhan

dengan kegiatan pelayanan social seperti baksos dan di tahun 2005 Emi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera tingkat Depera bidang kaderisasi.

Perjalanan panjang Emi tidak terlepas dari *background* keluarganya. Ibunya berasal dari keluarga yang sangat minim pemahamannya tentang islam. Namun karena orang-orang terdekatnya adalah komunitas Nahdiyyin, membuat ibu Emi mengenal islam, sehingga tidak jarang melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang nahdiyyin, seperti tahlilan.

Bapak Emi berasal dari keluarga nahdiyyin. Layaknya sebagai anak kyay, laki-laki ini tidak disekolahkan di sekolah umum namun di pondok. Dalam perjalanan hidupnya bersama istri dan anak-anaknya, bapak Emi tidak menerapkan aturan yang biasa diterapkan oleh orang tuanya. Bapak Emi lebih memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya memilih kehidupannya sendiri.

2. Prima (20 tahun).

Gadis kelahiran Bandung, Selasa Legi 10 Desember 1985 mempunyai nama lengkap Putri Prima. Sejak SD orang tuanya pindah ke Surabaya dan sekarang tinggal di Mojo Kidul 52A Surabaya.

Sulung dari dua bersaudara ini, mengaku bahwa keluarganya bukanlah tipe keluarga yang agamis. Nilai-nilai keagamaan justru banyak didapatkan di luar rumah. Orang tuanya hanya mengajarkan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, itupun secara umum. Konsep besar yang terus ditanamkan oleh ayahnya adalah bagaimana berpikir positif, saling kompromi dengan semua orang.

Model pendidikan yang diterapkan oleh orang tuanya, tidak terlepas dari *back ground* orang tuanya di keluarganya. Ayahnya sejak kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya (ayah), sehingga dia hanya tinggal bersama ibunya. Tuntutan ekonomi, mengharuskan laki-laki ini banyak menghabiskan waktunya untuk sekedar memikirkan dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Dunia agama hampir tidak pernah ditekuninya apalagi dunia politik.

Latar belakang orang tua Prima yang biasa-biasa saja, ternyata tidak menjadikan Prima sosok yang biasa pula. Gadis berjibab ini, sejak SD telah merelakan waktu-waktu bermainnya untuk mengikuti les-les, bahkan pernah menjadi pelajar teladan se-Kecamatan (kelas 5). Di SMP 1 Surabaya Prima tercatat sebagai pelajar yang intens mengikuti Ekstra kulikuler drum band dan sering terlibat di Kejurda-Kejurda. Aktivitasnya semakin beragam ketika Prima mulai terlibat di dunia jurnalistik. Sebagai mantan ketua Jurnalistik SMU 5 Surabaya, Prima merasa mulai menemukan bakat yang ada pada dirinya.

Pengalaman keagamaan di SMU, bagi Prima merupakan pengalaman sangat berharga. Mengetahui Islam secara *kaffah* mulai Prima dapatkan dari sini. Bagaimana hukumnya menutup aurat, pacaran, kepribadian muslimah, dan nilai-nilai Islam lainnya yang belum pernah ia dapatkan di keluarganya. Kegiatan Birama (Bimbingan Ruhani) yang diikutinya secara rutin semakin menguatkan Prima untuk terus *istiqomah* meskipun nantinya tidak diterima di Universitas negeri di Surabaya.

Sekarang Prima tercatat sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Fakultas Kedokteran semester 5. Selain kesibukannya di aktivitas kuliah, Prima

juga terlibat aktif di beberapa organisasi keislaman. Menjadi staf bidang komunikasi dan da'wah di SKI (Sie Kerohaniaan Islam) serta memberikan kontribusi di BKI (Bidang Kerohaniaan Islam) tingkat Universitas merupakan amanah yang saat ini dipegang oleh Prima. Tak jarang, Prima juga ikut terlibat di kepanitiaan kegiatan-kegiatan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Muslimah berkaca mata ini, mulai mengenal Partai Keadilan Sejahtera (dulu bernama Partai Keadilan) sebenarnya sejak kelas 3 SMU. Meskipun namanya tidak masuk dalam struktur partai, Prima juga terlibat dalam aktivitas politik yang layaknya juga dilakukan oleh anak seusianya. Mengenalkan partai ke keluarganya, teman-temannya, serta lingkungan sekitarnya merupakan bentuk partisipasi politik yang pernah dilakukan oleh Prima.

Dalam dunia kampus, sosok Prima juga intens mengikuti dinamika politik kampus. Tak heran jika Prima selalu menimbang, menganalisis, menilai, sebelum akhirnya memilih salah satu dari calon kandidat Presiden BEM di fakultasnya. Bahkan aktivitas politisnya semakin naik seiring rasa tanggung jawabnya yang besar akan masa depan kampusnya. Terlibat aktif menjadi tim sukses dari salah satu calon Presiden BEM merupakan bentuk tanggung jawabnya yang besar akan masa depan kampusnya.

3. dr. Iswi (38 tahun)

Nama lengkapnya Iswiati Widiyanti, dilahirkan di Nganjuk 14 Agustus 1967. Ibu berputra 6 ini sekarang tinggal di Mojoklangru Lor 76A Surabaya. Sejak dari kecil orang tuanya sangat memperhatikan masalah agama termasuk

kewajiban-kewajiban sebagai orang islam. Hal inilah yang membuat orang tuanya sangat mantap ketika melepas Iswi untuk melanjutkan studi di Surabaya.

Iswi termasuk anak yang cukup beruntung untuk kondisi anak-anak di jamannya. Ayahnya pernah belajar di pesantren Hassan Bisri sedangkan ibunya pernah menuntut ilmu di sekolah Kartini. Perpaduan yang serasi inilah yang membuat kedua orang tua Iswi sangat memperhatikan masalah pendidikan. Prinsip yang diterapkan untuk ke-12 anaknya adalah bahwa orang tua tidak mewarisi harta tetapi ilmu. Jadi semakin tinggi sekolah anak-anaknya semakin banyak pula warisannya. Pun tidak ada perbedaan gender dalam keluarga Iswi terutama dalam hal pendidikan.

Saat ini dari seluruh saudaranya yang perempuan, ada yang berprofesi sebagai dosen, ada yang berkiprah di dunia pendidikan lainnya, bahkan ada yang tergabung di Korps Wanita Angkatan Darat. Hal-hal yang berkaitan dengan potensi anaknya sangat dipahami oleh orang tua Iswi walaupun mereka yang perempuan. Prinsip yang diterapkan oleh orang tua Iswi adalah bahwa jauh lebih baik perempuan yang berilmu daripada perempuan yang tidak berilmu karena perempuanlah nantinya yang lebih banyak mendidik anak.

Nilai-nilai yang telah di terapkan oleh orang tuanya semakin membuat Iswi terpacu dalam mencari ilmu. Lulus dari SMU, Iswi diterima di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Airlangga Surabaya tahun 1985. Dunia kampus tidak dihabiskan Iswi dengan masalah akademik saja, tetapi Iswi tercatat sebagai aktivis masjid yang banyak memberikan kontribusinya bagi perkembangan dakwah khususnya di Fakultas Kedokteran. Ini berawal dari interaksinya dengan

kajian-kajian yang diadakan di kampus. Sampai akhirnya Iswi menemukannya kajian rutin yang disitu difahamkan tentang islam yang benar, tentang masyarakat yang islami. Iswi mulai memahami bahwa perempuan itu harus mengambil perannya di masyarakat, termasuk di dalamnya tugas utama dan pertama ibu sebagai pendidik anaknya.

Bergabung di salah satu lembaga dakwah kampus PIAI (Pengkajian Ilmu Agama Islam) Iswi bersama teman-teman seperjuangannya berpikir keras dan bekerja hingga hasil kerja keras itu banyak dinikmati tidak hanya oleh mahasiswa yang ada di kampus tetapi juga masyarakat di sekitar kampus. Iswi juga pernah terlibat di OHT (HMI yang khusus putri), namun tidak sampai menjadi aktivis karena seringkali training-training mereka diadakan di luar kota dan itu tidak diikuti oleh Iswi.

Pasca kampus merupakan awal karier Iswi untuk memberikan kontribusinya bagi pemberdayaan perempuan. Sekitar tahun 1995 Iswi bersama beberapa teman-temannya mendirikan Yayasan Harapan Muslimah yang lebih memfokuskan pada forum pengajian. Bagi Iswi, didirikannya yayasan ini juga akan lebih mempermudah muslimah dalam mengapresiasi potensinya. Mengingat pada saat itu kondisi di Indonesia sedang ramai dengan OTB (Organisasi Tidak Berbentuk).

Tuntutan WKS (Wajib Kerja Sarjana), Iswi harus pindah ke Madura dan di tempat inilah Iswi menjadi kepala puskesmas. Meskipun tanpa keberadaan Iswi di Surabaya, yayasan itu tetap berjalan berkat kerja sama yang baik dari seluruh teman-teman Iswi. Bahkan dengan aktivitas yang sama, Iswi juga melakukan

pemberdayaan perempuan di tempat barunya. Maka tak heran jika banyak perempuan di puskesmas yang tertarik dan ikut forum-forum yang diadakan oleh Iswi. Bagi Iswi, forum-forum yang diadakannya itu merupakan bentuk apresiasi muslimah karena tak jarang banyak dikaji tentang peran-peran perempuan untuk menjadi muslimah yang baik.

Ketika era reformasi menyapa bangsa Indonesia, Iswi dan beberapa muslimah seperjuangannya tidak gugup menghadapinya. Iswi dan teman-temannya sudah siap untuk mengambil peran khususnya peran politik. Prinsip yang dipegang oleh Iswi bahwa setiap tindakan, perlakuan, dan pergerakan yang mengarah pada perubahan peradapan itu adalah hakikat dari nilai politik. Setiap perempuan yang berjuang untuk menyadarkan kaum muslimah akan potensinya, memberikan kontribusi untuk sebuah perubahan menuju kebaikan ia adalah politis.

Sampai saat ini Yayasan Harapan Muslimah telah banyak membantu bagi para perempuan dan anak-anak. Bahkan bidang *tarbiyatul aulad* (pendidikan anak) telah berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan sekolah islam yang menjadi salah satu rujukan tempat pendidikan anak masyarakat Surabaya. Selain itu ada juga bidang *fanniyah* yang memfokuskan pada keterampilan keluarga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana muslimah bugar, bagaimana muslimah mempunyai *sense* dalam menjaga dirinya. Tak ketinggalan, sisi social pun ikut digarap oleh yayasan ini misalnya pembinaan bakti social.

Selain di yayasan, Iswi sekarang berprofesi sebagai salah satu dokter di rumah bersalin Adi Guna. Tentunya aktivitas memberdayakan perempuan juga dilakukan di tempat kerjanya ini.

4. Rini (36 tahun)

Nama lengkapnya Dwi Sulisty Rini, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1969. Saat ini Rini bertempat tinggal di Jl. Suropto 5 Kompleks AL Kenjeran bersama suami dan keempat putranya.

Rini dilahirkan di lingkungan keluarga militer, yaitu ayahnya dari Angkatan Laut dan ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa. Ayah Rini cukup memahami masalah agama meskipun bagi Rini pengaruh kemantapan beragama justru banyak didapat ketika Rini mengikuti pembinaan di kampusnya.

Pengalaman berorganisasi banyak didapat Rini ketika pasca kampus. Misalnya Rini pernah menjadi pengajar di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), bergabung di Yayasan Harapan Muslimah, dan terlibat di Yayasan Insan Permata. Ketika kuliah Rini lebih konsentrasi di aktivitas akademik, dan sesekali juga terlibat di kepanitiaan SKI (Sie Kerohaniaan Islam) untuk acara-acara yang sifatnya incidental.

Sejak di bangku kuliah Rini mulai tertarik oleh dinamika dunia politik karena jurusan yang dipilihnya, yaitu Administrasi Negara (tahun 1988) merupakan program studi yang sangat dekat irisannya dengan ilmu politik. Sehingga banyak membahas masalah dinamika kebijakan, dinamika pemerintahan Negara.

Namun, kiprahnya di dunia politik saat ini, sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Surabaya sebenarnya bukan karena Rini pernah kuliah di jurusan Administrasi Negara. Menurut Rini ini hanya masalah sedikit *match* dengan kuliahnya. Sebagai aktivis perempuan PKS, Rini berprinsip bahwa terjun di partai adalah sebuah kewajiban sebagai wadah aktivitas da'wah.

Agaknya jauh sebelum Rini terjun di dunia partai, latar belakang keluarganya juga sedikit ada nuansa politik. Artinya perbincangan politik juga pernah Rini lakukan dengan ayahnya meskipun itu tidak formal dan tentunya juga tidak mempengaruhi pemikiran Rini. Namun, pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh kepartaian sangat mempengaruhi pemikiran, sikap hidup, bahkan aktivitasnya di partai. Disamping peran dan kontribusi suaminya yang sangat mendukung amanahnya sekarang.

5. Yulyani (37 tahun)

Yulyani, begitulah nama asli dari perempuan yang lebih dikenal dengan Ummu Hamas. Dilahirkan di Bengkulu pada 6 Juli 1968, dari keluarga terpandang (seorang datuk kepala budaya) di daerahnya. Ayahnya seorang tokoh agama dan imam masjid besar di daerahnya. Anak ke-6 dari tujuh bersaudara ini menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di tanah kelahirannya. Nilai agama sudah ditanamkan sejak dini oleh sang ayah. Tak heran, di masa anak-anak perempuan ini sudah menjadi *qory* (pembaca Al-Qur'an). Begitu pun halnya dengan nilai kedisiplinan yang sangat diperhatikan dalam keluarganya. Sehabis maghrib, anak-anak sudah harus berada di rumah. Watak keras namun ramah dari sang ayah ini

ternyata cukup membuat anak-anaknya takut, sehingga tidak ada yang berani mengundang teman laki-lakinya datang ke rumah.

Darah kepemimpinan sang ayah diwarisinya. Ini terlihat dari seringnya Yulyani mendapatkan amanah di organisasi di tempatnya belajar maupun di masyarakat. Pada saat duduk di kelas tiga SD, Yulyani sudah masuk kepanduan atau pramuka karena tertarik dengan kegiatannya seperti berkemah. Menjadi komandan upacara pun bukan yang aneh baginya. Yulyani sempat ikut jambore tingkat daerah tapi urung ikut jambore tingkat nasional karena terserang sakit malaria. Prestasi belajarnya pun tidak ketinggalan. Yulyani sempat menjadi siswa teladan. Sewaktu SMA, sudah menempati posisi sekretaris KNPI tingkat Kotamadya. Ketua OSIS SMA pun disandangnya. Bahkan diangkat sebagai forum OSIS tingkat propinsi.

Di lingkungan keluarganya, Iyen panggilannya waktu itu, paling terlihat beda. Hanya dirinya saja yang mempunyai jiwa seni. Pada saat ibu Iyen mengandungnya, ibunya mengaku *ngidam* suka menonton orang menari. Jadilah sosok Iyen yang suka bermain gitar, sanggar, pidato, bahkan yang cukup menantang yaitu MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam). Berawal dari kegemarannya terhadap seni, hingga Iyen mampu menguasahnya dengan baik. Bahkan Iyen mampu menyabet deretan prestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang paling spektakuler yaitu ketika Iyen terpilih sebagai mayoret drumband terbaik se-Sumatra Selatan. Tiga tahun Iyen menggeluti mayoret dan sempat akan diberangkatkan ke Eropa tahun 1987. Iyen juga pernah bergabung dengan sanggar teater sekaligus main bareng dengan Reni Jayusman,

yang kemudian bisa menorehkan prestasi cemerlang. Pembaca puisi terbaik dan penari terbaik tingkat nasional pun pernah Iyen raih. Di barisan Paskibraka namanya juga tercatat sebagai anggota. Sering pula Iyen didelegasikan sekolahnya dalam event tertentu seperti ke Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Tidak heran akhirnya Iyen menjadi icon remaja di daerahnya pada masa itu.

Walaupun menurutnya Iyen termasuk nakal, tapi tidak suka hura-hura. Masa SMA yang secara umum dianggap masa bersenang-senang, namun tidak demikian dengan Iyen. Lebih suka masuk sekolah sehabis kegiatan. Pada waktu itu yang marak di kalangan remaja adalah ganja dan kebut-kebutan. Namun dengan harga diri yang dimilikinya maka tidak ada yang berani berbuat 'macam-macam' kepadanya. "Kalaupun saya itu dalam kejahilan, kans (peluang) untuk baik itu ada," ujarnya mengenang. Benarlah ungkapan Sayyid Quthub menurutnya, kalau Allah mau menjaga hambaNya walau ia hidup di lingkungan jahiliyah, terbentang di depan mata jika Iyen ingin berbuat layaknya teman-temannya, namun syukurlah Allah menjaganya.

Prestasi akademiknya juga diraih dengan cemerlang. Buktinya Iyen mampu meraih nilai tertinggi di SMA dan masuk kuliah tanpa tes, yaitu melalui jalur PMDK di jurusan matematika. Prestasi di kampus pun tidak perlu diragukan. Baru semester satu, Iyen sudah bergabung di Senat Mahasiswa. Berbagai jabatan di organisasi ekstra kampus pun pernah diemban, antara lain sekretaris Forum Mahasiswa Muslim se-Bengkulu, ketua PII (Pelajar Islam Indonesia), bendahara Badko HMI, sekretaris Angkatan Muda Muhammadiyah, dan NU. Keaktifannya di berbagai organisasi berpijak dari prestasinya sejak awal kuliah. Yulyani masuk

lima besar dalam penataran P4 dan meraih Indeks Prestasi 3,9 di semester satunya. Sempat menjadi ketua tingkat selama tiga tahun berturut-turut dan dijabat untuk mewakili mahasiswa teladan tingkat nasional.

Ketika kuliah sang ayah menyuruh Iyen untuk memakai kerudung. Awalnya Iyen enggan untuk melakukannya. Meski mempunyai keinginan ke arah sana, namun Iyen berpikir tidak melakukannya untuk saat itu. Namun tidak ada lagi kompromi lagi dalam hal tersebut dari sang ayah. Akhirnya Iyen melaksanakan kewajiban tersebut, meski tidak PD (Percaya Diri) untuk pertama kalinya. Namun bagi Iyen, pantang untuk melepaskannya kembali. Akhirnya Iyen memahami, dan bisa menjadi 'raja' di masa islamnya. Tekadnya membulat untuk tetap berusaha menjadi leader, dimanapun berada.

Sudah menjadi penilaian bagi orang Bengkulu yang merupakan kota industri, mempunyai anggapan bahwa pekerjaan yang dinilai pas adalah pegawai negeri, sedangkan yang lainnya dianggap bukanlah suatu pekerjaan. Begitupun yang menjadi pola pikir orang tua Iyen yang menginginkan ketujuh anaknya menjadi pegawai negeri. Terhadap Iyen, mereka mengharapkan untuk menjadi seorang guru. Namun sosok Iyen memang paling beda dengan latar belakang keluarganya. Ketika masih kelas tiga SD, Iyen mewarisi bakat bisnis neneknya yang kebetulan tinggal serumah dengannya. Missal ketika neneknya membawakan jagung maming untuknya, kemudian itu dijual oleh Iyen.

Begitu lulus kuliah tahun 1991, Iyen langsung menikah dengan Amin Ak. MM seorang pria asal Jawa Tengah. Ketika mempunyai anak pertamanya, naluri bisnisnya terus berkembang walaupun belum pernah ada hasil yang signifikan.

Sejak bergabung di Dannis (produk baju muslim), Ummu Hamas semakin dikenal banyak kalangan. Apalagi ibu empat putra dan satu putri ini sukses menyabet *the best marketing* Dannis selama empat tahun berturut-turut. Salah satu bukti kerja keras dan optimisnya, Iyen mampu meraih keuntungan dengan jumlah Rp. 100-juta, yang diwujudkan dengan rumahnya yang sekarang di Semolowaru Elok, Surabaya. Perempuan yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai daftar buku favoritnya ini, sekarang diamanahi sebagai wakil rakyat di DPRD II Surabaya periode 2004-2009

6. Im (29 tahun)

Nama lengkapnya Nimsodiawati. Gadis kelahiran Surabaya ini bertempat tinggal di Tambak Rejo Gg 3 nomor 22 Surabaya. Im, demikian orang tuanya memanggilnya. Sejak di bangku SMP, Im sudah terlibat di OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Im terlihat suka dengan dunia organisasi dan itu juga terbukti ketika dia memasuki SMA. Hanya saja saat itu, Im lebih tertarik di organisasi yang sangat kental dengan nuansa keislaman, yaitu SKI (Sik Kerohanian Islam).

Ternyata dunia kampus yang dipilihnya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berdakwah. Maka tak heran jika gadis yang dikenal ramah ini, termasuk mahasiswa yang aktif di kegiatan-kegiatan keislaman terutama di fakultasnya. Im tercatat sebagai anggota SKI Fakultas Ekonomi dan anggota UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam) atau yang sering dikenal dengan SKI tingkat Universitas Airlangga.

Alumni Manajemen Universitas Airlangga ini, sekarang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jauh sebelum dia diterima di amanah ini, Im termasuk sosok yang terlibat di partai. Berawal dari sekedar ikut-ikutan, akhirnya Im serius untuk memberikan kontribusinya di ranah politik. Kiprahnya bermula ketika Partai Keadilan didirikan. Im tercatat sebagai staf kewanitaan di tingkat DPC, kemudian pada tahun 2004 Im diamanahi sebagai staf lajnah pemenangan pemilu bagian staf bendahara.

Menurut pengakuannya, keterlibatannya di partai banyak dipengaruhi oleh teman-teman di sekitarnya. Latar belakang keluarganya yang buta politik tidak menjadikan Im buta politik. Bahkan sejak Im terjun di dunia politik, keluarganya menjadi target pertama dalam aksi-aksinya. Ini terbukti dengan diijinkannya Im untuk terus berkiprah di dunia politik. Pengkondisian keluarga juga menjadi focus perhatian Im. Ketika dia memperkenalkan calon yang akan diusung oleh partainya, Im berusaha untuk memperkenalkan ke keluarganya lebih dahulu. Hingga saat ini dukungan dari keluarga sangatlah bagus bagi kiprah politik Im.

Sebagai seorang PNS, Im tidak bisa seaktif seperti dulu. Baginya apapun yang dilakukan ketika hal itu dalam rangka perubahan ke arah kebaikan maka itulah politik. Hal inilah yang terus dilakukan oleh Im, sehingga di lingkungan mahasiswa pun Im cukup dikenal sebagai da'iyah yang terus berusaha melakukan perubahan dengan intensnya Im membina para mahasiswa.

BAB IV

WACANA POLITIK

Foucault mengistilahkan wacana yang diterjemahkan dari kata discourse secara luas digunakan dalam kategori dan analisis sosial untuk merujuk berbagai cara menstrukturkan pengetahuan (knowledge) dan praktik sosial (social practice). Seperti yang diungkapkan oleh Fairlough, wacana termanifestasikan melalui bentuk khusus penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subyek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya.

Wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti Foucault, adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Ada beberapa konteks yang penting karena pengaruh terhadap wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara, dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana.

Dalam penelitian ini, wacana yang dimaksud adalah wacana di kalangan perempuan PKS mengenai politik, kekuasaan, negara, pengambilan keputusan,

kuota perempuan, dan Pilkada. Tema-tema tersebut juga akan dikaitkan dengan posisi subyek penelitian sebagai perempuan. Latar siapa yang memproduksi wacana dalam penelitian ini sangat diperhatikan. Misalnya, perempuan yang menjadi subyek adalah bervariasi dalam hal usia, pendidikan, kelas sosial. Sedangkan setting sosial yang meliputi tempat, waktu, posisi subyek atau lingkungan fisik juga diperhatikan. Tentunya hal ini akan semakin memperlihatkan bagaimana wacana yang diproduksi subyek mempunyai konteks dan relasi sosial yang berbeda-beda.

IV.1 Politik

Tidak dapat dipungkiri, selama ini terdapat kesalahan-kesalahan terhadap aktivitas politik perempuan. Sebagian memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah, seakan-akan politik bukan milik dan bagian perempuan. Pasalnya, dalam kacamata penganut konsep ini, politik identik dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan, atau tipudaya yang hanya pantas menjadi milik laki-laki saja.

Definisi-definisi yang ada tentang politik membenarkan kesan diatas. Worsley²¹ memperhatikan adanya dua tingkat penggunaan istilah politik, dimana pada tahap yang pertama politik dianggap sebagai suatu konsep yang sangat luas yang mencakup semua pembatasan terhadap orang lain. Worsley berpendapat bahwa :

"Kita dapat dikatakan bertindak secara politis apabila kita menghalangi orang lain sehingga mereka bertindak sesuai dengan apa yang kita

²¹ Peter Worsley, *The Distribution of Power in Industrial Society*, " dalam *Power in Britain: Sociological Readings*, (eds) John Urry dan John Wakeford (London: Heinemann Books, 1973) dalam A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal.60.

inginkan dari mereka...Dengan demikian definisi ini, tindakan menghalangi dalam hubungan apapun bersifat politis. Semua jenis tekanan, mulai dari tekanan massal dan penyiksaan yang terorganisi, sampai pada nilai-nilai yang tersembunyi dalam pembicaraan antar pribadi, semuanya itu merupakan dimensi yang bersifat politis”

Ciri khas tindakan politik seperti yang digambarkan di atas adalah menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Karena politik diberi batasan seperti itu, yang lebih menonjol adalah persaingan dan permusuhan, sehingga tidak mengherankan apabila definisi-definisi seperti ini menimbulkan citra yang tidak menguntungkan tentang politik dalam pikiran orang yang membacanya, termasuk perempuan.

Sebaliknya, di sisi lain sebagian berpendapat bahwa justru perempuan harus berkiprah dan berperan aktif di segala bidang. Sama dengan laki-laki tanpa pengecualian, termasuk dalam bidang politik. Hanya saja politik yang dimaksud terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi saja. Artinya, aktivitas politik perempuan senantiasa diarahkan pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya untuk duduk di jabatan kekuasaan atau legislasi. Hal ini didukung oleh asumsi, bahwa jika kekuasaan atau pun penentu kebijakan bukan perempuan atau minoritas perempuan, suara perempuan tidak akan didengar dan diperjuangkan.

Mengenai definisi politik, dalam penelitian ini ada yang mendefinisikan politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Seperti ungkapan Im di bawah ini :

“.....ketika mendengar kata politik yang jelas mungkin kalau dalam konteks Indonesia sekarang politik itu adalah cenderung pada sistem menjalankan pemerintahan. Entah kebijakannya, entah itu saya berpikir ketika politik itu berarti masuk ke sebuah sistem.”
(Im, PNS)

Im menyatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini, menurutnya, politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).

Pemahaman politik di atas adalah pemahaman politik dari perempuan yang latar belakang pendidikannya jauh dari Ilmu Politik. Namun, dalam hal ini Im tidak bingung dalam mengungkapkan pemahamannya tentang politik. Banyak faktor yang menyebabkannya, diantara interaksi Im yang cukup intensif dengan teman-temannya yang *notebene* peduli dengan permasalahan politik.

Dalam konteks islam, secara bahasa, politik (*as-siyasah*) sebenarnya berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Ahmad 'Athiyah menyatakan bahwa politik bermakna memelihara dan memperhatikan urusan rakyat. Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat, politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan dimana mekanisme kontrol berperan besar.

Perbedaan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada wacana yang dihasilkan. Seperti terlihat pada apa yang diungkapkan oleh Er :

“makna politik. Politik identik dengan kekuasaan. Saya memandang politik ya seperti biasa, maksudnya bagaimana upaya untuk mengatur negara, bagaimana upaya untuk mengatur rakyat, dan kekuasaan itu semua terangkum dalam politik. Jadi politik itu luas. Tidak hanya yang

terkait dengan bagaimana cara memilih presiden, memilih menteri dan sebagainya. Politik ya mengatur rakyat semuanya”
(Er, aktivis)

Latar belakang pendidikan Er yang sangat berurusan dengan politik membantu Er mampu memahami konsep politik secara luas. Titik tekan dari pemahaman politik menurut Er adalah bahwa politik mengatur rakyat semuanya.

Lain lagi apa yang dipahami oleh Is. Pengalamannya yang cukup lama dalam dunia pemberdayaan perempuan, menyebabkan Is lebih bisa menguraikan secara detail mengenai politik. Is memahami politik tidak hanya menyangkut dunia parlemen, pos-pos legislatif atau eksekutif. Namun semua bidang yang mengarah pada kebaikan bisa disebut politik dan setiap individu yang berkecimpung di aktivitas tersebut disebut politis. Seperti paparan Is di bawah ini,

“jadi kalo orang kata politik dia nanti akan berpikiran tentang kekuasaan jabatan, anggota DPR atau yang lainnya. Itu tidak salah ya. Tapi saya lebih memperluas lagi pemahaman itu bahwa politik itu peran kita di masyarakat selama itu ingin merubah suatu peradaban lebih baik. Sehingga apapun posisi kita saat kita memegang kontribusi kearah kebaikan itulah politik”
(Is, dokter)

Pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Is membenarkan politik berhubungan dengan kekuasaan. Namun hal itu hanya sebagian kecil dari politik itu sendiri. Politik lebih dipahami sebagai gerakan yang merubah suatu peradapan menjadi lebih baik.

Ketika seorang Aleg mengungkapkan pemahamannya tentang politik, terlihat bahwa apa yang diungkapkan benar-benar sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan.

“kalo dilihat dari ini ya, pemahaman saya yang bukan mengenyam dunia pendidikan politik mungkin berbeda ya dengan mereka yang kuliah, sekolah, ato apa ya fisipol, apalagi saya ini dari eksak, matematik jadi yang jelas dari sisi pemahaman sangat-sangat tidak ada, dari sisi wawasan tidak ada, cuman saya memaknai politik itu tergantung pemahaman keislaman saya. Ketika saya tidak tau tentang keislaman saya memandang politik itu adalah sebuah kekuasaan yang sangat kotor, menghalalkan segala cara, orang-orang munafiklah. Jadi itu ketika saya belum mengenal islam. Tapi ketika saya sudah memahami islam, cara pandang saya terhadap makna politik itu ya sekarang saya memahami politik itu jalan pintas menuju surga. Saya katakan seperti itu. Karena apa disitulah yang namanya *amar makruf nahi munkar* yaitu politik. Jadi sebuah gerakan ato upaya untuk mengajak orang dengan sebuah nilai kebaikan, jadi itu pemahaman saya tentang politik sebagai orang yang tidak pernah punya teori tentang politik tapi justru berkecimpung dalam dunia politik. Sederhana saja segala sesuatu yang mengajak pada kebaikan adalah politik dan setiap orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan adalah politisi.

(Yen, Aleg)

Pemahaman politik di atas didasari oleh sebuah pemahaman agama Yen. Ketika politik di pahami di luar itu, maka menurut Yen politik identik dengan kekuasaan yang sangat menjijikan. Hal ini bisa dilihat dari praktek-praktek politik secara umum di masyarakat. Lebih tegas Yen memandang politik sebagai sebuah jalan pintas menuju ke surga karena melalui politik orang bisa melakukan amal kebaikan yang mana tujuan akhir dari politik adalah adanya perubahan ke arah kebaikan. Yen memperjelas bahwa politik tidak hanya aktivitas seperti Yen geluti sekarang, yaitu terjun di dewan. Namun setiap gerakan yang mengajak pada kebaikan adalah politik.

Di tinjau dari substansinya, politik juga mengandung pengertian yang luas. Politik sebagai sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan esensi nilai politik terletak pada pengelolaan dari kekuasaan politik itu. Terlihat dari paparan Prim di bawah ini :

“... ya politik apa ya. politik itu wadah, sarana untuk mencapai misi tertentu dari suatu kelompok, atau mungkin jika dikaitkan dengan agama, politik itu perlu, mungkin mempengaruhi orang, menyebarkan dakwah itu sendiri.”
(Prim, mahasiswa)

Meskipun kuliah di Fakultas Kedokteran tidak menyebabkan Prim bingung dalam memahami politik. Prim memandang bahwa politik adalah aktivitas yang mengandung misi dari kelompok tertentu. Dengan politik orang atau kelompok tersebut berusaha untuk mempengaruhi orang yang menjadi objek aktivitas politiknya. Berkaitan dengan aktivitasnya di kampus, Prim menyebutkan dalam konteks agama, dicontohkan bahwa praktek politik sebagai bentuk dari dakwah (menyeru) yang di dalamnya terdapat unsur mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai kebaikan sehingga tujuan dari dakwah itu tercapai.

Politik merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan dalam pelaksanaannya memerlukan sarana, yaitu kekuasaan. Sehingga ketika berbicara tentang politik Rin tetap membenarkan bahwa politik mengandung unsur kekuasaan. Bahwa kekuasaan mempunyai kekurangan-kekurangan adalah sesuatu yang diakui oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melihat bahwa pelaksanaan kekuasaan itu seringkali terjadi dalam bentuk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karenanya pada pendapat Ibnu Khaldun, moralitas dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasar argumen di atas, Rin menilai bahwa esensi politik tergantung dari pengelolaan kekuasaan itu sendiri. Seperti kutipan wawancara dibawah ini :

“Jadi kalo sekarang saya melihat politik itu tidak lagi sebagai upaya perebutan kekuasaan, yang di dalamnya banyak tipu daya dan tipu muslihat, banyak intrik. Tetapi tetap bahwa politik disitu ada unsure kekuasaan itu tetap. Saya tetap membenarkan disitu ada unsure

kekuasaan, cuman mau diapain kekuasaan ini. Itulah e apa namanya disitulah politik itu mempunyai arti”
(Rin, ibu rumah tangga)

Apa yang diungkapkan oleh Rin di awal wawancara di atas adalah pemahamannya tentang politik ketika Rin masih duduk di bangku kuliah. Pemahaman bahwa politik adalah perebutan kekuasaan, tipu daya, tipu muslihat, dan banyak intrik merupakan pengaruh dari materi-materi kuliah Rin. Akan tetapi sejak bergabung dengan sebuah partai Rin memahami bahwa politik terletak pada pengelolaan kekuasaan.

Bertolak dari pengertian politik adalah tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan, maka tidak terlihat di dalamnya unsur kekejaman, ketidakadilan. Dengan kata lain politik berarti sebuah pengelolaan sehingga bagaimana mencapai sebuah tujuan itulah esensi dari politik itu sendiri. Rin membahasakan makna tersebut dengan detail, yakni:

“Jadi kalo dalam arabnya *siyasiyah* itu berarti sebuah pengelolaan. Jadi dari beberapa ulama di Mesir sana misalnya saja siapa yang pernah saya dengar itu *siyasiyah* itu berarti bagaimana mencapai sebuah tujuan. Pengelolaan *ato* bagaimana mencapai sebuah tujuan. Sehingga tujuan itu bisa berhasil itulah esensi dari politik *siyasi* itu”
(Rin, ibu rumah tangga)

Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa hubungan antara manusia dan politik bukan hanya rapat akan tetapi juga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kehidupan politik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menurut Ibnu Khaldun adalah suatu keharusan dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Pemahaman tentang politik ketika dikaitkan dengan posisi subyek penelitian sebagai perempuan, ternyata subyek memahami bahwa aktivitas politik tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, namun perempuan pun harus mengambil peran ini karena perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini tampak pada paparan Is :

“kalo pemahaman saya seperti tadi maka sesungguhnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam al-quran sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang beramal sholeh, siapa saja yang beriman, siapa saja yang taat kepada Allah, siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan maka dia mempunyai nilai di sisi Allah, sama, hanya mungkin saat sekarang ada hal-hal yang memang lebih khusus bagi perempuan, lebih banyak porsinya mendidik anaknya, bapaknya juga ada porsinya cuman lebih sedikit porsinya dibanding perempuan. *Ata* misalnya kaum perempuan ada hal-hal yang khusus, hal pendidikan-pendidikan remaja putri, mungkin kalo ditangani bapak-bapaknya kurang faham masalah haid, masalah *thaharoh* yang khusus perempuan seperti itu. Untuk amal sholeh ya silakan saja selama dia berniat melakukan kebaikan-kebaikan masyarakat ya dan itu sama laki-laki dan perempuan”
(Is, dokter)

Berangkat dari pemahaman bahwa politik adalah sebuah gerakan yang mengajak kepada kebaikan, maka menurut Is aktivitas ini adalah milik manusia. Artinya tidak ada perbedaan bahwa dunia mengajak orang lain kepada kebaikan hanya milik laki-laki atau perempuan saja. Sebagai legitimasi syar'i, Is menegaskan dengan sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih banyak melakukan amal sholeh, dan lebih taat. Konteks amal sholeh inilah yang dipahami Is sebagai aktivitas politik itu sendiri. Dengan adanya pernyataan seperti itu, maka yang seharusnya terjadi adalah adanya semangat dan keinginan dari laki-laki dan perempuan untuk berlomba dalam gerakan kebaikan ini.

Apa yang diungkapkan oleh Is tersebut didasari oleh pemahaman agamanya tentang hak dan kewajiban manusia. Aktivitasnya sebagai pembina bagi perempuan sangat membantu Is dalam mendata permasalahan perempuan sehingga Is menyadari betul perempuan harus terlibat dalam politik.

Is menambahkan ketika perempuan mengambil peran politik tersebut harus diingat bahwa ada wilayah-wilayah khusus yang mana perempuan harus lebih banyak terlibat di dalamnya. Hal ini bukan berarti peran ini akan menghalangi peran yang lainnya, namun di antara keduanya terdapat sebuah keterikatan. Artinya ketika peran khusus perempuan tersebut beres maka akan memperlancar peran yang lainnya. Is mencontohkan peran perempuan dalam mendidik anak yang porsinya lebih banyak daripada seorang laki-laki.

Melihat kehidupan sebagai sistem sosial, akan terlihat bahwa antara sistem yang satu dengan sistem lainnya saling terkait. Begitu pun islam memandang satu sistem tidak dapat dipisahkan oleh sistem yang lain. Keislaman sebuah sistem ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh islamisasi sistem politik dan seterusnya. Ketika politik dikaitkan dengan perempuan, maka tidak ada pembeda. Semuanya hanya tergantung masalah kesempatan. Hal ini bisa dilihat dari wawancara dengan Yen,

“pemahaman saya sebagai seorang muslimah yang memahami agama secara benar tidak ada pemisahan antara politik dengan ekonomi, tidak ada pemisahan antara politik dengan agama, tidak ada pemisahan antara politik dengan budaya, jadi politik itu justru adalah sebuah jalan e memperjuangkan hak hidup orang banyak dalam bidang ekonomi, sosial maka otomatis karena ini adalah sebuah upaya mengajak orang pada kebaikan. Siapapun orangnya adalah seorang politisi, termasuk perempuan sekalipun. Jadi dalam hal ini tidak ada pembeda e laki-laki adalah politisi, perempuan adalah rekannya politisi *gak* ada, jadi sama, *cuman* sekarang adalah masalah kesempatan. Kesempatan yg diberikan

oleh laki-laki *ato* kesempatan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri....”
(Yen, Aleg)

Menurut Yen, masalah kesempatan menjadi penyebab pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Konteks politik dalam hal ini adalah politik dalam dunia yang saat ini ditekuni Yen, yaitu sebagai Aleg. Ketika masyarakat lebih banyak memberikan kesempatan itu kepada perempuan atau sebaliknya, maka seperti realitas yang ada dunia politik hanya dipenuhi oleh salah satu jenis dari makhluk Allah ini. Akan tetapi prinsip yang dipegang Yen adalah setiap individu adalah politis ketika individu tersebut melakukan kebaikan. Hal ini berangkat dari pemahaman Yen tentang politik.

Berangkat dari pemahaman bahwa politik merupakan upaya mengajak kearah kebaikan, maka keterlibatan perempuan di bidang ini merupakan bentuk memanfaatkan kemampuan untuk melakukan perubahan yang lebih nyata dan lebih riil lagi. Sehingga nantinya usaha-usaha itu tidak hanya bermanfaat bagi keluarga perempuan saja, namun seluruh masyarakat bahkan tingkat negara.

Perempuan yang belum menikah pun memahami bahwa sangat penting bagi perempuan untuk memahami dan mengetahui persoalan politik. Karena ketika perempuan berada di posisi tersebut, maka perempuan akan mampu melakukan perubahan. Seperti dinyatakan oleh Im:

“saya pikir seorang perempuan itu mau tidak mau menurut saya seharusnya punya meskipun sedikit tapi tau paham tentang perkembangan seputar perpolitikan di indonesia. Karena mau tidak mau sebenarnya seorang perempuan itu mampu membawa perubahan ketika dia eksis seperti itu ya.”
(Im, PNS)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yen yang berprofesi sebagai Aleg,

“harus, harus memahami itu. Karena dengan pemahaman yang benar dia bisa memandang e lingkungan dengan benar dan punya inisiatif untuk melakukan perubahan walaupun perubahan itu tidak langsung dilakukan di lingkungan minimal dia melakukan perubahan di lingkungan keluarganya, pada anak-anaknya. Jadi itu suatu keharusan bagi seorang perempuan untuk mengetahui politik. Sehingga nanti tidak menjadi perempuan-perempuan yang, bagi saya ketika seorang perempuan memahami politik secara sederhana saja minimal dia sudah memahami bahwa dirinya berdaya. Jadi kalo ada seorang perempuan yang tidak memahami politik secara keseluruhan walaupun dia itu katakanlah seorang ilmuan, tapi tidak memahami bahwa dia itu punya kemampuan, punya hak, yang dilakukan karena kesadaran bukan tekanan, banyak kan *kalo* kita lihat perempuan-perempuan seperti itu ya, tapi karena dia tidak punya kesadaran akan diri mereka, tidak ada kesadaran politiknya, jadi politik dianggapnya gubernur yang memegang kekuasaan padahal bukan.”

(Yen, Aleg)

Keterlibatan perempuan dalam persoalan politik sangat penting. Yen memandang bahwa ketika perempuan mempunyai pemahaman yang benar tentang konsep politik, maka perempuan akan memandang lingkungannya dengan benar pula. Sehingga dari pemahaman ini akan tumbuh kesadaran untuk melakukan perubahan. Dalam sekup yang kecil, seperti lingkungan keluarga perempuan sangat berperan dalam melakukan perubahan.

Masih menurut Yen, tingkatan terkecil dari peran perempuan dalam bidang politik adalah ketika perempuan menyadari bahwa dirinya berdaya. Contoh lain yang terjadi jika perempuan tidak memahami politik secara menyeluruh adalah pemahaman bahwa dunia politik hanya seputar jabatan di gubernur sehingga perempuan merasa itu adalah dunia yang sulit, keras dan tidak mampu diperankan oleh perempuan.

IV.2 Kekuasaan

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara dari presiden hingga kepala desa, atau

bahkan kepala rukun tetangga. Semua itu tertuju pada otoritas. Surbakti mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Foucault mengembangkan konsep kekuasaan sebagai penolakan terhadap gagasan negara top down yang tradisional dan gagasan bahwa kekuasaan pada umumnya represif. Baginya kekuasaan lebih banyak disebar dan yang fundamental terletak pada pengetahuan. Konsekuensi negara bukanlah tempat kekuasaan yang utama, melainkan tidak lebih dari institusi dan wacana dominan menertibkan, menghukum, dan menggerakkan seseorang. Dengan kata lain, negara bukanlah produk dari kelas dominan

Dalam mewacanakan kekuasaan, subyek penelitian sudah terlihat memahami konsep kekuasaan, misalnya seperti yang terlihat dari ungkapan Im, alumni fakultas Ekonomi di bawah ini,

“kekuasaan yang jelas power, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan dengan yang dimilikinya itu dia mampu untuk mengendalikan sesuatu yang ada dibawahnya”
(Im, PNS)

Pemahaman Im di atas merupakan konsep kekuasaan yang secara umum dipahami oleh masyarakat. Sebagai perempuan yang suka mengikuti perkembangan politik, istilah-istilah seperti itu bukan hal yang sulit ditemukan dalam bahasan-bahasan politik.

Seorang perempuan yang langsung terjun di dunia kekuasaan akan mewacanakan kekuasaan secara berbeda pula. Yen menilai bahwa, nilai dari sebuah kekuasaan terletak pada pengelolaan kekuasaan itu sendiri. Ini artinya

kekuasaan akan bernilai baik ketika seseorang yang memiliki kekuasaan menjadikan kekuasaan itu sebagai peluang untuk berbuat baik. Sedangkan kekuasaan akan bernilai buruk ketika pemegang kekuasaan itu justru menjadikan kekuasaan itu sebagai legalitas sebuah keburukan. Seperti yang di paparkan oleh seorang Aleg di bawah ini,

"kekuasaan itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan buat saya. Karena saya telah berpegang pada hadis Rosulullah, ketika Abu Dzar mengatakan ya Rosulullah berikanlah kepadaku kekuasaan sebagai gubernur salah satu daerah. Di kejar terus sama Abu dzar, kemudian dikatakanlah oleh Rosulullah wahai abu dzar kekuasaan itu berat, dan kalo engkau mencari kekuasaan maka engkau akan direpotkan karenanya. Tapi kalo engkau didukung oleh komunitas untuk mengemban kekuasaan maka engkau akan dibantu karenanya. Jadi kekuasaan itu berat sekali, letih, capek, makanya itu kalo saya harus hindari. Nah sekarang *cuman* permasalahannya adalah ketika seseorang sudah menguasai kekuasaan dia punya dua peluang, mau dia pegang kekuasaan itu dengan nilai-nilai kebaikan *ato* mau diaduk-aduk dengan nilai keburukan. Kembali pada dua pilihan tadi. Jadi kita bisa menguasai sebuah posisi katakanlah sebuah kekuasaan manakala kita punya *grand design* besar untuk melakukan perubahan kebaikan. Saya acung jempol, saya akan dukung seperti itu. Tapi ketika seseorang mencari kekuasaan hanya untuk melegalkan sebuah keburukannya tadi sama saja dengan kehinaan. Dalam hal ini tinggal bagaimana cara pandang itu aja"

(Yen, Aleg)

Pemaparan Yen di atas menegaskan bahwa ketika orang meminta sebuah jabatan yang dalam konteks ini sebuah kekuasaan, maka itu adalah sangat menghinakan. Kata menjijikkan dipakai untuk lebih mempertegas makna negatif kekuasaan. Tetapi jika seseorang diberi kepercayaan oleh orang lain untuk menjalankan kekuasaan itu, Yen memandang hal itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Dengan tegas Yen menyatakan bahwa ketika kekuasaan dipakai sebagai sarana untuk melakukan sebuah perubahan dengan berpedang pada *grand design*

besar, maka Yen akan mendukungnya. Misi Yen sebagai anggota dewan sangat terlihat dari ungkapannya di atas.

Aktualisasi nilai-nilai kebaikan untuk mengadakan sebuah perubahan hanya akan terlaksana manakala seseorang memiliki otoritas. Ibnu Taimiyah menyinggung masalah ini ketika membahas urgensi sebuah kekuasaan dan otoritas dalam pelaksanaan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Ibnu Taimiyah menegaskan :

"Tugas *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa kekuasaan dan otoritas" ('amal siyasi, Abu Ridho, 2004)

Bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak akan dapat ditegakkan. Konsep seperti inilah yang berhasil peneliti tangkap dari hasil wawancara dengan Is,

"Apabila kita ingin menegakkan islam pada saat sekarang itu memang mau tidak mau dengan kekuatan. Nah karena dengan kekuatan itu salah satunya dengan menguasai parlemen, menguasai eksekutif, maka disinilah jalan dakwah itu harus ditempuh. Bagaimana kita memenangkan pemilu-pemilu legislative, pemilu-pemilu pilkada itu termasuk memenangkan islam. Karena memang salah satu targetnya adalah memenangkan kebenaran itu."
(Is, dokter)

Sebagai orang yang telah lama terlibat di partai, membuat Is cukup menguasai memahami kekuasaan. Apalagi Is juga sering terlibat di agenda-agenda strategis partai.

Berbeda dengan Rin. Rin menilai kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab. Ini sebagai konsekuensi adanya interaksi yang melahirkan kekuasaan. Sebagai tanggung jawab, maka kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dalam menentukan nasib berjuta-juta orang. Seperti paparan Rin sebagai ibu rumah tangga di bawah ini,

“makna kekuasaan bagaimana ketika kita diberi kemampuan untuk membuat keputusan benar-benar sesuai dengan sang pemberi kekuasaan itu dan kita memahami bahwa yang memberi kekuasaan tidak lain adalah masyarakat yang menitipkan berbagai kepentingannya kepada kita. *kalo* dibatasi adalah sebuah amanah karena di dalam amanah itu kita dititipi apa namanya, otoritas untuk bisa membuat kebijakan, untuk bisa memaksakan sebuah kehendak itu”
(Rin, ibu rumah tangga)

Apa yang diungkapkan oleh Rin di atas sejalan dengan pernyataan Yen sebagai seorang Aleg. Kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab dari pihak yang telah memberi kepercayaan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan kekuasaan, seseorang termasuk di dalamnya perempuan menitipkan kepentingan-kepentingannya, sehingga pihak yang dititipi ini harus merealisasikan hal itu. Dalam konteks pemerintahan realisasi itu dalam bentuk kebijakan.

Konsep yang diwacanakan oleh Rin diatas, tidak terlepas dari pemahaman Rin tentang sebuah amanah. Kekuasaan adalah sebuah amanah dari masyarakat.

Kaitan antara kepemimpinan dan kekuasaan di satu pihak serta sifat-sifat kemuliaan di lain pihak adalah suatu hal yang sangat sentral dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Kepemimpinan hanya akan dimiliki oleh satu keluarga, yaitu keluarga yang memiliki solidaritas yang lebih kuat dibandingkan dengan keluarga

lain. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan antara kekuasaan dan moral

Sejalan dengan Ibnu Khaldun di atas, Is memahami kekuasaan identik dengan kepemimpinan,

“kekuasaan secara umum ato. sebenarnya dalam islam itu yang ada kepemimpinan bukan kekuasaan dan sesungguhnya dalam islam kepemimpinan kenapa karena seseorang yang menjadi pemimpin itu yang mampu mengarahkan rakyatnya pada suatu kebenaran”
(Is, dokter)

Ketika seseorang memegang kekuasaan sebenarnya pada saat itu orang tersebut sedang memegang kepemimpinan. Hal ini bisa dilihat ketika seseorang berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Is mengaitkan antara pemimpin yang mengajak rakyatnya kepada kebenaran adalah sebuah kepemimpinan.

Ketika subyek yang berumur paling muda memahami kekuasaan, kekuasaan dipahami sebagai tanggung jawab sekecil apapun kekuasaan itu. Menurut Syarbaini, dkk (2002: 48) kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar dan kompleks.

“kekuasaan itu sebenarnya sejalan juga, maksudnya ya sarana, dengan kekuasaan jalan kita atau gerak kita lebih leluasa. Lebih mudah walaupun amanah itu tidak besar, tanggung jawab besar. Kekuasaan sama dengan tanggung jawab dan keluasaan bergerak”
(Prim, mahasiswa)

Hal yang sama juga diberikan oleh Ibnu Khaldun. Menurutnya kekuasaan pada hakikatnya terdapat dalam setiap hubungan yang ada dalam masyarakat. Tingkat paling tinggi dalam pendapat Ibnu Khaldun adalah tingkat negara. Setelah itu baru kekuasaan yang meliputi sebagian daerah atau wilayah negara.

Demikian seterusnya, sampai kepada bentuk kekuasaan yang terkecil yang terdapat dalam masyarakat. Seperti kutipan wawancara di bawah ini :

“dan sebenarnya kaitan antara buruh dan majikan itu juga kekuasaan kan... kaitan antara kepemimpinan di keluarga itu juga kekuasaan, jadi kekuasaan itu bermakna luas”
(Er, aktivis)

Pemahaman bahwa kekuasaan luas menurut Er, adalah adanya hubungan dan interaksi. Sehingga kekuasaan akan selalu ada dalam sisi kehidupan manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman Er tentang politik.

Ketika kekuasaan dikaitkan dengan perempuan, Er menjawab perempuan boleh memegang kekuasaan. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep politik yang dipahami. Artinya kekuasaan disini tidak harus dalam ranah legislatif, atau dunia parlemen. Namun setiap peran yang dilakukan oleh perempuan itulah sebenarnya letak kekuasaan perempuan. Er mengawali dengan bahasa seperti ini,

“Kekuasaan itu bisa diartikan secara luas. Jadi perempuan pun bisa mengambil kekuasaan dimana dia berperan. Jadi saat dia berperan di legislative ya *monggo*. Kalo aktif di LSM ya disitu, itu juga termasuk lembaga politik bisa dikatakan seperti itu. Seorang wanita mengambil peran disitu. *Kalo* aktivitasnya mengajar dia bisa berperan disitu, itu juga peran-peran politis. Seperti itu.”
(Er, aktivis)

Er memahami bahwa peran perempuan dalam bentuk apapun adalah bernilai politis. Konsekwensinya adalah setiap peran yang dilakukan oleh perempuan disitulah letak kekuasaan perempuan.

Sebagai orang yang terlibat dalam struktural partai, Rin memahami bahwa kekuasaan memiliki hubungan dengan politik, maka bagi perempuan hal itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Seperti ungkapan Rin,

“jadi *kalo*, ini mungkin ada kaitannya dengan bagaimana politik. Jadi ketika kita sudah mengetahui bagaimana seharusnya e mengelola *ato* mencapai tujuan itu tanpa adanya bekal kekuasaan itu mungkin politik itu jauh e apa namanya lebih bisa kita realisasikan. Jadi kekuasaan disini mungkin adalah bekal yang membuat kita bisa lebih berbuat, dalam kiprah politik kita”
(Rin, ibu rumah tangga)

Konsep politik yang tidak bisa dipisahkan dari konsep kekuasaan, menurut Rin akan berpengaruh pada tindakan seseorang. Dalam konteks ini ketika seseorang termasuk perempuan sudah memahami politik secara benar maka perempuan tersebut akan mengetahui bagaimana mengelola sebuah tujuan sehingga kekuasaan dipakai sebagai sarana untuk lebih memudahkan terealisasinya tujuan itu. Dalam bahasa Rin, kekuasaan adalah bekal yang membuat seorang perempuan lebih bisa berbuat dalam bidang politik.

Hal yang cukup menarik ketika Yen sebagai anggota dewan memaparkan mengenai perempuan yang memegang kekuasaan. Kekuasaan dilihat dari konteks legislatif atau dunia parlemen. Data yang berhasil peneliti peroleh menyebutkan bahwa,

“*kalo* saya pribadi melihatnya itu peluang itu ada, kesempatan itu ada, cuman sekarang itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan ketika di tempat itu sudah *gak* ada lagi laki-laki yang punya kemampuan. *Gak* ada lagi laki-laki yang punya kapasitas, ya itu misalkan laki-laki itu idiot semua (tertawa). *masak* suruh laki-laki yang mimpin. Tapi *kalo* masih ada laki-laki 1 laki-laki yang kuat, laki-laki yang amanah meskipun *gak* cerdas, perempuan jadi kabinet *gak* masalah. Tiunggal itu masalah pilihan. *Cuman* jangan itu dijadikan sebagai sebuah legitimasi untuk menghancurkan hak-hak perempuan. Jadi biarkan itu semua mengalir, bahwa perempuan pun punya kesempatan *cuman* lagi-lagi itu kembali pada masalah pilihan dan yang kedua *kalo* saya pribadi tadi pilihan saya manakala di sana ada laki-laki yang kuat, amanah, walaupun tidak cerdas *insyAllah* saya pilih dia jadi pemimpin, perempuan yang cerdas di belakangnya. Itu pilihan saya karena mau tidak mau dia masih ada dunia perasaan yang tadi. Ketika suatu saat mau perang *trus* perasaannya lain-lain padahal seorang pemimpin itu juga pemimpin perang, jadi ini saya masih agak condong pada pilihan laki-laki”

(Yen, Aleg)

Wacana di atas adalah wacana dari seorang perempuan yang sekarang duduk di DPRD Kota Surabaya. Sebagai orang yang terjun langsung di ranah politik sesungguhnya, apa yang dirasakan, dilihat, diamati, dan dialami mengenai perempuan yang memegang kekuasaan di tingkat legislatif sangat terlihat dari ucapannya. Bagi Yen, kekuasaan di legislatif merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karenanya, hal ini menjadi pilihan bagi perempuan ketika sudah tidak ada laki-laki yang mempunyai kemampuan dan kapasitas. Dalam hal ini termasuk kesiapan perempuan dalam persoalan perang.

Masalah kapasitas dan kapabilitas menjadi unsur penting bagi perempuan yang memegang kekuasaan. Ungkapan yang cukup menarik dapat dilihat dari Is sebagai orang yang cukup intens berinteraksi dengan perempuan dan pernah menjadi caleg dari salah satu partai,

“sekarang saya pikir itu kapasitas dan kapabilitas. Jadi bukan kita pukul rata bisa tidaknya. Kapasitas dan kapabilitas orangnya itu gitu. Kita membandingkannya siapa dengan siapa perempuan misal perempuan jenius kuat dibandingkan dengan laki-laki yang dalam tanda petik *memble* tentunya kan bisa yang perempuan itu. Jadi ini saya pikir kapasitas dan kapabilitas. Jadi *kalo* pun toh perempuan itu dicalonkan itu memang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam kepemimpinan tersebut”
(Is, dokter)

Kapasitas dan kapabilitas perempuan sangat diperlukan ketika memegang kekuasaan. Apalagi kekuasaan di tingkat legislatif. Bagi Is, hal ini mengingat dunia legislatif bukan dunia yang main-main melainkan dunia yang menyangkut hajat dan persoalan masyarakat secara umum. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya haruslah orang-orang yang kapabel.

Perempuan sebagai bagian dari unsur masyarakat tidak bisa terlepas dari kewajiban-kewajibannya. Perempuan harus peduli dengan persoalan di luar keluarganya. Hal ini sangat mungkin akan berkaitan pula dengan pemenuhan hak-haknya. Pernyataan diatas akan menjadi sebuah jawaban manakala subyek penelitian ini diberikan pertanyaan mengenai pentingnya perempuan memahami dan menguasai persoalan kekuasaan. Seperti yang disebutkan oleh salah seorang Aleg,

“masalah seberapa penting saya pikir bukan berarti melulu 100% kita menyediakan waktu kesana tidak, minimal kita tetap seorang perempuan itu mempunyai kesadaran politik saja itu sudah sangat bagus. Tidak harus masuk kesana, lebih baik kita lebih utama menyiapkan prinsip-prinsip kemanusiaan secara utuh, menguasai persoalan itu sudah cukup saya rasa”
(Yen, Aleg)

Bentuk kepedulian perempuan dalam persoalan politik tidak harus menyediakan seluruh waktunya untuk terjun di dunia politik yang sesungguhnya. Namun peran perempuan dalam bidang lainnya, misalnya bidang sosial merupakan nilai lebih bagi kiprah perempuan itu sendiri.

Hal yang sama diwacanakan dengan bahasa yang berbeda, yakni:

“sangat penting. Ya, karena berkaitan dengan hajat hidup perempuan itu sendiri. Jadi *kalo* dia tidak tau masalah politik maka dia nanti akan tidak merasa hak-haknya banyak dikebiri *gitu* hak-haknya akan banyak direduksi. Jadi dia harus banyak tau, banyak membaca, banyak melihat politik-politik yang ada itu.”
(Is, dokter)

Titik tekan wacana di atas adalah bahwa pentingnya perempuan mengetahui persoalan politik untuk kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri. Pernyataan Is ini berdasarkan realita di masyarakat yang seringkali hak-hak dan kepentingan perempuan masih dinomorduakan. Kondisi ini semakin

menyedihkan ketika perempuan sebagai obyek dari kebijakan negara tersebut tidak peduli dengan kepentingannya sendiri.

IV.3 Negara

Banyak ahli dalam ilmu negara memberikan definisi tentang teori, antara lain menurut Socrates dalam Ilmu Negara karangan Abu Daud Busroh,

Semua manusia menginginkan kehidupan aman, tentram dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu orang-orang mendambakan ketentraman menuju bukit dan membangun benteng, serta mereka berkumpul disana menjadi kelompok yang dinamakan polis (satu kota saja). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Socrates menganggap polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. (Masyarakat dan Negara, I. Basis Susilo)

Menurut plato, negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara.

Dalam penelitian ini, subyek yang tidak terlibat di struktur partai memahami negara sebagai kerjasama untuk memenuhi kebutuhan. Seperti ungkapan Prim di bawah ini,

“Negara-negara itu saling kerjasama untuk memenuhi kebutuhan”
(Prim, Mahasiswa)

Penekanan yang berbeda diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa dalam mendirikan sebuah negara peranan solidaritas sangat menentukan. Solidaritas itu pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong-menolong yang erat dalam suatu kelompok manusia dalam bentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok solidaritas itu masing-masing bukan saja bantu-membantu dan tolong-menolong,

akan tetapi juga bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan kelompok itu serta para anggotanya.

Ketika negara dipahami oleh perempuan yang terlibat di organisasi ekstra kampus, negara adalah wilayah yang digunakan sebagai legalitas kekuasaan. Undang-Undang dipakai sebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan. Berikut hasil wawancara dengan Er,

“Negara adalah suatu wilayah, yang disitu digunakan untuk melegalkan suatu kekuasaan”
(Er, aktivis)

Unsur-unsur negara yaitu hal-hal yang menjadikan negara itu ada (elemen daripada negara). Ada tiga sudut pandangan. Pertama meninjau unsur-unsur negara secara klasik atau tradisional, meliputi wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintahan berdaulat.

Rin, memandang negara dengan konsep seperti ini, yakni:

“secara sederhana mungkin ketika mendengar kata Negara adalah sebuah batasan otoritas, batas kewilayahan yang merupakan batas otoritas suatu pemerintahan. Yang didalamnya ada warga Negara yang *ato* penduduk yang mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan. Mungkin seperti itu *dek*, batasan Negara”
(Rin, ibu rumah tangga)

Apa yang diungkapkan oleh Rin di atas tidak bisa terlepas dari latar pendidikannya yang langsung berhubungan dengan masalah negara.

Pandangan yang kedua meninjau unsur-unsur negara secara yuridis, terdiri atas wilayah hukum, subyek hukum, dan hubungan hukum. Ketiga meninjau unsur-unsur negara secara sosiologis terdiri atas, faktor sosial, dan faktor alam. Faktor sosial meliputi unsur masyarakat, unsur ekonomis, dan unsur kultural. Sedangkan faktor alam meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa.

Berbeda dengan Rin, sebagai orang yang tidak terlibat dalam partai Im memahami negara dengan konteks yuridis, yang mana dalam negara ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Bisa dilihat dari pemaparan Im di bawah ini,

“negara yang jelas disitu ada unsur pemerintah, ada unsur rakyat, dan ada unsur UU *ato* hukum yang berlaku. Itu yang saya tau”
(Im, PNS)

Apa yang diungkapkan oleh Im di atas merupakan sesuatu yang didapat dari pengamatannya selama ini, bahwa negara mengandung unsur rakyat, unsur UU, dan hukum yang berlaku. Pendefinisian tersebut juga merupakan hasil belajarnya selama di bangku sekolah meskipun ketika kuliah Im tidak mengambil jurusan yang langsung berhubungan dengan masalah negara.

Yen memahami Negara secara lebih luas. Termasuk di dalamnya masalah pengkoordinasian, pemantauan, serta kemudahan-kemudahan dari negara. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan Yen,

“pemahaman saya negara itu adalah sebuah batasan daerah saja *kalo* kita perhatikan di dalam agama sendiri tidak ada istilah negara, maksudnya dalam artian gini yang ada adalah *daulah*. *Cuman* ya sekarang itu negara adalah batasan-batasan tempat, itu adalah sebuah pengaturan kehidupan, tentang koordinasinya, kemudahan-kemudahan tugas, pemantauan dan segala *macem*”
(Yen, Aleg)

Konsep *daulah* yang disebutkan oleh Yen merupakan wacana seorang yang mempelajari konsep negara dalam konteks agama. Negara yang dikatakan oleh Yen sebagai *daulah*, sama dengan kosakata yang dipakai oleh Ibnu Khaldun. Dalam kosakata Ibnu Khaldun, kata-kata baik untuk “dinasti maupun untuk “negara” adalah *daulah*, meskipun gagasan “negara” itu kadang-kadang juga menemukan pengertian yang mirip dalam penggunaan istilah *amr* dan *kalimah*.

Konteks negara ketika dikaitkan dengan perempuan, subyek menilai bahwa perempuan memiliki posisi yang sama. Hanya masalah peran yang berbeda. Seperti ungkapan singkat Prim,

“posisi perempuan ya pastinya sederajat, laki-laki dan perempuan sederajat mungkin perannya beda-beda”
(Prim, mahasiswa)

Menurut Prim, peran perempuan di domestik atau peran laki-laki di publik seperti yang di pahami oleh masyarakat, adalah sama. Artinya perbedaan peran ini tidak menjadikan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks negara. Hal ini tidak bisa terlepas dari lingkungan Prim yang selalu memberikan kebebasan laki-laki dan perempuan dalam melakukan peran, terbukti ketika Prim pernah menjadi ketua Jurnalistik di SMU nya.

Rin mengungkapkan dengan pembahasan yang berbeda. Sebagai orang yang mempunyai interaksi cukup intensif dengan perempuan, Rin sangat memahami realitas bahwa perempuan kurang terlibat dalam persoalan negara. Sehingga terkait dengan keberadaan seorang perempuan di suatu negara, maka menurut Rin perempuan adalah objek dari pemberlakuan peraturan negara. Konsekwensi dari hal ini adalah perempuan dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini,

“paling tidak ya dia mempunyai hak yang sama terkait dengan Negara itu adalah sebuah wilayah teritorial dimana disitu peraturan berlaku maka *kalo* dikaitkan tentang Negara dan perempuan itu sesungguhnya perempuan itu merupakan obyek pemberlakuan peraturan dari Negara itu. diantaranya yang paling jelas adalah bagaimana dia bisa tetap mempertahankan Negara itu. E. memastikan bahwa ketika dia berada di Negara itu terjamin terhadap hak-hak pribadinya. Itu mungkin kewajiban utama seorang warga Negara, jadi memastikan ketika dia berada disitu negaranya itu bisa melindungi hak -hak dia.”
(Rin, ibu rumah tangga)

Masih menurut Rin, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam negara. Konsekwensi dari hal itu adalah bahwa perempuan berkewajiban untuk mempertahankan negaranya termasuk di dalamnya mempertahankan dan melindungi hak-hak perempuan. Bagi Rin kepedulian perempuan dalam negara minimal untuk kepentingan perempuan itu sendiri.

Berbeda dengan apa yang diwacanakan oleh Im, meskipun Im belum berkeluarga namun Im memahami bahwa peran seorang perempuan di lingkungan keluarga juga termasuk bentuk kepedulian perempuan terhadap negara. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan peran seorang perempuan dalam mendidik anak-anak mereka. Artinya dari keluarga inilah nantinya akan dilahirkan sosok penerus bangsa. Seperti yang diucapkan oleh Im di bawah ini,

“karena syarat sebuah negara adalah memiliki rakyat dan rakyat terus terang Indonesia sebagian besar perempuan ya, saya *gak* tau populasi sekarang seperti apa e otomatis negara itu apa ya otomatis berdiri juga karena perempuan juga. Kan ada ya dalam konteks islam gini seorang ibu itu adalah tiang negara karena dialah yang melahirkan generasi yang jelas jadi bagaimana dia membentuk generasi itulah yang nantinya akan membentuk negara seperti apa”
(Im, PNS)

Seorang dokter memandang pentingnya keterlibatan perempuan dalam persoalan negara terutama jika hal ini dikaitkan dengan penyelesaian masalah perempuan itu sendiri. Lebih lanjut Is mencotuhkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan perempuan dan bayi. Hal ini tidak jauh dari aktivitas Is sebagai dokter. Is memahami bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan secara otomatis harus berperan dalam rangka urusan negaranya. Berangkat dari konsep inilah Is menilai bahwa perempuan harus peduli terhadap

persoalan negara dan memahaminya merupakan sesuatu yang sangat penting.

Petikan wawancara seperti yang diungkapkan oleh Is,

“sangat penting, begini contohnya beberapa waktu yang lalu ada UU yang UU kesehatan ya tentang apa tentang legalisasi aborsi gitu. Inikan harus diketahui. Karena apa *kalo* tidak diketahui maka aborsi itu akan kemana-mana. Apa realisasinya zina mudah siapa yang dirugikan ya perempuan. Karena aborsi itu tidak hanya mengeluarkan si janin tapi efeknya itu sangat banyak. Bisa pendarahan, bisa infeksi, ya bisa *macem-macem*. Nah kan harus diketahui, *gitu*. Supaya apa supaya UU itu tidak jadi digoalkan. Sehingga sangat perlu untuk sosialisasi-sosialisasi seperti itu”
(Is, dokter)

Pentingnya perempuan mengetahui dan memahami persoalan negara terkait dengan masih banyaknya persoalan perempuan yang memerlukan penyelesaian secara khusus oleh perempuan itu sendiri juga dipahami oleh Rin yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Menurut Rin inilah arti penting keterlibatan perempuan dalam persoalan negara. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara di bawah ini,

“O. sangat penting sekali karena sesungguhnya banyak permasalahan Negara ini kan tidak apa namanya e. tidak melulu persoalan laki-laki saja. Ada persoalan-persoalan Negara itu yang justru seorang perempuan yg harus paham, justru harus lebih depan di dalam e menanggapi karena mungkin permasalahan yang sangat berkaitan dengan sifat *ato* ciri khas wanita itu sendiri. Misalnya saja masalah aborsi, masalah kesehatan reproduksi, misalnya saja masalah perlindungan anak yang jauh lebih tau itu wanita. Sehingga ketika perempuan itu tau persoalan Negara maka dia tentu tau harus berbuat apa. Dia yan lebih tau sejauh mana akan menjamin kelangsungan *ato* terselesainya masalah-masalah itu.
(Rin, ibu rumah tangga)

IV.4 Pengambilan Keputusan

Definisi pengambilan keputusan, bahwa pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Hasil keputusan tersebut dapat

merupakan pernyataan yang disetujui antar alternatif atau antar prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Ketika pengambilan keputusan dikaitkan dengan posisi seorang perempuan, maka hal ini berarti membicarakan masalah keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Prim memahami bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Seperti ungkapan Prim di bawah ini,

“saya sih *gak* ada bedanya.maksudnya perempuan dengan pengambilan keputusan ya sama dengan laki-laki dan pengambilan keputusan. Yang penting kan musyawarahnya, mufakatnya.”
(Prim, mahasiswa)

Lingkungan organisasi yang ditekuni oleh Prim sangat membantu Prim memahami bahwa tidak perbedaan laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, karena hal itu selalu menggunakan mekanisme *syuro* atau musyawarah.

Seorang ibu rumah tangga lebih memperjelas mengenai pemahaman diatas, yakni

“seperti yang saya katakan di depan tadi apa namanya sama jadi kewajibannya sama dan haknya pun sama pula terutama dalam hal terkait dengan posisinya sebagai warga Negara. Disini berarti ada kewajibannya ketika Negara itu e apa namanya e terkait dengan itu dalam hal pengambilan keputusan sekecil apapun, apakah itu di rapat-rapat organisasi lebih-lebih rapat-rapat yang akan menentukan kebijakan Negara saya rasa posisi perempuan itu sama. Sama satu suara, satu pikiran, sama saya kira sama. Karena sesungguhnya setiap orang dikaruniai Allah buah pikiran yang berbeda satu sama lain. Ya bukan tidak mungkin dari perempuan itu ketika permasalahan itu lebih dekat dengan dia dan dia lebih tau, sehingga suaranya pun apa namanya bisa dipastikan tidak kalah dengan suara-suara laki-laki”
(Rin, ibu rumah tangga)

Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, menurut Rin hal tersebut diatas bukannya tanpa adanya

persyaratan. Perempuan yang terlibat dalam hal ini haruslah memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai orang yang menanggung sebuah tanggung jawab. Uraian panjang akan menjawab pernyataan ini,

“e mungkin ada beberapa hal ya, yang pertama itu mungkin karena orang-orang yang bertugas mengambil keputusan itu mempunyai kewajiban memahami konsekuensi yang akan timbul dari adanya sebuah keputusan maka dia dituntut orang yang paham permasalahan yang ada di lapangan seperti itu, sehingga pertama masalah kapabilitas perempuan itu harus benar-benar diperhatikan, kapabilitas ini terkait banyak hal apakah kapabilitas secara keilmuan, kapabilitas secara manajerial, *ato* kapabilitas secara emosional seperti itu. Dan itu harus dimiliki oleh seorang perempuan. *gak* bisa bayangkan ketika seorang perempuan yang terlibat di forum pengambilan keputusan mempunyai emosi yang begitu labilnya, e apa, *pressure* yang dia peroleh dari sebuah forum bisa jadi dia bawa ke dalam keluarga. sehingga justru jadi permasalahan baru dalam keluarga itu sendiri. Makanya itu dituntut orang-orang yang mempunyai kewibawaan emosional, pandai memilah permasalahan, kapabilitas emosional, kapabilitas keilmuan, *trus* kredibel, dia paham permasalahan yang ada di lapangan berikut konsekuensi-konsekuensi yang timbul ketika kebijakan itu harus diturunkan. Kemudian kapabilitas manajerial, dia harus pandai e apa namanya *memenej* segala bentuk apa hubungan antar manusia. Kapabilitas manajerial itu tidak lepas dari unsur”
(Rin, ibu rumah tangga)

Sebagai pencetus kebijakan atau pengambil keputusan, maka yang terlibat dalam proses itu adalah dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat. Tak terkecuali seorang perempuan. Dalam hal ini Rin masih menambahkan persyaratan bagi perempuan yang terlibat di proses pengambilan keputusan.

Wawancara yang berhasil peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

“e yang terpenting adalah konsistensi dia sendiri, jangan sampai dia mampu menjadi orang yang e ikut serta dalam pencetus sebuah kebijakan tapi ternyata dia sendiri tidak mempunyai komitmen melaksanakan kebijakan itu. Dan mungkin disini yang ingin saya tambahkan adalah e sikap kritis seorang perempuan itu *lho*, jadi seringkali dalam pengambilan keputusan bukan seringkali ada terlihat beberapa kejadian itu e.. kemampuan berbicara seorang perempuan itu kan terkadang terbatas, *ato* malah justru grogi *gitu lho* dik, sehingga justru disitu ketika dia harus diwajibkan menyampaikan pendapat malah tidak bersuara. Sehingga disini mungkin sikap kritis seorang perempuan harus tetap diingat dalam proses pengambilan keputusan”

(Rin, ibu rumah tangga)

Ungkapan panjang Rin di atas merupakan hasil pengamatan Rin yang saat ini memegang amanah di ketua Bidang kewanitaan salah satu partai, sehingga Rin seolah paham betul mengenai permasalahan perempuan ketika berada di forum-forum pengambilan keputusan.

Pada sisi lain, adalah kenyataan bahwa kepentingan-kepentingan perempuan di negeri ini masih terpinggirkan. Pertama masalah kesehatan. Diantara persoalan kesehatan yang dihadapi perempuan adalah tingginya angka kematian ibu hamil karena melahirkan.

Data kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan²² menunjukkan bahwa, pada tahun 2003 angka kematian ibu mencapai 307 dari 100.000 kelahiran. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia, dan Singapura, bahkan Filipina. Persoalan kesehatan lain yang dihadapi perempuan adalah penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS.

Perempuan merupakan kelompok masyarakat paling rentan tertular penyakit menular seksual. Persoalan kesehatan lain adalah kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menyikapi tentang pengambilan keputusan dengan kepentingan perempuan, subyek penelitian menjawab dengan jawaban yang bervariasi. Masing-masing yang diwacanakan memperlihatkan unsur-unsur yang memiliki keunikan. Seperti yang diungkapkan oleh Rin,

“Belum, karena ketika di dalam sebuah pertemuan atau apa ya forum pengambilan kebijakan representasi perempuan itu sendiri sangat kurang. Sehingga sekalipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa

²² Pilkada dan Agenda Politik Perempuan di Daerah, Nur Hasyim

permasalahan perempuan itu pun ikut dibahas oleh selain perempuan, tetapi ketika perempuan-perempuan itu e.apa namanya tidak dalam porsi yang cukup, kurang bisa mewakili banyak kepentingan-kepentingan. Itu saya rasakan sekali saat ini”
(Rin, ibu rumah tangga)

Wacana Rin di atas merupakan sesuatu yang benar-benar Rin rasakan saat ini. Aktivitas Rin yang selalu terlibat di forum-forum perempuan membantu Rin memahami bagaimana kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana: jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, dan banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Dalam penelitian ini, konteks tersebut terlihat ketika Prim memberikan jawaban yang menggambarkan latar belakang pendidikannya. Seperti ungkapan Prim mengenai keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, yakni

“masalahnya saya *gak* tau kebijakan pak Bambang, jadi justru ini perlunya perempuan duduk di parlemen, bisa menyalurkan kepentingan-kepentingan perempuan seperti itu”
(Prim, mahasiswa)

Jawaban yang diucapkan oleh Prim di atas merupakan produk dari wacana seorang mahasiswa semester 3 yang mengambil jurusan kedokteran umum. Usia kuliah yang cukup muda memungkinkan Prim saat ini masih terfokus di aktivitas kampus, sehingga belum terpikir untuk mengikuti perkembangan di tingkat kota.

Berbeda dengan Er yang usianya lebih tua dari Prim, menurut Er mengenai kepentingan perempuan sudah terwakili atau belum terwakili dalam proses pengambilan keputusan, Er hanya menjelaskan bahwa peluang-peluang

kearah keterwakilan itu ada ketika perempuan ikut terlibat dalam proses tersebut.

Seperti petikan hasil wawancara berikut ini,

“dalam sekup nasional, jadi kemarin itu ada satu kabar yang mengatakan bahwa yang terkait dengan kepentingan perempuan jikalau itu.., misalkan tentang aborsi kenapa *kok* UU aborsi itu akhirnya *goal* kan, itu juga terkait dengan kepentingan politik disitu, jadi *kalo* dalam kepentingan nasional itu mesti dinilai secara politis, jadi tidak terlalu dibedakan antara kepentingan perempuan ato *ndak*, keputusan itu tapi kepentingan politik karena orang-orang yang di dewan itu membawa misi-misi politik partainya UU perlindungan eh.. kemarin itu yang di DPRD itu ya.. perlindungan wanita ato rumah tangga itu juga *goal* ya karena peran dari LSM juga itu. Nah itu juga karena peran perempuan UU perlindungan akhirnya *goal* jadi Perda. Ya.. jadi selama ini walopun wanita bisa memperjuangkan dan suara wanita itu harus massif *Inshaallah* akan jadi suatu pertimbangan. jadi sekali lagi itu terkait dengan kepentingan partai”
(Er, aktivis)

Sebagai orang yang terlibat aktif di organisasi kepemudaan, Er cukup paham mengenai perkembangan kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah aktivitas Er yang seringkali berkaitan dengan forum-forum diskusi dan penggagas ide yang besentuhan dengan permasalahan kota Surabaya.

Rin memperlengkap jawaban atas belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan disebabkan oleh kurangnya kapabilitas perempuan sehingga hal ini berdampak pada sedikitnya perempuan yang memberikan porsi perhatian terhadap forum pengambil keputusan. Jawaban yang mewakili pernyataan di atas adalah sebagai berikut,

“ya, jadi memang banyak factor ya, e tidak tercukupinya representasi perempuan itu. Kalo permasalahannya lebih umum, kurangnya keterwakilan perempuan itu mungkin karena e porsi perhatian terhadap forum pengambil kebijakan itu kurang, sehingga dia menganggap *wes gak usah* hadir *wes* cukup ibu ini saja, bisa jadi. Bisa jadi karena kurangnya kapabilitas perempuan. Ato bisa jadi belum terasahnya ato tergalinya potensi yang sesungguhnya ada, seperti itu. E apa namanya seringkali adanya diskriminasi sering kita temui, tidak bisa kita menutup mata, masih ada diskriminasi terhadap sarana-sarana

yang diperuntukkan,seringkali masih mempunyai nuansa diskriminatif. Itu berpengaruh terhadap peluang-peluang bagi optimalisasi potensi dari perempuan itu. Misalkan saja untuk sebuah formasi itu lebih e apa namanya misalkan saja dilamaran-lamaran kerja diutamakan laki-laki, mesti ada, ada nuansa-nuansa diskriminatif, diutamakan yang laki-laki sekalipun ada wanita yang bisa. Mungkin saja seperti ini terjadi, misalnya saja ketua personalia itu laki-laki tentu dia tidak akan pernah merasakan bagaimana sedihnya seorang perempuan yang baru saja melahirkan itu harus meninggalkan putranya. Baru melahirkan 1, dua hari harus masuk kerja sehingga tidak ada cuti melahirkan. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana kecewanya ketika tidak bisa menyusui putranya dengan waktu yang ideal. Ato mungkin dia tidak pernah bisa merasakan”
(Rin, ibu rumah tangga)

Masalah kapasitas, adanya diskriminasi yang berpengaruh pada optimalisasi potensi perempuan bagi Rin merupakan faktor penyebab belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai orang yang cukup intens melakukan pengkajian terhadap permasalahan perempuan, Rin tidak kesulitan untuk menyebutkan faktor-faktor penyebab tersebut.

Er menyebutkan masalah pendidikan menjadi faktor penyebab belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan perempuan yang rendah seringkali berdampak pada pemahaman yang sempit atau pemahaman yang salah mengenai sesuatu. Seperti yang diucapkan Er,

“pendidikan wanita itu juga terkait, pemahaman, wanita dibesarkan dimana itu juga sangat mempengaruhi pemahaman dia tentang kekuasaan dan peran mereka.”
(Er, aktivis)

Apa yang diungkapkan oleh Er di atas, salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang keluarga besar Er yang mayoritas tidak disekolahkan di jalur pendidikan formal. Realitas itu memberikan gambaran pada Er bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan pemahaman seseorang termasuk

masalah politik dan kekuasaan. Masih menurut Er hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal perempuan.

Kesetaraan gender menjadi kata kunci dalam kerap diperbincangkan dan didiskusikan. Dalam hal ini kaum feminis yakin bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat mutlak bagi sistem terbentuknya masyarakat equal dan egaliter. Sistem inilah yang nantinya diharapkan akan menggantikan sistem patriarki yang selama ini diyakini sebagai penyebab munculnya keadilan sistemik terhadap perempuan.

Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah persamaan fungsi dan peran secara mutlak antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya bisa saling bertukar peran tanpa batasan apapun; ada pula yang mengatakan sebagai persamaan antara hak dan kewajiban ; ada yang mengartikannya kemitra sejajar antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender sering pula diartikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Tidak jelasnya ukuran-ukuran yang dipakai dalam penilaian keidealannya serta standar-standar yang dipakai dalam memperjuangkan kesetaraan gender inilah, menurut Im dianggap sebagai faktor penghambat belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti wawancara di bawah ini,

“hambatan mungkin memang ini ya e apa ya konteks laki-laki dan perempuan, kesetaraan itu sendiri mungkin belum di lihat secara utuh itu ya, kadang perspektif kesetaraan misalkan kesetaraan gender, saya memandang bahwa laki-laki dan perempuan semua harus sama, hak harus sama, seimbang seperti itu. Sehingga kadang berlebihan tapi di sisi lain ada juga e apa ya ketidakadilan gender juga yang juga sangat tidak seimbang seperti itu. Apa ya mungkin pemahaman masyarakat

barangkali yang menghambat apa ya kesetaraan disini. Jadi masyarakat mungkin ya masih memandang bahwa perempuan itu masih golongan keberapa”
(Im, PNS)

Menurut Im, belum jelasnya ukuran yang dipakai masyarakat dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan masyarakat kebingungan memahami itu dan pada akhirnya menganggap perempuan adalah makhluk nomor sekian. Wacana Im tersebut juga di pengaruhi aktivitasnya yang kadang bersentuhan dengan dunia perempuan yang mana bahasan gender menjadi salah satu bidang kajiannya. Maka, tak heran jika konsep gender menjadi pilihan jawaban Im.

Berbeda dengan Rin yang dibesarkan di keluarga militer. Menurut Rin budaya patriarki yang telah mengakar di negara ini seringkali menyebabkan sedikitnya kesempatan, maupun peluang bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Peneliti berhasil memperoleh jawaban atas hal tersebut diatas, yaitu:

“seringkali masih muncul adanya diskriminasi karena adanya budaya patriarkhi di masyarakat kita. Sehingga ada sebuah hambatan untuk jalur-jalur tertentu bagi lapangnya upaya-upaya penggalian potensi perempuan itu sendiri”
(Rin, ibu rumah tangga)

IV. 5 Pilkada

Pilkada adalah salah satu faktor yang mampu memajukan daerah dengan mengelola potensi-potensi yang tersedia di daerah-daerah, sebab selama ini dengan pengelolaan yang terpusat kurang mampu diberdayakan secara optimal. Pilkada menyimpan suatu harapan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal yang memang tersedia dan belum teroptimalkan.

Pilkada langsung harus diakui membuka banyak peluang partisipasi politik masyarakat, akan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Tidak saja menyuarakan tetapi masyarakat juga dapat mengontrol pemerintah daerah untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat karena dengan pilkada langsung rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada pemimpin di daerah.

Dalam penelitian ini Is secara lebih khusus menyebutkan bahwa Pilkada juga memberi peluang bagi perempuan di daerah untuk berpartisipasi secara politik. Pilkada adalah momen yang tepat bagi perempuan untuk ambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan daerah. Berikut hasil wawancara dengan Is,

“sangat berarti karena dia yang akan menjalankan roda pemerintahan dan kita tau pemerintahan itu e secara langsung ato pun tidak langsung berkaitan dengan keluarga perempuan itu. E ada yang menarik ya kalo gak di Jakbar ya di Jabar itu misal beberapa waktu yang lalu ada UU yang menganjurkan siswa yang perempuan pada hari jum'at hendaknya memakai jilbab tapi kemarin itu ada yang pro dan kontra. Lepas dari itu semua, kalo kepemimpinannya itu berpihak pada kebenaran ya hasilnya yah hal-hal seperti itu. Termasuk juga perempuan yang akan merasakan pembelaan itu. makanya sebenarnya kaum perempuan itu harus memperhatikan calonnya, siapa yang lebih berpihak pada kebenaran itulah yang harus didukung. Jadi dia tidak boleh tidak peduli, harus peduli karena itu nanti berkaitan dengan kepentingan pribadinya, kepentingan anak perempuannya, kepentingan masyarakat perempuannya”
(Is, dokter)

Keterlibatan Is yang cukup lama di struktur partai mempengaruhi wacana yang diproduksi. Selain itu, pengalaman Is sebagai pemilih dalam proses pemilihan pemimpin nasional dan daerah menyebabkan Is paham betul bahwa peran perempuan dalam agenda Pilkada adalah sangat penting. Hal ini terkait dengan kepentingan perempuan itu sendiri.

Point penting dari agenda Pilkada adalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Menurut pengakuan Rin, pemimpin inilah yang akan menentukan kemana arah daerah itu akan dibawa. Sehingga Pilkada juga merupakan arena pendidikan politik bagi setiap perempuan untuk menjadi pemilih rasional dan independent. Seperti kutipan dari hasil wawancara di bawah ini,

“Jadi kalo menurut saya masalah ato moment pilkada itu adalah kita menentukan kemana arah daerah itu akan dibawa gitu. Karena dengan menentukan pemimpinnya kita akan bisa memastikan e arah dari daerah itu akan dibawa, pemimpinnya misalkan yang mempunyai haluan kanan, berarti minimal daerah ini akan disetir berjalan ke arah seperti pemimpin itu, begitu sebaliknya”
(Rin, ibu rumah tangga)

Jawaban senada juga peneliti temukan dari Er, yakni :

“Pilkada itu yang menyangkut pemimpin daerah, dan pemimpin daerah itu menyangkut kehidupan warga daerah itu. Bagaimana daerah itu akan menjadi besar nanti tergantung jadinya seseorang dalam pilkada nanti. Makanya itu seorang wanita pun harus berperan dalam pilkada”
(Er, aktivis)

Apa yang diungkapkan Er merupakan hasil pengamatannya selama terlibat di Pilkada. Cukup berperan aktif di partai menyebabkan Er tidak buta terhadap keterlibatan perempuan di Pilkada, meskipun tidak mempunyai hak memilih pada Pilkada di Surabaya. Bagi Er, Pilkada merupakan moment yang akan menentukan pemimpin daerah.

Berbeda dengan Im, sebagai orang yang dulunya pernah terlibat di struktur partai Im melihat banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan, maka pilkada merupakan arena memperjuangkan kepentingan perempuan pada tingkat daerah. Langkah yang bisa diambil adalah mengajukan calon dari kalangan yang menjadikan agenda perempuan sebagai program-programnya. Hal ini seiring jawaban Im,

“pemilihan kepala daerah itu juga membawa eksekusi yang jelas buat perempuan ya, siapa yang dipilih jadi pemimpin, bagaimana kebijakannya, itu perlu kita tau, sehingga mungkin apa ya dalam konteks kita bisa tepat memilih orang atau person yang bisa tepat misalkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, atau apa gitu. Tapi ya lumayan pentinglah buat saya”
(Im, PNS)

Menurut Rin, keterlibatan perempuan dalam Pilkada masih jauh dari ukuran idealnya. Keterlibatan diartikan Rin sebagai peran perempuan dalam berbagai agenda pilkada, misalnya menjadi pemilih, menjadi peserta dalam kampanye. Hal ini berdasar pengamatan Rin selama berinteraksi dengan para perempuan di lingkungan rumahnya. Berikut wawancara dengan Rin,

“....Dimana secara realitanya, gampangnya dari sini gitu, hampir 50% itu apa namanya secara umum dari daftar yang tercatat itu hanya 50% pemilihnya yang datang. Dan kalo memang dilihat sebagian besar itu bukan perempuan bukan ibu-ibu mungkin bapak-bapak sehingga saya bisa menilai untuk agenda-agenda politik itu memang keterlibatan atau perhatianlah minimal perempuan masih kurang. Dan itu sangat terasa terutama di kalangan ibu rumah tangga,”
(Rin, ibu rumah tangga)

Budaya ikut suami atau ayah, menurut Im masih terasa di kalangan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan perempuan bukanlah sosok yang kritis dalam menentukan calon Pilkada. Melalui pengamatan Im menilai perempuan tidak memilih berdasarkan pertimbangan rasional tetapi dengan pertimbangan naif seperti karena suami atau hanya ikut-ikutan.

“Fenomena yang saya amati aja ya. Mungkin terkesan memang perempuan saat itu masih ikut suami. Katakanlah seperti itu masih ikut bapaknya kebanyakan seperti itu ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang apa ya punya sebuah pandangan sehingga bisa memilih sendiri seperti itu. Cuma mungkin masih cenderung ya seperti itu aku manut suamilah seperti itu”
(Im, PNS)

Momen pilkada yang telah berlangsung, khususnya di Surabaya membawa wacana tersendiri bagi perempuan. Hal yang bisa dijadikan pertanyaan dan

sebagai bahan evaluasi adalah apakah Pilkada ini telah menunjukkan keterwakilan perempuan, baik dilihat dari struktur di birokrasi maupun kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diputuskan. Rin menilai belum adanya keterwakilan perempuan dalam agenda pilkada, seperti kutipan di bawah ini:

“belum juga, kalo saya katakan disini belum apakah masalah representasi di struktur maupun kebijakan-kebijakannya itu masih belum terasa nuansa keberpihakan pada perempuan memang belum. Gampangannya saja dahulu itu ada sebelum e apa namanya ada revisi kabinetnya pak bambang DH, dulu masih ada dinas social dan pemberdayaan perempuan sekarang ini pemberdayaan perempuan sudah dihilangkan tinggal dinas sosialnya saja. Ketika saya pernah ketemu dengan orang-orang dinas social mereka pun belum bisa menentukan focus garapan dari pemberdayaan perempuan itu bagaimana, mereka masih *ingincludkan* yang namanya upaya pemberdayaan perempuan itu pada masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian e apakah itu kepada perempuan ya sebagian seperti itu sehingga program itu belum sama sekali spesifik untuk perempuan seperti itu. Contohnya seperti itu, sehingga kalo ditanyakan apakah setelah pilkada sudah ada keterwakilan di pihak perempuan, belum. Belum begitu terasa, belum begitu terlihat”
(Rin, ibu rumah tangga)

Rin tidak kesulitan untuk menyebutkan contoh belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam Pilkada, hal ini mengingat amanah Rin sebagai ketua bidang kewanitaan tingkat daerah yang sering mengadakan forum bersama dengan dinas sosial yang di dalamnya terdapat pemberdayaan perempuan.

Peneliti menemukan jawaban sama dari Er yang dalam hal ini mempunyai amanah di kaderisasi partai tingkat ranting.

“selama ini kan, saya hidup di Surabaya. Sayapun melihat mulai dulu sampai sekarang peran dari kepala daerah apa itu pembelaan terhadap perempuan saya belum melihat. Apa itu keresponan, paling tidak respon itu saya belum melihat..”
(Er, aktivis)

Berbeda dengan Rin, Er lebih melihat belum terwakilinya kepentingan perempuan berdasar pengamatannya, meskipun Er tidak mempunyai hak memilih dalam Pilkada kemarin.

Sementara masih dengan pertanyaan yang sama, Prim tidak memberikan jawaban. Ini terlihat dari hasil wawancara singkat berikut ini,

“ya itu, saya *gak* tau lagi”
(Prim, mahasiswa)

Pengalamannya yang paling sedikit dibanding lainnya, menyebabkan Prim amat sederhana mengungkapkan jawabannya. Hal ini mengingat Prim juga tidak terlibat dalam struktur partai sehingga interaksi terbesarnya masih dalam sekepuk kampus.

IV. 6 Kuota Perempuan

Tahun 2003, tepatnya pada tanggal 18 Februari merupakan hari dicantumkannya kuota 30 persen di dalam batang tubuh UU Pemilu pasal 65. Dalam ayat (1) dari pasal tersebut secara spesifik dinyatakan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 30 persen bagi keterwakilan perempuan di dalam nominasi anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota.

Menyadari kekurangan keterwakilan perempuan dan kesulitan membangun jalan ke sistem politik, maka perlu agenda strategis melalui mekanisme affirmative action dengan menjalankan kuota gender.

Dalam penelitian ini, Im memahami kuota perempuan sebagai upaya mengcover keadilan gender. Prinsip yang Im pegang adalah bagaimana kuota 30% itu harus tetap memperhatikan masalah kapasitas perempuan. Apa yang diungkapkan Im tidak terlepas dari proses belajarnya yang sering mengkaji

tentang peran perempuan dalam politik termasuk persoalan kuota. Seperti penjelasan Im di bawah ini,

“mungkin seperti saya sampaikan di awal tadi ya. E mungkin baik-baik saja ketika ada penetapan kuota 30%. Mungkin itu sebuah upaya untuk mengcover keadilan gender ato seperti apa cuman sekali lagi jangan sampai kita memaksakan diri perempuan masuk tapi dengan kapasitas dan kualitas yang sebenarnya jauh. Jauh dari apalagi di parlemen ya parlemen itu tempatnya penentu kebijakan barangkali untuk rakyat seperti itu. Ketika kita tidak punya kapasitas yang lemah bukannya saya melihat itu hal yang sia-sia cuman tanpa adanya kapasitas yang mumpuni atau kemampuan yang sesuai berada di kondisi semacam parlemen menurut saya itu sangat berat. E jadi itu sangat baik ketika yang masuk sana itu memang kapasitas-kapasitas orang yang benara-benar baik, tapi saat kemarin itu kuota 30% itu orangnya kan asal-asalan jadi dimana perempuan asal tunjuk pokoknya jadi caleg kan seperti itu. Mungkin itu memang sebuah peluang perempuan sebenarnya tergantung sekali lagi bagaimana perempuan itu mengoptimalkan kapasitasnya menurut saya”
(Im, PNS)

Pendapat bahwa angka 30% tidak menjamin keterwakilan perempuan di DPR. Konteks ini, keterwakilan diartikan sebagai terangkatnya atau terselesaikan permasalahan perempuan di tingkat DPR. Sehingga nilai nominal disini bukanlah inti dari upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, namun hanya sebagai sebuah pembelajaran di kalangan masyarakat khususnya mereka yang bukan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan Im,

“ya, jadi kalo representasi perempuan dihitung secara nominal kalo disini dibatasi minimal 30% banyak orang yang protes termasuk saya dan komunitas perempuan PKS dan juga mungkin gak cukup puas dengan batasan 30% itu tidak menjamin terwakilkannya suara dan kepemimpinan perempuan. Kalo mau dipake yang lebih pasti itu 50%,-50% laki-laki 50% perempuan 50%. Cuman ada hal yang harus difikirkan disini bahwa e sebagai sebuah pembelajaran di kalangan masyarakat umumnya terutama mungkin yang bukan perempuan bagaimana supaya permasalahan perempuan itu tidak jadi milik perempuan saja. Dituntut untuk bisa menjadi orang yang juga memikirkan masalah perempuan karena sesungguhnya e apa namanya bukan diistilahkan memangnya tapi menjadi pentingnya permasalahan-permasalahan yg dimiliki oleh perempuan bukan karena representasi perempuan itu saja tetapi dijadikannya permasalahan itu milik semua orang, itu baru bisa dikatakan bener-benar permasalahan perempuan itu

dianggap penting seperti itu, bukan Karena representasi perempuan saja, apa gunanya 50 orang di parlemen tetapi ternyata tidak bisa menyuarakan secara utuh kebutuhan perempuan. Bahkan mungkin hanya 19% perempuan di parlemen tapi bapak-bapaknya mempunyai empati yg besar terhadap permasalahan perempuan itu. Karena itu kuota perempuan ini kita tidak kalo saya sebagai kader PKS memahaminya permasalahan kuota ini tidak hanya sebatas nilai nominalnya saja tetapi bagaimana permasalahan perempuan itu bisa terangkat secara lebih utuh. Disisi lain kita juga harus memikirkan betapa harus dipertimbangkannya keberadaan perempuan. Bisa dibayangkan kalo misalnya kita mau kaku-kakuan, kekehan harus 50% ada perempuan di parlemen, bisa dibayangkan banyak rumah tangga yg ditinggal ibu-ibunya. Itu yg mungkin apa namanya pembagian hal-hal yg harus dijadikan pertimbangan ketika kita ingin mensikapi masalah kuota 30% itu”

(Rin, ibu rumah tangga)

Ketika kuota hanya dipahami secara kuantitas, maka Er menyatakan tidak sepakat dengan hal itu. Argumen seperti ini seringkali berdasarkan pada realitas perempuan yang terjun di dunia politik. Artinya tidak semua perempuan yang terlibat di DPR itu memperjuangkan kepentingan perempuan. Atau dengan kata lain bahwa peningkatan jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik tidak membuat keterwakilan politik berbasis gender akan semakin potensial terlayani. Seperti yang diucapkan oleh Er,

“Dan saya memandang peran apa yang bisa diberikan wanita itu dengan kursi yang diberikan dalam DPR. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi bahwa tidak semua wanita memperjuangkan aspirasi kaum wanita seperti presiden Megawati tidak pernah kan membela kaum wanita. Jadi keputusannya tidak ada yang terkait dengan keputusan wanita. Tidak ada pembelaan kepada wanita. Jadi seperti itu tidak semua wanita membela kaum wanita. Tidak menjamin kuota yg 30% itu akan menguntungkan wanita”

(Er, aktivis)

Telah ditetapkannya kuota 30% perempuan pada Pemilu tahun 2004 kemarin, dapat dilihat apakah benar nilai nominal sebesar 30% itu mampu mewakili kepentingan di tingkat DPR. Hal yang dilihat adalah bahwa keterwakilan berbasis jenis kelamin adalah sebuah keterwakilan statistik, ditandai

oleh tingginya persentase perempuan di dunia politik. Sementara keterwakilan gender adalah keterwakilan politik. Pemahaman seperti inilah yang diungkapkan oleh Is,

“kita melihat begini ya, mungkin orang umum melihat mungkin itu bisa, jadi orang-orang feminisme itu mematok kuota 30%. Kalo kita melihat seperti yang saya sampaikan ya, kapasitas dan kapabilitas. Sekarang pemilih perempuan kan 50% lebih. Islam mengajarkan suatu keadilan menyuarakan suara kebenaran, saya ingin mendudukkan semua pada masalahnya. Kalo laki-laki pada saat dia menyuarakan kebenaran dan keadilan maka *insyallah* suara perempuan juga terangkut. Trus kemudian kalo perempuan dan dia memahami masalahnya, maka masalah itu juga terangkut. Yang jadi masalahnya adalah siapakah laki-laki kita? tertawa. kapasitasnya dia menyuarakan kebenaran *gak*? gitu. kalo dia *gak* menyuarakan kebenaran ya ini yang repot, akhirnya bisa masalah-masalah perempuan, masalah-masalah rumah tangga itu terabaikan. Makanya kemudian kaum feminis melihat itu ada ketidakadilan kalo laki-laki yang berkuasa makanya perempuan dimajukan 30%. Tapinya apanya? belum ada pendidikan politik secara layak di masyarakat. Akhirnya tetap aja yang menang laki-laki. Jadi kalo misalnya laki-laki itu semuanya di Adeg tapi dia menyuarakan kebenaran semuanya bisa teratasi walupun *gak* ada perempuan disitu, terwakili perempuan-perempuan disitu”

(Is, dokter)

Latar belakang keluarga Is yang sangat demokratis menyebabkan Is sangat detail mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Menurut Is, meskipun lebih banyak laki-laki yang duduk di parlemen ketika laki-laki tersebut menyuarakan kebenaran dan keadilan maka suara perempuan akan terwakili. Is lebih mempertegas kondisi laki-laki saat ini masih jauh dari standart tersebut sehingga kuota belum menunjukkan keterwakilan kepentingan perempuan.

Hambatan belum terpenuhinya kuota 30% perempuan merupakan hal yang disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Rin tidak adanya reformasi oleh partai politik, khususnya partai politik lama masih menggunakan cara lama untuk menggunakan kekuasaan yaitu dengan uang. Kondisi ini menyebabkan

perempuan yang miskin dan tidak punya uang untuk menyaingi money politics yang dilakukan oleh politisi laki-laki. Amanah Rin di salah satu partai, cukup membantu Rin mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam partai. Seperti yang diungkapkan oleh Rin,

"mungkin di partai-partai lain seperti itu. Jadi semakin dekat mereka di nomor-nomor awal e apa namanya biaya yang harus mereka keluarkan memang disamping harus dari kantongnya sendiri jumlahnya pun mungkin harus lebih besar dari yang lain. Untuk bisa lebih memastikan langkahnya sudah tidak jauh lagi seperti itu"
(Rin, ibu rumah tangga)

Dalam konteks partai, Er menyebutkan masih banyak partai yang memperlihatkan nuansa persaingan. Persaingan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hal nomor urut caleg. Sehingga tujuan partai yang dibawa pun bukan tujuan bersama melainkan tujuan sekelompok orang yang ingin berkuasa,

"kalo kita bicara tentang partai ya, itu sangat terkait dengan tujuan partai"
(Er, aktivi)

Hambatan lain belum terpenuhinya kuota 30% perempuan, menurut Is yang dalam kesehariannya terlibat intens dengan forum-forum perempuan, disebabkan oleh kondisi internal partai. Belum adanya pendidikan politik, belum berjalannya sistem dalam partai itu. Kalau dilihat dari sisi internal perempuan, maka pemahaman terhadap politik yang keliru akan menyebabkan perempuan tidak mau terlibat di dunia ini. Wawancara yang berhasil peneliti lakukan adalah sebagai berikut,

"Ya Karena tidak ada pendidikan politik dalam partainya secara umum mereka menganggap politik itu bukan dunia perempuan, pengambilan keputusan itu jg bukan dunia perempuan, politik itu kotor makanya jangan didekati nanti perempuannya jadi korban, lha itu model-model seperti"
(Is, dokter)

Hal yang menarik ketika Prim menilai bahwa justru dengan kuota itu menjadi penghambat tidak terwakilinya perempuan di tingkat DPR. Mungkin apa yang disampaikan oleh Prim tersebut berangkat dari ketidak-intesan Prim dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kuota. Seperti yang diucapkan oleh Prim

“Mungkin kuota 30% jadi penghambat (tertawa..)”
(Prim, mahasiswa)

BAB V

PARTISIPASI POLITIK

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Secara rinci, Dusseldorp (1981) mengartikan partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Definisi lebih rinci dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1997) partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Sementara itu Davis (1977), memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab di antara mereka.

Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dan dalam suatu negara (Maran, 2001; 147).

V.1 Perempuan Dan Partisipasi Politik

Diskusi tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2002 tercurah pada pembicaraan mengenai upaya peningkatan jumlah perempuan untuk menduduki berbagai posisi di lembaga-lembaga politik formal. Masalah peningkatan partisipasi tidak hanya merupakan permasalahan partai politik, tetapi juga melibatkan *civil society*, kalangan akademisi dan masyarakat secara umum.

Dalam penelitian ini, subyek memahami bahwa perempuan harus terlibat dalam partisipasi politik. Konteks politik disini, diartikan secara luas. Tidak hanya dalam posisi di lembaga-lembaga formal, namun dalam setiap agenda-agenda perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Rin di bawah ini,

“untuk agenda sebuah perubahan siapapun disini harus terlibat, termasuk di dalamnya perempuan dengan segenap potensinya, dengan segenap kapasitasnya sehingga e keterlibatan seorang perempuan dalam politik ketika itu semakin tinggi itu bisa jadi menjadi percepatan bagi agenda-agenda politik. Apa mesti seperti itu? Seringkali iya, begini misalnya. Misalkan aja di sebuah lingkungan RT ada kebijakan yang diturunkan mulai dari kecamatan, kelurahan, kemudian tingkat RT. Ketika para perempuan itu menganggap remeh maka agenda politik itu tidak akan pernah berjalan. Justru ketika agenda-agenda politik itu apa namanya e banyak dipahami oleh perempuan itu akan lebih mempercepat”

(Rin, ibu rumah tangga)

Apa yang disampaikan oleh Rin di atas merupakan hasil interaksinya yang cukup intens dengan perempuan, apalagi Rin juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang sering terlibat di forum-forum perempuan. Menurut Rin, keterlibatan perempuan dalam bidang politik mampu mempercepat terlaksananya agenda-agenda politik. Terlebih dalam agenda politik seringkali menyangkut persoalan-persoalan perempuan yang membutuhkan lebih banyak kontribusi perempuan untuk menyelesaikannya. Masih menurut Rin, pemahaman seperti ini bukan

berarti persoalan perempuan tidak dibahas dan diselesaikan oleh laki-laki, namun ada ruang-ruang khusus yang lebih pas jika perempuan yang terlibat.

Lain lagi apa yang disampaikan oleh Er. Menurut perempuan yang belum menikah ini, partisipasi politik perempuan juga merupakan sarana bagi pendidikan politik perempuan itu sendiri. Dari sinilah perempuan akan lebih sadar terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat yang di dalamnya juga menyangkut permasalahan perempuan. Sehingga perempuan harus peduli terhadap lingkungannya, terlebih hal tersebut sangat erat kaitannya dengan nasib keluarganya. Seperti yang diungkapkan Er di bawah ini,

“Dan khususnya para wanita, mulai memahami kepentingan masyarakatnya, tidak *nghutek* dengan keluarganya, tentang anaknya, tapi diapun harus melihat kondisi yang membesarkan anaknya seperti apa. Karena mustahil seorang ibu itu akan mampu menemani anaknya dimanapun dia berada, karena waktu seorang anak itu lebih banyak diluar daripada di dalam keluarga. Dan pengaruh teman itu lebih besar daripada pengaruh keluarga. Karena waktu yang diberikan itu lebih besar ke teman. Itu yang menurut saya wanita itu tidak boleh *cuek* dengan lingkungannya. Dia pun harus melakukan pendidikan politik dan peran politis”
(Er, aktivis)

Partisipasi politik perempuan di ranah posisi formal, dalam hal ini di tingkat legislatif atau eksekutif, Yen memahami bahwa kesemuanya kembali pada masalah visi. Artinya apa yang akan diperjuangkan tergantung pada visi perempuan itu sendiri. Hal ini berangkat dari realitas di lapangan bahwa hanya sedikit perempuan yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Berikut pemaparan Yen,

“saya pikir ini kembali pada masalah visi ya, kalo saya pikir saya renungkan saya *gak* punya cita-cita jadi politisi dulu, saya *gak* ingin cita-cita seperti itu. Dan ketika saya menyampaikan ke anak-anak saya tidak ada satupun anak saya yang ingin jadi politisi. Apalagi kalo mereka melihat dunia saya seperti ini, pulang malam, dunia berdebat, dunia di media, di koran, tentang gaji segala *macem*. Itu terbersit oleh

mereka kemudian tidak ada yang mau jadi politisi. Nah makanya saya kembalikan ke yang awal bahwa politik itu saya lebih melihatnya saya sebagai sebuah takdir bukan sebagai sebuah perjuangan. Sebagai sebuah takdir dan saya harus melakukan takdir itu sambil dibarengi memang sebelumnya adalah sebuah pegangan hidup saya sebagai e orang yang berkomitmen mengajak orang lain pada jalan yang benar. Jadi *kalo* sekarang ada perempuan yang berkiprah di politik ya (tunggu) ada yang hanya memperjuangkan masalah gender saja, ada yang pingin memperjuangkan sekelompok masyarakat yang tertindas, ada yang memperjuangkan sekelompok orang-orang disekelilingnya untuk kepentingan-kepentingan pribadi *atau* golongan”
(Yen, Aleg)

Apa yang disampaikan di atas tidak bisa terlepas dari keberadaan atau posisi Yen sebagai Aleg di DPRD Surabaya. Sebagai orang yang terjun langsung di dunia politik sesungguhnya, Yen mengetahui benar bagaimana perempuan yang berada di posisi itu. Penjelasan Yen di atas menggambarkan bahwa berpartisipasi di dunia politik bagi seorang perempuan adalah hal yang sangat berat. Pada akhirnya ketika perempuan terjun di dunia politik, hanya masalah visi yang membedakan. Menurut Yen, realitas membuktikan bahwa visi perempuan yang terjun di politik sangat berbeda. Ada yang hanya memperjuangkan masalah gender, memperjuangkan kelompok tertindas, bahkan ada juga yang hanya memperjuangkan golongannya saja.

Maka tak heran jika Yen memahami pekerjaan di dewan sebagai sarana untuk mengajak orang lain pada kebenaran. Semuanya kembali pada visi. Dalam konteks yang berbeda, hal tersebut adalah sebuah takdir yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih para pemimpin dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan kesadaran dan tanggung jawab warga negara

terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dan dalam suatu negara (Maran, 2001; 147).

Mengenai partisipasi politik perempuan untuk saat ini, Er menilai masih rendah jika dilihat secara kualitas. Hal ini mengingat Er sudah cukup lama bergabung dengan partai sehingga bagaimana partisipasi perempuan dalam bidang politik, Er cukup memahami. Menurut Er, perempuan yang berpartisipasi dalam politik masih dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga partisipasi perempuan tidak berdasarkan atas sebuah kesadaran dan tanggung jawab. Dalam istilah lain partisipasi politik perempuan hanya sekedar ikut-ikutan, berikut wawancara oleh peneliti :

“secara umum sangat kurang, jadi ini ya e..sifat masyarakat Indonesia yang bersifat ikut-ikutan, lebih mengedepankan kepentingan sesaat ini bukan kepentingan jangka panjang, akhirnya membuat mereka itu *gak* mau berpikiran maju. Tidak mau memikirkan sesuatu yang lebih besar tapi mereka hanya memikirkan keuntungan saat ini. Dan partisipasi politik wanita di situ, sangat kurang sekali Karena mereka hanya ikut-ikutan, disitu ramai ya... disitu mereka ikut”
(Er, aktivis)

Er mendiskripsikan bahwa gambaran perempuan sebagai makhluk yang lembut, penuh perasaan, tidak suka kekerasan, dan lain-lain seringkali menggeneralkan semua perempuan seperti ini. Apalagi hal tersebut semakin diperparah dengan tidak pandainya perempuan dalam menempatkan semua karakteristiknya tersebut di atas dengan kondisi yang ada. Perempuan identik dengan orang yang tidak suka hal-hal yang sifatnya rumit sehingga dalam memilih sesuatu pun cenderung bersifat jangka pendek atau hanya menyangkut keuntungan sesaat. Demikian pula dalam persoalan politik.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Is. Sosoknya yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa ini, menyebabkan Is cukup mengetahui dinamika kampus. Is menilai realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan saat ini sangat memprihatinkan. Penilaian ini didasarkan pada ukuran statistik perempuan yang berpendidikan di tingkat perguruan tinggi. Seperti kutipan di bawah ini,

“memprihatinkan. Kita melihat gini, e dari data statistic perempuan di Indonesia itu yang masuk di PT kan hanya 2 %. Mungkin sekarang naiklah. Paling banyak paling *pol-polan* 5%. 5% laki-laki dan perempuan. Kaum perempuannya berapa? 2% biasanya yang sadar politik itu kan orang-orang yang ada di PT dan itu kan tidak semuanya. Nah itu adalah gambaran kesadaran politik di Indonesia itu. Jadi semakin sedikit gitu”
(Is, dokter)

Ukuran-ukuran yang digunakan Is juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang sangat memperhatikan masalah pendidikan. Menurut Is, perempuan yang masuk di perguruan tinggi dianggap lebih bisa untuk berpartisipasi politik daripada perempuan yang berada di luar perguruan tinggi. Meskipun pemahaman seperti itu tidak selamanya benar karena realitas juga membuktikan banyak perempuan yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi namun tingkat partisipasi politiknya justru lebih rendah atau bahkan tidak melakukan hal itu. Meskipun demikian, setidaknya ketika perempuan berada di perguruan tinggi peluang untuk berpartisipasi politik lebih besar dibanding yang berada di posisi lainnya.

Dengan pendekatan yang agak berbeda, Roth dan Wilson memfokuskan studi pada bentuk-bentuk partisipasi politik. Dalam pandangan Roth dan Wilson, bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan berdasarkan intensitasnya.

Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan partisipan tertinggi sebagai aktivis²³. Bagian mayoritas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada pada jenjang pengamat. Partisipasi yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Menurut Im, partisipasi politik perempuan saat ini lebih meningkat dibanding masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perempuan-perempuan yang *melek* politik atau tidak buta politik. Seperti paparan di bawah ini,

“mungkin ini ya, kalo sekarang lebih meningkat barangkali dibanding masa-masa lalu yang mungkin apa ya mungkin memang saya tidak terjun ke politik lho...tertawa sekarang saya rasa mulai banyak ya perempuan-perempuan yang tidak buta, tidak buta sama sekali meskipun mungkin pemahaman dalam politik minim tapi misalnya mereka masih *melek* politik *gak* bener-bener *plas* hilang seperti itu”
(Im, PNS)

Ketika menyampaikan hal di atas Im tampak ragu-ragu, hal ini dikarenakan saat ini Im sudah tidak terjun di bidang politik sebagai konsekuensi dari pekerjaannya sebagai PNS. Menurut Im, penilaian di atas berdasarkan kondisi perempuan yang masih peduli terhadap persoalan politik. Meskipun partisipasi tersebut bukan dalam tindakan konkrit namun kepedulian perempuan untuk mengetahui perkembangan politik sudah menunjukkan adanya partisipasi

²³ David F. Roth and Frank L. Wilson, *The Comparative Study of Politics* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976), hal. 159 dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 6

politik perempuan. Misalnya ketika perempuan mengikuti politik melalui media massa.

Masih rendahnya partisipasi politik perempuan, menurut Rin banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut merupakan penghambat bagi aktivitas Rin yang dikenal sebagai *leadernya* ibu-ibu dalam melakukan optimalisasi peran perempuan di lingkungannya. Menurut Rin, salah satu penyebabnya adalah kultur yang berkembang di Indonesia. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki. Sehingga hal ini berpengaruh pada rendahnya gairah perempuan untuk memahami dinamika masyarakat. Berikut wawancara dengan Rin,

“kultur ya, kemudian mungkin umumnya tertaman yang ibu-ibu rumah tangga itu e apa namanya gairah untuk memahami dinamika masyarakat itu cenderung lebih rendah”
(Rin, ibu rumah tangga)

Membayangkan politik adalah wilayah laki-laki dan pihak perempuan tidak perlu sibuk dengan hal itu merupakan hasil reduksi oleh suatu proses sistem politik di era orde baru, dimana perempuan ditempatkan pada posisi “domestik”. Budaya patriarki tidak hanya dalam bilik rumah tangga akan tetapi juga di ruang publik, sehingga semua kesempatan, peluang diberikan kepada laki-laki. Hambatan kultural ini menyebabkan perempuan sendiri tidak berani secara terbuka menunjukkan potensinya. Pada akhirnya keinginan untuk peduli terhadap persoalan masyarakat sangat kurang di kalangan perempuan.

Sebagai perempuan yang cukup intens mengikuti perkembangan politik melalui media massa, Im menyebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah peran media masa sebagai sarana sosialisasi

dan komunikasi politik. Media berperan penting dalam membangun opini publik, khususnya perempuan. Im menambahkan berita-berita yang ditayangkan tentang kondisi perpolitikan yang selalu identik dengan dunia kotor akan mempengaruhi frame berpikir perempuan. Sehingga perempuan cenderung menarik diri dari lingkungan ini. Berikut wawancara dengan Im,

“Frame berpikir seperti itu masih sangat menancap di kita karena *kalo* pun ada misalnya pelaku politik yang baik ya itu pun hanya berapa persen. Seringkali kan trus yang dilihat selama ini pun tidak ada perubahan. Seringkali dalam kontek mungkin yang diberitakan media masa meskipun kita tidak tau persis yang terjadi di dalam parlemen tapi dalam kontek luar *allah* ya isinya itu *sikut-sikutan, gontok-gontokan, allah males* jangankan perempuan menurut saya laki-laki pun jadi apatis melihat kondisi yang seperti itu”
(Im, PNS)

Masih menurut Im, dinamika kehidupan politik yang identik dengan kekerasan, konflik, saling menjatuhkan adalah sebuah hal yang kadang kala memang benar. Media massa berperan besar dalam mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Tak jarang berita yang dimuat oleh media massa seringkali lebih berkesan hiperbola daripada kejadian yang sesungguhnya. Pada dasarnya Im mengakui masih terdapat pelaku politik yang baik namun seringkali hal itu jarang di ekspos sebagai penggambaran bahwa masih ada orang baik di ranah politik. Hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur politis dalam pemberitaan itu sendiri. Media massa terkadang hanya sebagai pembela dari kelompok tertentu dan penjegal kelompok lainnya.

Ketika perempuan hanya melihat dari pemberitaan di media massa bahwa politik sesuatu yang kotor, maka tidak ada keinginan dalam dirinya untuk ikut terlibat di dalamnya, bahkan berusaha untuk menarik diri dari aktivitas politik.

Berbeda dengan Is, menurutnya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan adalah proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para caleg seringkali berhubungan dengan masalah biaya. Artinya mereka yang ditempatkan di nomor urut atas adalah mereka yang memiliki biaya tinggi. Hasil wawancara dengan Is,

“Trus juga pemahaman misalnya e di saat terjun ke politik perempuan itu banyak memerlukan biaya. Jadi kayak waktu kemarin itu dicalangkan di partai-partai lain itu biayanya tinggi-tinggi. Di PKS saja yang *gak* bayar. Jadi orang-orang, perempuan-perempuan yang *gak* kerja dapat uang darimana gitu. Sedangkan mungkin uang dari suaminya juga pas-pasan. Materi pun mempengaruhi juga. Semakin tinggi nomornya semakin besar”
(Is, dokter)

Wacana di atas adalah wacana Is yang pernah terlibat di Caleg dalam Pemilu 2004, sehingga apa yang dipaparkan merupakan hasil pengalaman dan pengamatannya. Is menambahkan umumnya terjun di bidang politik membutuhkan dana yang tidak sedikit, demikian pula dengan perempuan. Misal dana untuk kampanye dan dana untuk kebutuhan lainnya. Hal menarik ketika Is menyebutkan dalam partai ada semacam seleksi untuk nomor urut Caleg. Laki-laki dan perempuan bersaing untuk menduduki nomor jadi dan yang akan menentukan itu semua adalah masalah dana. Artinya calon yang mempunyai dana lebih banyak lebih dahulu ditempatkan di nomor jadi. Kondisi ekonomi perempuan di tengah masyarakat yaitu kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai dan terbatasnya akses-akses ke sumber pendanaan yang diperlukan merupakan hambatan yang mempunyai pengaruh langsung pada partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Seorang mahasiswa yang belum menikah ternyata menyebutkan bahwa perempuan yang sudah berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan ijin dari suami. Menurut Prim, banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan perempuan dan aktivitas tambahan perempuan di luar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu yang besar. Sehingga pandangan-pandangan bahwa terlibatnya perempuan di politik justru akan mengganggu keseimbangan peran domestik dan peran publik. Berikut uraian Prim,

“ini saya rasa tergantung sekmennya, yang belum nikah mungkin hambatan dari keluarga, *ato* semua ini tergantung tiap-tiap individu, mungkin *gak* terlalu ada masalahnya, mungkin dari keluarga yang menyuruh untuk lebih banyak *ngurus* diri sendiri *ato* gimana, kalo yang sudah keluarga tergantung dia bisa *ngatur* keseimbangan itu *gak*. Perannya sebagai ibu, mungkin dia banyak pekerjaan, punya amanah dimana-mana. *Kayak* gitu”
(Prim, mahasiswa)

Aan Oakley salah satu dari sedikit feminis pertama yang menggunakan konsep gender. Mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi laki-laki (*maskulin*) dan perempuan (*feminin*) yang dibentuk secara sosio-kultural. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, posisi, perilaku mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada tataran ini, ada garis yang bersifar culture, dimana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender : an*

Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Pada umumnya label maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dipandang lebih kuat, lebih aktif, dan ditandai oleh kebutuhan yang besar akan pencapaian dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya, label feminin dilekatkan pada perempuan yang dipandang sebagai lemah lembut, kurang aktif, dan lebih menaruh perhatian kepada keinginan untuk mengasuh dan mengalah.

Dalam penelitian ini, Rin menilai bahwa label-label yang melekat pada perempuan itulah yang menjadi salah satu penghambat partisipasi politik perempuan. Seperti pemaparan di bawah ini,

“e ya, jadi namanya perempuan itu kadang memilih *pokoke* yang gampang, *enake sing adem ayem* saja, tidak suka dengan yang apa namanya pertentangan, tidak suka dengan kekerasan, label-label yang melekat pada perempuan itu *lho*, misalkan saja orang yang lemah lembut, sehingga tidak suka dengan kekerasan, dia adalah orang yang emosionalnya tidak stabil sehingga tidak suka hal-hal yang sifatnya pertentangan misalkan saja seperti itu. Itu sedikit banyak berpengaruh terhadap sikap seorang perempuan itu sehingga *hallah wes* daripada *ngurusi wong sing rikuh aluwong wes gak melu-melu*. bisa jadi seperti itu, sikap perempuan yang ambil gampangnya, ambil enaknyanya, tidak suka pertentangan, seperti itu bisa jadi menjadi pencetus”
(Rin, ibu rumah tangga)

Kutipan wawancara di atas adalah hal-hal yang seringkali ditemui Rin ketika berinteraksi dengan perempuan di sekitarnya, bahwa perempuan cenderung menarik diri dari dunia politik karena menghindari hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Atau dengan kata lain perempuan tidak bersedia untuk keluar dari zona amannya (tidak terlibat politik) karena menganggap dirinya adalah makhluk lembut yang tidak pantas untuk terjun di ranah politik.

V. 2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menggolongkan partisipasi politik kedalam bentuk kegiatan berikut :

Electoral activities, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih sebuah partai politik, memberikan suara dalam pemilu, mengamati pelaksanaan, pemberian, dan perhitungan suara, serta menilai calon-calon yang diajukan.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik yang dilakukan Er adalah *electoral activities*, misalnya memberikan suara pada pemilu, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih sebuah partai politik, dan terlibat pada pelaksanaan maupun perhitungan dalam pemilu. Seperti yang diungkapkan Er di bawah ini,

“menjadi saksi, mencoblos, tapi waktu pilkada tidak karena saya bukan orang Surabaya. Menjadi saksi *pas* pilkada, mencoblos *pas* pemilu, menjadi apa sih.. e.. bukan tim sukses *cuman* ikut berkampanye”
(Er, aktivis)

Partisipasi politik di atas adalah partisipasi politik yang dilakukan oleh Er yang kesehariannya berkecimpung dalam organisasi yang langsung berurusan dengan politik. Aktivitas mengoreksi penguasa yang mana kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum merupakan hal yang biasa Er lakukan. Partisipasi politik yang dilakukan Er merupakan bentuk aplikasi dari

wacana Er terhadap politik, yaitu upaya untuk mengatur negara, upaya untuk mengatur rakyat, dan kekuasaan.

Partisipasi politik secara electoral activities juga bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini,

“ya mungkin cuma DS (*direct selling*) ketika pilkada, pemilu. Ayo pilih ini..”
(Prim, mahasiswa)

Interaksi yang cukup intensif dengan teman-temannya yang nota bene peduli terhadap politik sangat mempengaruhi Prim dalam melakukan partisipasi politik. Sehingga, meskipun Prim tidak terlibat secara structural dalam salah satu partai namun ada keinginan yang kuat untuk melakukan partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan adalah memperkenalkan dan menawarkan partai politik yang di dukungnya.

Violence, atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa dapat juga dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, seperti misalnya demonstrasi, bahkan kekerasan politik. Biasanya tindakan seperti ini dijalankan kalau saluran untuk menyampaikan aspirasi politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Er sebagai perempuan yang terlibat di organisasi pemuda yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah melalui aksi turun ke jalan, melakukan bentuk partisipasi politik yang bersifat violence. Berikut pemaparan,

“banyak sih..jadi setiap kegiatan kita kan bisa dinilai secara politis, misalkan kegiatan politis, saat kita demonstrasi, saat kita apa ya..”
(Er, aktivis)

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan di atas berkaitan erat dengan pemahaman mengenai konsep politik. Ketika Er memahami bahwa setiap kegiatan adalah bernilai politis, maka demonstrasi yang salah satu tujuannya

untuk mengoreksi atau mendukung kebijakan pemerintah juga termasuk partisipasi politik.

Partisipasi politik yang masih bisa dilakukan oleh perempuan adalah membicarakan masalah politik. Aktivitas ini bisa dilakukan oleh para perempuan di mana saja. Baik di rumah, di kantor, atau bahkan di lingkungan masyarakat.

Membicarakan masalah politik atau lebih sering disebut juga dengan diskusi politik dapat meliputi topic yang sangat beragam. Kembali pada politik yang mencakup urusan yang sangat luas, maka topic pembahasan pada aktivitas membicarakan masalah politik bisa berupa isu-isu nasional maupun isu-isu internasional.

Aktivitas membicarakan politik ini bisa berlanjut pada hal lainnya. Seperti adanya keinginan untuk melakukan kegiatan politik yang konkret. Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik seperti itu juga terlihat. Misalnya upaya untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam masyarakat melalui pembinaan-pembinaan perempuan di lingkungan masyarakat, sehingga terbentuk komunitas perempuan yang peduli terhadap permasalahan masyarakat. Seperti penjelasan Rin di bawah ini,

“memberikan saran-saran kepada masyarakat tentang bagaimana masalah pemberdayaan perempuan, misalkan di forum-forum arisan itu e sudah mulai saya lakukan sekarang ini karena seringkali saya banyak mendapatkan gambaran di beberapa kali saya berada di lingkungan masyarakat ibu-ibu rumah tangga itu perhatiannya dalam hal membenahan rumah tangga itu sangat rendah sekali. Ketika mereka berkumpul pun yang dibicarakan tidak lain adalah ya permasalahan mereka sendiri, sehingga bagaimana *sih* caranya kita menjadi orang yang *pinter* itu jarang, mereka repot dengan urusannya mereka sendiri seperti itu, sehingga masalah bagaimana meningkatkan kualitas mereka sehingga sembari meningkatkan kualitas diri terselesaikan masalah dirinya dan terselesaikan juga permasalahan masyarakat itu mungkin belum sempat mereka kerjakan. Makanya mungkin yang sekarang ini

ingin saya wujudkan ya seperti itu. Bagaimana membangunkan para ibu-ibu rumah tangga bahwa sebenarnya mereka itu orang yang lebih bisa berdaya daripada sekedar ibu rumah tangga, di dalam rumah, urusan anak, itu saja, mungkin bisa lebih dari itu. Itu yang mungkin ingin saya wujudkan saat ini. Banyak kontribusi yang bisa diberikan oleh ibu rumah tangga misalkan saja ketika ibu-ibu rumah tangga itu bisa dikordinir menjadi e penyantun lembaga-lembaga social, mereka sudah menjadi orang-orang yang berpartisipasi terhadap pembenahan Negara ini. *Kalo* pun mereka memberikan donator-donatur, ada yang sebagian memberikan donator seringkali hanya difandasi oleh infak, misalnya tetapi tidak disertai dengan kesadaran bahwa ini bisa untuk pembenahan Negara ini pada sekup yang lebih luas lagi”
(Rin, ibu rumah tangga)

Sebagai perempuan yang cukup care dengan lingkungan sekitarnya membuat Rin mengetahui betul permasalahan yang sedang dihadapi oleh perempuan secara umum. Rendahnya partisipasi politik perempuan disebabkan oleh kondisi perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk berdaya. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas perempuan yang hanya sibuk mengurus dunianya sendiri, tanpa pernah sadar bahwa peningkatan kualitas diri adalah sesuatu yang sangat penting.

Maka tak heran upaya penyadaran perempuan terhadap eksistensi dirinya merupakan bentuk partisipasi politik Rin. Memahamkan bahwa perempuan mampu melakukan pembenahan negara melalui pemberian sumbangan juga bentuk partisipasi politik Rin. Inilah sarana pemberdayaan perempuan.

Bentuk partisipasi politik di atas juga dilakukan oleh Is yang hampir mempunyai aktivitas yang sama dengan Rin, hanya saja amanah sebagai dokter kandungan menyebabkan Is lebih banyak berinteraksi dengan perempuan. Seperti kutipan di bawah ini,

“ya karena saya diluar kekuasaan ya apa yang saya bisa bersama teman-teman di yayasan, di kajian-kajian rumah, itu bentuk-bentuk penyadaran kaum perempuan tentang masalah dirinya, masalah

keluarganya, masalah agamanya, masalah masyarakat, masalah Negara”
(Is, dokter)

Ilmuwan Roth dan Wilson mendefinisikan bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat. Yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik.

“e yang jelas mengikuti perkembangan ya entah itu baca koran...”
(Im, PNS)

Bentuk partisipasi politik Im tidak terlepas dari pekerjaannya. Bekerja sebagai PNS tentunya tidak bisa berkiprah di dunia politik lebih bebas daripada perempuan yang berada di luar. Maka partisipasi yang bisa dan aman dilakukan oleh Im adalah mengikuti perkembangan politik itu sendiri.

Pengkategorian oleh Gabriel A. Almond ini memasukkan dalam rumpun partisipasi konvensional antara lain; pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Partisipasi non konvensional, meliputi antara lain pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi dan mogok.

Partisipasi politik yang tergolong konvensional dilakukan oleh Rin, misalnya menduduki jabatan politik atau bergabung dengan kelompok kepentingan. Seperti paparan berikut ini,

“mungkin yang sifatnya lebih punya pengaruh pada regulasi mungkin baru-baru ini saja. Lebih banyak ikut di dalam kepartaian ini”
(Rin, ibu rumah tangga)

Saat ini Rin duduk di salah satu partai politik sebagai ketua bidang kewanitaan. Apa yang Rin lakukan juga sebagai dampak dari bagaimana Rin mewacanakan tentang politik.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh subyek penelitian di atas merupakan sesuatu yang dilakukan atas dasar apa yang mereka pahami tentang konsep politik. Artinya bahwa wacana tentang politik memegang peranan yang cukup besar dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik.

Dalam melakukan partisipasi politik, Is tidak mengalami hambatan yang berarti. Demikian wawancara dengan Is,

“sebenarnya saya *gak* merasakan hambatan itu ya, karena misalnya pada saat rapat kita usulkan *kalo* itu layak untuk dikerjakan ya dikerjakan, *kalo* saatnya belum waktunya dikerjakan saya pikir itu bukan hambatan. Itu realisasi kehidupan. Orang itu kan nangkanya *macem-macem* bila itu suatu hambatan tapi kalo kita sendiri menganggap itu wajar untuk tidak dilakukan ya bukan suatu hambatan. *alhamdulillah kalo* saya kan di rumah tangga ada yang meringankan saya, sehingga untuk rumah tangga bisa berjalan, untuk ekonomi *alhamdulillah* bisa sehingga bisa berjalan kemana-mana, untuk suami ya *alhamdulillah* mendukung. Jadi hambatan itu tidak ada. Jangankan di Surabaya, dulu Surabaya-Madura itu suami mendukung”.

(Is, dokter)

Dukungan penuh dari keluarga sangat membantu Is dalam melakukan partisipasi politik. Ketika kondisi di luar sangat bertentangan dengan kehendaknya, maka hal itu tidak menjadi sebuah hambatan. Prinsip Is adalah tidak semua idenya harus diterima atau harus dikerjakan saat itu. Bagi Is itu hanyalah realitas dari kehidupan ini.

Im juga tidak mengalami hambatan dalam melakukan partisipasi politik, kecuali masalah pekerjaan sebagai PNS :

“ya sekarang ini ketika saya jadi PNS. Karena terus terang dari orang tua pun itu tidak ada larangan bahkan wacana-wacana politik yang

saya gulirkan itu diterima dengan baik, e bagaimana saya mengenal partai mengenal PKS itu juga dari saya. Hambatan yang berarti belum saya dapati kecuali saya masuk PNS. Tertawa.. “
(Im, PNS)

Pengakuan di atas merupakan pernyataan Im yang merasakan betul bagaimana pekerjaan sebagai PNS ketika berhadapan dengan dunia politik, yang dalam hal ini berpartisipasi politik. Kondisi yang berbeda ketika Im belum menjadi PNS dan ketika sekarang menjadi PNS sangat berpengaruh pada gerakannya dalam bidang politik.

Respon yang kurang dari masyarakat ketika menyikapi adanya sosialisasi masalah politik, menurut Rin menjadi penghambat dalam melakukan partisipasi politik. Seringkali hal ini terjadi ketika Rin menawarkan atau mengenalkan calon yang didukung tidak mendapat respon seperti yang Rin inginkan. Bisa dilihat dari pemaparan Rin,

“sekali lagi respon masyarakat itu masih kurang, mereka masih gini, seringkali usia, usia perempuan itu e cukup menjadi penyebab perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan Negara yang cukup rumit. Jadi kalo sudah tua, *walah ken ewes sepuh, wes memperbaiki ibadah saja. Seringkali seperti itu. Minimal ketika saya berada disini ketika dilontarkan seperti itu yo wes kene setuju ae sing enom-enom ae sing ngadakno. Seringkali kalo pun ngomong iya, trus kemudian sembari mendengar sembari guyon jadi gak tau itu diperhatikan ato tidak. Misalkan saja ketika banyak ceramah-ceramah di masjid yang punya nuansa perubahan itu mereka lebih banyak e berada di belakang, senden jadi e terlihat sekali terutama mungkin ketika perempuan itu sudah e mempunyai usia-usia yang lebih lanjut”
(Rin, ibu rumah tangga)*

Pemaparan Rindi atas merupakan hasil interaksinya yang cukup intensif dengan perempuan di sekitarnya. Tidak adanya respon yang cukup baik terutama oleh perempuan yang sudah tua menurut Rin menjadi faktor penghambat partisipasi politiknya. Karena hal ini menyebabkan perempuan tidak mau peduli

terhadap persoalan negara dan sebaliknya perempuan hanya berkuat dengan persoalan pribadinya.

Er yang berkiprah di organisasi pemuda menjelaskan seperti ini,

“umumnya masyarakat ya, yang tidak semuanya itu bisa menerima apa yang kita jual. Misalkan kita memiliki calon kita *ato* kita memiliki partai ini misal, itu tidak semua masyarakat itu bisa menerima. *Walo* pun menerima, bagi saya ya, cukup mendapatkan respon yang positif itu sudah merupakan nilai yang lebih. Saat kita bisa e...dulu ya saat pemilu, saat kita mendapatkan respon positif dari orang-orang yang kita temui itu adalah suatu nilai yang lebih, setidaknya kita bisa mempromosikan partai kita ya. Itupun saat pilkada saat kita menjual *ato direct selling*, tentang calon ini, hambatan itu umumnya dari masyarakat karena tidak samanya mereka memahami politik yang kita bawa memahami kepentingan”

(Er, aktivis)

Keluhan di atas merupakan gambaran perasaan Er yang seringkali terlibat dalam aktivitas *direct selling*. Tidak adanya penerimaan atau respon yang baik dari masyarakat cukup membuat hati kecil Er sedikit gundah.

BAB VI

KESIMPULAN

Dunia politik masih menjadi tempat yang sepi bagi perempuan. Bila kita menengok sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perempuan yang terlibat dalam aktivis politik masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Minimnya representasi perempuan dalam politik menjadi permasalahan penting yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh semua pihak, tidak hanya kaum perempuan saja namun laki-laki juga mengambil peran tersebut.

Era reformasi yang salah satunya ditandai dengan lahirnya partai-partai baru sebagai bentuk luapan ekspresi berpolitik, menjadi catatan sendiri bagi perempuan dalam melebarkan sayapnya khususnya ketika perempuan berkiprah di ranah politik. Partai politik menjadi hal penting karena dari sinilah perempuan mampu melakukan peran politik.

Kehadiran Partai Keadilan sebagai salah satu partai baru pada tahun 1999, tampaknya agak berbeda jika dilihat dari para pendukungnya yang mayoritas kaum muda. Apalagi, partai yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2004 ini, memiliki kader perempuan yang militan. Maka, tak heran dalam setiap aksi-aksi PKS selalu dihadiri oleh kader perempuan.

Hal yang menarik adalah bagaimana sebenarnya perempuan PKS memahami politik sehingga pemahaman itu berlanjut pada adanya partisipasi politik. Lebih lanjut, penelitian ini memilih PKS tingkat Dewan Pimpinan Daerah kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini mencoba mengangkat permasalahan tersebut di atas dengan menggunakan metode analisis wacana.

Michael Foucault menyatakan bahwa istilah wacana diterjemahkan dari kata *discourse*, secara luas digunakan dalam kategori dan analisis sosial untuk merujuk berbagai cara menstrukturkan pengetahuan (*knowledge*) dan praktik sosial (*social practice*). Seperti yang diungkapkan oleh Fairlough, wacana termanifestasikan melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan simbol lainnya.

Beragamnya setting sosial yang dimiliki oleh subyek penelitian ini, akan memperlihatkan wacana yang diproduksi pun juga beragam. Konsep politik, kekuasaan, negara, pengambilan keputusan, kuota perempuan, dan Pilkada menjadi tema dalam penelitian ini. Setelah subyek penelitian mewacanakan tema-tema tersebut diatas, maka point yang kedua adalah bentuk-bentuk partisipasi politik subyek penelitian.

Data diperoleh dari wawancara secara mendalam, buku-buku, koran, majalah, maupun internet. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh kesimpulan seperti tersebut di bawah ini :

Pertama, wacana politik. Ada berbagai pemahaman tentang politik yang peneliti peroleh. Ketika politik dipahami oleh perempuan yang latar belakang pendidikannya non Sospol, tetapi memiliki interaksi yang cukup intensif dengan lingkungan yang notebene peduli terhadap maka politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Perempuan yang cukup lama berkecimpung dalam dunia pemberdayaan perempuan dan terlibat aktif dalam stuktur partai memahami politik sebagai gerakan yang merubah suatu peradapan menjadi lebih baik.

Perempuan yang saat ini duduk sebagai Adeg dan tidak berlatar pendidikan Sospol memahami politik sebagai jalan pintas menuju surga. Berbeda dengan perempuan yang tidak berlatar pendidikan politik, tidak masuk dalam stuktur partai, dan memiliki usia yang paling muda, maka politik dipahami sebagai usaha mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika perempuan yang berlatar pendidikan politik dan duduk di stuktur partai tingkat daerah maka politik dipahami sebagai pengelolaan dari kekuasaan politik itu.

Kedua, wacana kekuasaan. Kekuasaan dipahami sebagai sebagai *power* yang mampu digunakan untuk mengendalikan sesuatu dibawahnya, hal ini merupakan pemahaman dari perempuan yang berada di luar stuktur partai namun dalam kesehariannya suka mengikuti perkembangan politik. Perempuan yang terlibat dalam dunia kekuasaan sesungguhnya dan terlibat dalam agenda-agenda startegis partai, memahami kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan perempuan yang pernah dicalonkan sebagai Adeg, kekuasaan dipahami identik dengan kepemimpinan. Dalam konteks yang berbeda, yaitu perempuan yang berada di luar partai dan paling muda maka kekuasaan dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dari masyarakat sekecil apapun bentuknya. Ini sebagai konsekwensi adanya interaksi antar manusia.

Ketiga, wacana negara. Perempuan yang tidak berlatar belakang pendidikan Sospol memahami negara adalah bentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan. Konsep negara dipahami sebagai wilayah untuk melegalkan kekuasaan, hal ini merupakan pemahaman dari perempuan yang berlatar belakang

pendidikan Sospol dan terlibat di struktur partai. Berbeda dengan perempuan yang pernah terlibat di struktur partai dan tidak berpendidikan Sospol, maka negara dipahami sebagai unsur-unsur yang menjadikan negara itu ada, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Masih dalam konteks unsur-unsur negara, perempuan yang berlatar pendidikan Sospol dan terlibat di struktur partai, memahami bahwa negara mengandung unsur pemerintah, rakyat, dan UU atau hukum. Lebih dalam, perempuan yang terlibat langsung dalam urusan penyelenggaraan negara memahami termasuk di dalamnya unsur negara adalah masalah pengkoordinasian, pemantauan, serta kemudahan-kemudahan dari negara.

Keempat, wacana pengambilan keputusan. Perempuan yang belum menikah dan terlibat di organisasi kampus memahami pengambilan keputusan sebagai wadah yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan perempuan yang telah menikah dan duduk di ketua bidang kewanitaan sebuah partai, maka persyaratan bagi perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yakni masalah kapasitas dan kapabilitas sebagai orang yang menanggung sebuah tanggung jawab. Persyaratan lain yang harus dimiliki adalah konsistensi diri antara keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dengan pelaksanaan hasil keputusan, serta kemampuan untuk bersikap kritis dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika pengambilan keputusan dipahami oleh perempuan yang terlibat di organisasi kepemudaan dan belum menikah, maka menurutnya seringkali perempuan tidak berani menyuarakan ide-idenya. Perempuan yang terlibat cukup

lama di dunia pemberdayaan perempuan memahami bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan sesungguhnya yang menyuarakan adalah perempuan.

Kelima, wacana pilkada. Perempuan yang pernah dicalonkan sebagai Adeg dan terlibat cukup lama dalam setiap agenda Pemilu memahami Pilkada sebagai moment tepat bagi perempuan untuk ambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan daerah. Lebih lanjut, perempuan yang langsung bersentuhan dengan dunia perempuan memahami Pilkada sebagai arena pendidikan politik perempuan dengan menjadi pemilih yang rasional dan independent karena siapa yang terpilih dalam pilkada akan menentukan kemana arah daerah tersebut. Tidak berbeda jauh dengan pemahaman perempuan yang tidak mempunyai hak pilih namun terlibat dalam agenda partai, Pilkada juga sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah. Dalam konteks yang berbeda, yaitu perempuan yang berada di luar struktur partai namun memiliki hak pilih, maka Pilkada merupakan peluang untuk mengajukan calon dari kalangan yang menjadikan agenda perempuan sebagai program-programnya.

Keenam, wacana kuota 30% perempuan. Berbagai pemahaman yang peneliti peroleh mengenai wacana ini. Perempuan yang belum menikah dan sering terlibat dalam kajian perempuan, kuota perempuan dipahami sebagai upaya mengcover keadilan gender dan point penting yang ditambahkan adalah tetap memperhatikan masalah kapasitas. Berbeda dengan perempuan yang telah menikah dan terlibat langsung dalam dunia perempuan, maka nilai nominal 30% bukan inti dari upaya peningkatan keterwakilan perempuan, namun sebagai

sebuah pembelajaran di kalangan masyarakat khususnya laki-laki. Perempuan yang belum menikah dan terlibat di struktur partai tingkat ranting, mewacanakan tidak sepakat ketika kuota hanya dinilai secara kuantitas, karena seringkali perempuan yang di dalam DPR tidak semuanya memperjuangkan kepentingan perempuan.

Perempuan yang memiliki latar belakang keluarga cukup demokratis dan terlibat di struktur partai tingkat cabang, memahami keterwakilan perempuan yang terpenting kapasitas dan kapabilitas tidak terpatok angka.

Ketujuh, perempuan dan partisipasi politik. Bahwa perempuan harus terlibat dalam partisipasi politik, yang dipahami dalam konteks yang luas. Partisipasi politik juga merupakan sarana bagi pendidikan politik perempuan. Dengan konteks yang berbeda, partisipasi politik perempuan di posisi formal terletak pada masalah visi. Artinya apa yang akan diperjuangkan itu tergantung pada visi perempuan itu sendiri. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih rendah jika dilihat dari kualitas. Perempuan masih dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu sehingga tidak berdasarkan sebuah tanggung jawab dan kesadaran. Ukuran rendahnya partisipasi politik perempuan saat ini, juga dilihat dari ukuran statistik perempuan yang berpendidikan tingkat perguruan tinggi. Partisipasi politik perempuan saat ini lebih meningkat dengan semakin banyaknya perempuan yang *melek* politik.

Masih rendahnya partisipasi politik perempuan menurut subyek disebabkan oleh banyak faktor. Kultur yang berkembang di Indonesia, media massa sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik sering menjadi sebab

permasalahan itu. Proses seleksi dalam partai yang sering dikaitkan dengan masalah biaya. Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, faktor keluarga menjadi penyebab karena perempuan yang terlibat dalam politik akan mengganggu keseimbangan peran domestik dan peran publik. Sementara label-label yang melekat pada perempuan juga menjadi penghambat partisipasi politik.

Kedelapan, bentuk-bentuk partisipasi politik. Subyek melakukan partisipasi politik sangat beragam. Memberikan suara pada pemilu, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih partai, terlibat pada pelaksanaan maupun perhitungan dalam pemilu, demonstrasi, membicarakan masalah politik atau berdiskusi politik, pembinaan perempuan dalam upaya untuk mengoptimalkan peran perempuan, menjadi pengamat politik. Menduduki jabatan politik juga merupakan bentuk partisipasi politik subyek.

Dalam melakukan partisipasi politik, subyek mengalami hambatan yang berarti misalnya bekerja sebagai PNS. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi politik menjadi hambatan subyek dalam melakukan partisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bhasin. Kamla, 2001, *Memahami Gender*, Jakarta : Teplok Press
- Closky, Mc.Herbert, 1981, Political Participation, dalam Miriam Budiardjo *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT Gramedia
- Dra, Utami, Sri, MM dan Nasution Nursanita,SE,ME, 2003, *Muslimah Menuju Era Siyasa*, Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Kewanitaan
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: Lkis
- Huntington, P. Samuel dan M. Joan Nelson, 1997, *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, Crambridge: Mass: Harvard University Press
- Jorge, Larrian, 1996, *Konsep Ideologi*, Yogyakarta: LKPSM
- Khatimah, Husnul dan Najmah Sa'idah, 2003, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: CV Idea Pustaka Utama
- Machmudi, Yon, 2005, *Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harakatuna Publishing
- Maleong, Lexy. J, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Multitama, Communications, 2005, *Kisah Sukses Pebisnis Muslimah Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Murniati, P. Nunuk, A, 2004, *Getar Gender*, Magelang: Indonesiaterra
- Muslikhati, Siti, 2004, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Patria, Nezar dan Arief Budiman, 1999, Antonio Gramsci: *Negara Dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmat, Jalaludin.dkk, 1997, *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

- Ridha, Abu, 2004, *'Amal Siyasi Gerakan Politik Dalam Da'wah*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripto, 2003, *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*: Gema Insani
- Soetjipto, Ani Widyani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas
- Sparringa, Daniel T, 1997, *Discourse, Democracy And Intellectual In Order Indonesian : A Qualitative Sociological Study*, Adelaide
- Sukidin, Basrowi,dkk 2003, *Sosiologi Politik*, Surabaya: Yayasan Kampusina
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia
- Suryadi, Kadarsah, DR, IR dan IR.M. Ali Ramdhani, M.T, 1998, *Sistem Pendukung Keputusan*: Bandung, Rosda
- Wijaksana, MB, 2004, *Modul Perempuan Untuk Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Zainuddin, A. Rahman, 1992, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
-, *Kiprah Politik Perempuan PK-Sejahtera*, Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.
-, *Rakornas Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera*, Bidang Kewanitaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera
-, 1997, *Masyarakat Dan Negara*, Surabaya: Airlangga University Press

Skripsi

- Kusuma, Wardhani, Dhiyah, 2005, *Isu Kepentingan Gender Perempuan Dalam Kampanye Caleg Perempuan Pada Pemilu Di Surabaya*, Surabaya
- Kustiani, Rini, 2004, *Wacana Politik Kandidat Presiden*, Surabaya

Nugroho, Arif, Budi, 2002, *Gerakan Islam Indonesia Pada Era Dan Pasca Orde Baru*, Surabaya

Widyastuti, Yulia, 2002, *Perempuan Dan Politik*, Surabaya

Majalah

Da'watuna, Edisi 8 Tahun 01/April Mei 2005

Saksi, 30 Desember 2003

Saksi, No 8 Tahun VII, 19 Januari 2005

Internet

www.tokohindonesia.com/politisi/partai/pemilu/2004. Diakses tanggal 10 Juli 2005

<http://www.surabaya.go.id/walikota.php?page=renstra01>. diakses tanggal 2 Agustus 2005

www.rahima.or.id/SR/01-01/0opini.htm-23K. Diakses tanggal 4 September 2005

www.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 12 September 2005

<http://pk-sejahtera.org>, Diakses tanggal 10 Oktober 2005

<http://ideaindo.or.id/content/view/30/1/lang,id/-25K>. Diakses tanggal 16 Oktober 2005

Koran

Kompas, 24 april 2001

Republika, 18 April 2005

Tempo, edisi 17-23 Juli 2000

Pedoman Wawancara

Identitas Informan :

Nama :

Alamat :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Makna Politik

1. Ketika mendengar kata politik, bagaimana anda memahami kata tersebut?
2. Bagaimana pemahaman anda tentang politik apabila dikaitkan dengan posisi anda sebagai perempuan?
3. Seberapa penting perempuan mengetahui dan memahami persoalan-persoalan politik?
4. Bagaimana dengan perempuan yang duduk atau berpartisipasi di bidang politik?

Makna Kekuasaan

1. Ketika mendengar istilah kekuasaan, bagaimana anda memahami istilah tersebut?
2. Bagaimana pemahaman anda tentang kekuasaan apabila dikaitkan dengan posisi anda sebagai perempuan?
3. Seberapa penting perempuan mengetahui dan memahami persoalan kekuasaan?
4. Bagaimana dengan perempuan yang mempunyai atau memegang kekuasaan?

Makna Negara

1. Ketika mendengar istilah negara, bagaimana anda memahami istilah tersebut ?
2. Bagaimana pemahaman anda tentang negara apabila dikaitkan dengan posisi anda sebagai perempuan ?
3. Seberapa penting perempuan mengetahui dan memahami persoalan negara?

Pengambilan Keputusan

1. Bagaimana pemahaman anda tentang pengambilan keputusan apabila dikaitkan dengan posisi anda sebagai perempuan ?
2. Apakah saat ini kepentingan-kepentingan perempuan sudah terwakili dalam pengambilan keputusan?
3. Apakah hal-hal yang menjadi penghambat ?
4. Bagaimana dengan perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan?

Pemilihan Kepala Daerah

1. Apa makna Pilkada bagi perempuan?
2. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam agenda Pilkada?
3. Apakah saat ini Pilkada sudah menunjukkan adanya keterwakilan perempuan ?

30% Kuota Perempuan

1. Bagaimana pemahaman anda tentang 30% kuota perempuan di parlemen ?
2. Apakah saat ini 30% kuota perempuan sudah mewakili perempuan di parlemen ?
3. Apa hambatan-hambatan bagi kuota perempuan 30% ?

Partisipasi Politik

1. Bagaimana pemahaman anda tentang perempuan dan partisipasi politik ?
2. Bagaimana partisipasi politik perempuan saat ini ?

3. Apakah hambatan-hambatan partisipasi politik bagi perempuan ?
4. Apakah bentuk-bentuk partisipasi politik yang anda lakukan ?
5. Apakah hambatan-hambatan partisipasi politik yang anda lakukan?

Daftar Calon Legislatif Kota Surabaya Pada PEMILU 2004 di Surabaya Menurut Tiga Urutan Teratas

No	DP	Nama Calon Anggota Legislatif						
		PDIP	PKB	GOLKAR	PPP	PAN	PBB	PKS
1	I	Hj. Agustin Poliana	Wahyudin Husein	Erick Tahalele	Choirul Anam	Drs. Slamet Effendi	Ahmad Yulianto	Yulyani, Spd
2		Taroe Saamito	Musyafak R	Ir. Suyudoko Putro Dewo	Budi Heriyanto	Drs. Sudarodji	M. Hamid Usman	Drs. Suhadi
3		Syukur Amaluddin	Asmuni	H. Kasan	Zuhron Usman, SH	Marlius Barat S.	Muh. Yazid	Muh. Saiful
1.	II	Baktiono	Ali Ja'cub	Muh. Alyas, SH	Abd. W Hariyanto	M. Zahrus Faisal	Mujiono	Akhmad Suyanto
2.		Agus Kadarisman	Musrifah	Amrodji, SE	Moch. Amin	Harta Iramawati	Simpuang Abd. Malik	Hasanudin Rahardjo
3.		SriHono Yularko	M. Husein Yasin	Noersam	Taufik Hidayat	Herman Rivai	Drs. Lubis Arsyad	Zainal Asyiq
1.	III	Sigit Purnomo	Masduki Toha	Chaeruddin Ramly	Hj. Siti Aisyah	Yuzuar Datuk	Abu Ali	Yusuf Rohana
2.		Krisnadi Nasution	H. Muzamil	Facturahman	Abd. Rasyid	Ir. Reny WL	Abd Rasyid	Agung Wicaksono
3.		Yoyon Suyono	Himawan Wicaksono	H. M. Junan Tanjung	Zainul Arifin	Rr. Dian Trisilawati	Zainul Arifin	Hadi. S

No	DP	Nama Calon Anggota Legeslatif						PKS
		PDIP	PKB	GOLKAR	PPP	PAN	PBB	
1.	IV	Budi Harjono	Zaenab Maltufah	H.Marmudin	Ahmad Urip	M.Jazid	Zainuddin Patarai	Ahmad Jabir,ST
2.		Junianto Dwi Prastiawan	H. Mansur	HjAsni Maria	Noerman Zein Nahdi	Imran Tulada	Moch. Busri,S.sos	Drs. Sugito
3.		Ir. Armudji	HjLilik Fadilah	Hj Nahariensi	Drs.Ach. Djazuli	Drs. Agung	Achmada Solicha	Aning Rahmawati
1.	V	Wimbardi	KH.Muchsin Nurhadi	Agus Sudarsono	Moh. Syafik Mahmudi	Dr.H. Karminto	Siti Chomarijatik	Drs. Sutaman
2.		Suliad	Salman Faris	Redatini Soedarmono	Moh.Arief	Hafid Suaidi	Soeharsono	Mudakirudin
3.		Achmad Ariefin	H.Basuki Rahmad	Muslich Kaselin	Doni Kusuma W	Mahmud Nuruddin	M.Zainiman	Zainul Achmad
Kebijakan <i>Affirmatif Action</i>	Caleg perempuan urutan 1: 1	Caleg perempuan urutan 1: 1	Caleg perempuan urutan 1: 0	Caleg perempuan urutan 1: 1	Caleg perempuan urutan 1: 0	Caleg perempuan urutan 1: 1	Caleg perempuan urutan 1: 1	
	Caleg perempuan urutan 2: 0	Caleg perempuan urutan 2: 1	Caleg perempuan urutan 2: 2	Caleg perempuan urutan 2: 0	Caleg perempuan urutan 2: 2	Caleg perempuan urutan 2: 0	Caleg perempuan urutan 2: 0	
	Caleg perempuan urutan 3: 0	Caleg perempuan urutan 3: 1	Caleg perempuan urutan 3: 1	Caleg perempuan urutan 3: 1	Caleg perempuan urutan 3: 1	Caleg perempuan urutan 3: 1	Caleg perempuan urutan 3: 1	

Sumber. Data ini diolah dari beberapa sumber: (1) Sekretariat KPUD Surabaya, (2) Makalah seminar "Kemuslimahan Abad 21." 29 Februari 2004